



Katalog BPS:



Ensiklopedia Indikator

Ekonomi dan Sosial



BADAN PUSAT STATISTIK



Ensiklopedia Indikator

Ekonomi dan Sosial

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Ensiklopedia Indikator

ISBN : 978-979-064-279-9
No. Publikasi : 07330.1107
Katalog BPS : 9201008
Ukuran Buku : A5 (14,8 cm x 21 cm)
Jumlah Halaman : 253

Naskah:

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Gambar Kulit:

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Dicetak oleh:

CV. Nario Sari

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya.



<http://www.bps.go.id>

alametm

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Pendahuluan	1
Ekspor-Impor	5
Indeks Unit <i>Value</i> Ekspor/Impor	7
Indeks Harga Perdagangan Besar	9
Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)	11
Inflasi	13
Indeks Harga Konsumen (IHK)	15
Inflasi	18
Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT)	20
Inflasi Perdesaan	22
Indeks Tendensi Bisnis	25
Indeks Tendensi Bisnis (ITB)	27
Indeks Indikator Kini (IIK)	29
Indeks Indikator Mendatang (IIM)	31
Indeks Tendensi Konsumen	33
Indeks Tendensi Konsumen (ITK)	35
Indeks Indikator Kini (IIK)	37
Indeks Indikator Mendatang (IIM)	39
Nilai Tukar Petani	41
Nilai Tukar Petani (NTP)	43
Indeks Harga yang Diterima Petani (It)	45
Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)	47
Rata-Rata Harga Gabah	50
Pariwisata	53
Rata-Rata Lama Menginap Tamu (Asing dan Dalam Negeri)	55
Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	56
Rata-Rata Pengeluaran per Wisman per Hari per Kunjungan	58
Tingkat Penghunian Kamar (TPK)	60
Penerimaan dari Wisatawan Mancanegara	62
PDB/PDRB	63

Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	65
Laju Pertumbuhan PDB/PDRB	68
Indeks Implisit.....	70
Distribusi Persentase PDB/PDRB.....	72
PDB/PDRB per Kapita	73
Rasio Modal-Output Marginal	76
Rasio Tenaga Kerja-Output Marginal	77

Pertumbuhan Produksi Industri79

Pertumbuhan Produksi Industri Pengolahan	81
Indeks Produksi Industri Pengolahan.....	83

Transportasi87

Rasio Penumpang per Pesawat Udara.....	89
Rasio Barang per Pesawat Udara.....	91
Rasio Penumpang per Kapal	93
Rasio Barang per Kapal	95
Rasio Penduduk terhadap Mobil Penumpang	97
Rasio Penduduk terhadap Kendaraan Bermotor	99
Rasio Penduduk terhadap Bus Umum	101
Jumlah Kendaraan Bermotor.....	103
Panjang Jalan	105
Rasio Kendaraan Bermotor terhadap Panjang Jalan	106

Pendidikan..... 109

Angka Melek Huruf (AMH)	111
Angka Partisipasi Kasar (APK).....	113
Angka Partisipasi Murni (APM).....	115
Angka Partisipasi Sekolah (APS).....	117
Rata-Rata Lama Sekolah	119
Angka Putus Sekolah	122
Rasio Murid-Guru	124
Pengeluaran Publik masuk Pendidikan sebagai Persentase dari Total Belanja Pemerintah	125

Kesehatan 127

Persentase Balita yang Ditolong Penolong Kelahiran	129
Cakupan Imunisasi	130
Persentase Balita yang Sudah Diimunisasi Lengkap	131
Persentase Penduduk Sakit dengan Pengobatan sendiri.....	132
Persentase Penduduk Sakit yang Konsultasi ke Tenaga Medis.....	133

Persentase Penduduk Sakit yang Menjalani Rawat Inap di RS/Klinik yang Menyediakan	134
Tenaga Medis	134

Fertilitas 135

Rata-rata Jumlah Anak yang Pernah Dilahirkan/Paritas	137
Anak Lahir Hidup (ALH)	138
Anak Masih Hidup (AMH).....	139
Angka Kelahiran Kasar	140
Angka Kelahiran Menurut Umur	141
Angka Kelahiran Total.....	142
Angka Kelahiran Umum	143
Angka Reproduksi Neto.....	144
Angka Reproduksi Kasar.....	145
Rasio Anak-Ibu	146
Umur Kawin Pertama (UKP)	147
Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	148
Persentase Pemakai Suatu Cara KB Menurut Alat/Cara KB	149
Persentase Pernah Pakai KB.....	150

Mortalitas..... 151

Angka Kematian Anak (AKA)	153
Angka Kematian Balita (AKBa).....	154
Angka Kematian Bayi (AKB).....	155
Angka Kematian Ibu (AKI)	156
Angka Kematian Kasar (AKK).....	157
Angka Kematian Menurut Usia (AKMU).....	158
Angka Kematian Neo-natal	159
Angka Kematian Post Neo-natal	160
Angka Harapan Hidup.....	161

Morbiditas 163

Angka Kesakitan/ Morbiditas/ Presentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan	165
Rata-Rata Lama Sakit.....	166
Tingkat Prevalensi	167
Insidensi.....	168
Angka Fatalitas Kasus.....	169
Angka Daya Tular	170
Tingkat Serangan	171

Kependudukan.....	173
Kepadatan Penduduk.....	175
Laju Pertumbuhan Penduduk.....	177
Rasio Jenis Kelamin.....	179
Distribusi Penduduk Menurut Wilayah.....	181
Migrasi.....	183
Angka Migrasi Masuk.....	185
Angka Migrasi Keluar.....	186
Migrasi Neto.....	188
Migrasi Seumur Hidup.....	190
Migrasi Risen.....	191
Migrasi Total.....	192
Kemiskinan dan Ketimpangan.....	193
Garis Kemiskinan (GK).....	195
Persentase Penduduk Miskin.....	197
Indeks Kedalaman Kemiskinan.....	200
Indeks Keparahan Kemiskinan.....	203
Indeks Kemiskinan Manusia (IKM).....	204
Ketimpangan Pendapatan (Ukuran Bank Dunia).....	206
Koefisien Gini.....	207
Ketenagakerjaan.....	211
Angkatan Kerja.....	213
Setengah Penganggur.....	215
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	217
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	219
Tingkat Kesempatan Kerja.....	221
Rasio Ketergantungan.....	222
Rata-Rata Upah Harian Buruh Bangunan.....	223
Rata-Rata Upah Harian Buruh Tani.....	225
Pembangunan Manusia.....	227
Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	229
Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan (Daya Beli).....	232
Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	235
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	237
Daftar Pustaka.....	239
Tim Penyusun Ensiklopedia Indikator.....	241

Pendahuluan

Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan antara berbagai dimensi kehidupan, baik sosial maupun ekonomi sehingga tercipta integrasi berbagai sektor yang pada akhirnya mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, bahwa: “perekonomian disusun berdasarkan usaha bersama dengan asas kekeluargaan”, dan Pasal 34 yang berbunyi: “fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara”. Secara tidak langsung, hal tersebut menyiratkan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut model negara kesejahteraan. Dikemukakan oleh Suharto (2005) dalam Suradi (2007), bahwa Indonesia menganut faham “*welfare state*” dengan model “*participatory welfare state*” atau negara kesejahteraan partisipatif. Model ini menekankan, bahwa negara tetap ambil bagian dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan sosial. Namun demikian, dalam operasionalnya negara tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya.

Dalam kerangka teoritis, strategi pembangunan mutlak memerlukan serangkaian perencanaan yang terstruktur, realisasi yang tepat dan efisien, monitoring secara berkala, serta evaluasi yang akurat. Usaha tersebut harus dibarengi dengan segala daya untuk meletakkan landasan yang kuat agar pembangunan tahap berikutnya dapat menjadi lebih terarah dan lancar. Tahapan penting dari proses pembangunan yang memerlukan perhatian secara khusus yakni evaluasi terhadap kinerja pembangunan. Hal ini penting karena keberhasilan suatu pembangunan dapat dilihat berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Untuk memonitor pencapaian yang telah diraih, diperlukan suatu alat ukur yang mampu merangkum dinamika pembangunan dalam kurun waktu tertentu. Alat ukur tersebut biasanya dapat berupa angka-angka yang mampu memberikan gambaran, mengindikasikan seberapa dekat pencapaian tujuan yang ingin diraih. Indikator yang tepat, akurat, valid dan reliabel dapat digunakan sebagai alat ukur yang relevan dalam memonitor pencapaian pembangunan sehingga hal-hal sentral yang menjadi titik berat pembangunan dapat lebih difokuskan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1990), indikator adalah alat pemantau (sesuatu) yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Sementara itu, Pencheon (2005) indikator merupakan ukuran yang singkat dan jelas yang bertujuan untuk menggambarkan dengan detil tentang suatu sistem sehingga dapat membantu memahami, membandingkan, dan memprediksi, meningkatkan, dan melakukan inovasi.

Indikator sebagai suatu alat ukur seperti halnya alat ukur lain sangat penting karena secara luas dapat digunakan dalam tiga hal (Pencheon, 2005):

- untuk memahami: untuk mengetahui bagaimana suatu sistem bekerja dan bagaimana sistem itu dapat dikembangkan (peran penelitian);
- untuk kinerja: memantau jika dan bagaimana kinerja suatu sistem dalam sebuah standar yang sudah disepakati (peran kinerja/manajerial/dan perbaikan);
- untuk pertanggungjawaban: memungkinkan kita untuk tetap memegang tanggungjawab dan diawasi secara terbuka, baik secara individu, tim, dan organisasi (peran tanggung jawab/demokrasi).

Selain itu, indikator juga dapat digunakan untuk mengkaji kondisi saat ini dengan arah tujuan yang ingin dicapai, sebagai bahan evaluasi, untuk menggambarkan efek dari suatu program, untuk menyampaikan suatu pesan, dan lain sebagainya.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai instansi resmi pemerintah yang selain menyediakan berbagai macam data sesuai dengan kebutuhan berbagai pengguna, juga menghasilkan berbagai macam indikator yang dapat menggambarkan fenomena serta mempengaruhi kondisi sosial ekonomi nasional. Indikator tersebut mencakup berbagai dimensi yang terangkum dalam berbagai macam publikasi. Mengingat bahwa cakupan pengguna indikator sangat luas, mulai dari pemerintah, akademisi, pebisnis, kalangan internasional, hingga masyarakat umum, sangat perlu dilakukan kompilasi terhadap indikator-indikator yang terdapat pada sejumlah publikasi. Hal ini penting karena indikator-indikator yang terpecah pada berbagai publikasi akan menimbulkan ketidakefisienan bagi pengguna yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai indikator.

Ensiklopedia Indikator ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi para pengguna dalam memahami secara ringkas tentang berbagai indikator yang umum digunakan dalam dimensi sosial maupun ekonomi.

Tujuan

Tujuan penyusunan Ensiklopedia Indikator ini adalah untuk merangkum berbagai indikator yang umum digunakan oleh berbagai kalangan dan yang telah dipublikasi rutin setiap tahun oleh BPS.

Manfaat

Publikasi ini berisi penjelasan praktis tentang berbagai indikator yang ada di BPS sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengguna, antara lain:

1. membantu pengguna data dalam memahami jenis-jenis indikator;

2. membantu pengguna data dalam memahami kegunaan/manfaat indikator;
3. membantu pengguna data dalam menginterpretasikan indikator;
4. membantu pengguna data dalam memahami cara penghitungannya;
5. untuk memudahkan pengguna data dalam mencari publikasi dimana indikator tersebut disajikan.

Sistematika Penulisan

Ensiklopedia Indikator ini terdiri dari tiga bagian yang saling berkaitan.

Bagian pertama menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan ensiklopedia ini.

Bagian kedua membahas tentang indikator **ekonomi** yang terbagi menjadi beberapa kelompok besar, yaitu ekspor-impor, Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), inflasi, Indeks Tendensi Bisnis (ITB), Indeks Tendensi Konsumen (ITK), Nilai Tukar Petani, pariwisata, Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan produksi industri, dan transportasi.

Bagian ketiga memaparkan tentang indikator **sosial** yang secara umum dikelompokkan ke dalam indikator pendidikan, kesehatan (yang mencakup fertilitas, mortalitas, dan morbiditas), kependudukan (juga mencakup migrasi), kemiskinan, ketenagakerjaan, dan pembangunan manusia.

Setiap indikator disajikan secara terstruktur mulai dari konsep dan definisi, manfaat, rumus/metode perhitungan, interpretasi, sumber data, level penyajian, publikasi, penyedia informasi, keterbatasan, dan implementasi.

Ekspor-Import

<http://www.ins.go.id>

Indeks Unit Value Ekspor/Impor

Export/Import Unit Value Index

Konsep dan Definisi

Merupakan indeks relatif harga ekspor/impor yang menggambarkan perkembangan harga-harga dari ekspor/impor Indonesia. Indeks unit value ini dihitung berdasarkan perubahan relatif harga ekspor/impor pada setiap *Harmonized System* (HS) yang ditimbang berdasarkan nilai ekspor/impor pada masing-masing HS pada tahun dasar tertentu.

Manfaat

- Untuk menghitung PDB atas dasar harga tetap, terutama untuk komponen ekspor/ impor dalam struktur penggunaan PDB.
- Untuk menghitung nilai tukar perdagangan yaitu dengan membandingkan perkembangan indeks harga ekspor dan impor.
- Untuk mendapatkan harga ekspor/impor apakah deflasi atau inflasi.
- Mengukur perubahan ekspor/impor riil.

Rumus

$$P_{t,0} = 100 * \left[\frac{\sum_i \frac{V_{i,t}}{\sum_i V_{i,t}}}{\left(\frac{I_{i,t}}{I_{i,0}} \right)} \right]^{-1}$$

$P_{t,0}$: indeks bulan t, tahun dasar 0

$V_{i,t}$: nilai kelompok barang i pada bulan t

$\sum V_{i,t}$: nilai keseluruhan kelompok barang yang termasuk dalam indeks

$I_{i,t}$: indeks untuk kelompok barang i pada bulan t dengan tahun dasar 0

$I_{i,0}$: rata-rata indeks $I_{i,t}$ tahun dasar 0

Interpretasi

- $P_{t,0} > 100$ berarti unit value barang ekspor/impor pada periode t lebih tinggi dari unit value pada tahun dasar.
- $P_{t,0} = 100$ berarti unit value barang ekspor/impor pada periode t sama dengan unit value pada tahun dasar
- $P_{t,0} < 100$ berarti unit value barang ekspor/impor pada periode t lebih rendah dari unit value pada tahun dasar.

Sumber Data

Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diterima BPS dari Kantor-kantor Bea Cukai.

Level Penyajian

Nasional.

Publikasi

Indeks Unit Value Impor/Import Unit Value Indexes, Indeks Unit Value Export/Export Unit Value Indexes.

Penyedia Informasi

Direktorat Distribusi.

Keterbatasan

- Keragaman barang impor yang dilaporkan pada dokumen PIB masih

sangat tinggi walaupun menggunakan klasifikasi HS 10 digit, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui apakah perubahan unit *value* pada suatu bulan tertentu disebabkan karena adanya perubahan harga atau karena pergeseran komposisi barang.

- Kurangnya akurasi dalam pencatatan dokumen sehingga akan terjadi *over-invoice* atau *under-invoice*.
- Perubahan unit *value* mungkin bukan hanya merefleksikan perubahan harga melainkan juga perubahan kualitas barang.

Catatan

Tahun dasar yang pernah digunakan dalam penyusunan indeks unit *value* ekspor impor adalah Januari 2000 dan Januari 2007. Periode penyajian: bulanan.

Implementasi

Ringkasan Analisis Indeks Unit Value Ekspor/Export Unit Value Index Indonesia 2007-2008

Selama tahun 2008, nilai ekspor meningkat 20,09 persen dibandingkan dengan tahun 2007. Pada saat yang sama, rata-rata indeks harga ekspor juga mengalami peningkatan sebesar 32,46 persen. Secara kumulatif, pertumbuhan volume ekspor selama tahun 2008 turun sebesar 9,43 persen (diperoleh dari hasil bagi pertumbuhan nilai ekspor dengan indeks harga ekspor)

Pertumbuhan nilai ekspor non migas selama tahun 2008 sebesar 17,26 persen. Dengan kenaikan indeks harga ekspor non migas sebesar 14,72 persen maka

volume ekspor non migas adalah sebesar 2,21 persen.

Pada tahun 2008, untuk ekspor migas pertumbuhan indeks harga ekspor migas naik sebesar 12,26 persen, sementara itu nilai ekspor migas naik sebesar 31,86 persen. Sedangkan volume ekspor migas naik sebesar 17,46 persen.

Tahun	2007	2008
Perubahan nilai ekspor	113,20	120,09
Perkembangan nilai ekspor	13,20	20,09
Indeks harga ekspor	111,69	147,94
Perubahan indeks harga	83,78	132,46
Perkembangan volume ekspor	35,12	-9,34

***perubahan volume diperoleh dari hasil bagi perubahan nilai ekspor dengan perubahan indeks harga.*

Dari tabel di atas, Indeks Harga Ekspor tahun 2007-2008 adalah 116,69 dan 147,94.

Pertumbuhan ekspor tahun 2007 dan 2008 adalah sebesar 13,2 persen dan 20,09 persen. Sementara itu pertumbuhan riil ekspor selama tahun 2007 dan 2008 adalah sebesar 35,12 dan -9,34 persen.

Sumber: Publikasi Indeks Unit Value Ekspor/Export Unit Value Index 2007-2008, BPS. Diakses tanggal 18 November 2010.

Indeks Harga Perdagangan Besar

Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

The Wholesale Price Index (WPI)

Konsep dan Definisi

Angka indeks yang menggambarkan besarnya perubahan harga pada tingkat harga perdagangan besar/harga grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu negara/daerah. Komoditas tersebut merupakan produksi dalam negeri yang dipasarkan di dalam negeri ataupun diekspor dan komoditas yang diimpor. Jumlah komoditas yang dicakup sebanyak 314 jenis dan dikelompokkan dalam tiga sektor, dan dua kelompok barang, yaitu: Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Industri, Kelompok Barang Impor, dan Kelompok Barang Ekspor. IHPB disajikan dalam tiga macam pengelompokan, yaitu:

- Menurut komponen penyediaan/ penawaran barang atau menurut sektor/ kelompok barang.
- Menurut penggunaan barang.
- Menurut kelompok barang dalam proses produksi.

Manfaat

- Dapat digunakan sebagai deflator PDB untuk perkembangan ekonomi.
- Perusahaan Kontruksi dan Bangunan yang mendapatkan tender proyek dari pemerintah untuk pembangunan jangka waktu lebih dari satu tahun dapat menggunakan data IHPB Kontruksi dan bangunan sebagai bahan eskalasi harga.

Metode Penghitungan

Penghitungan IHPB menggunakan formula Laspeyres yang dimodifikasi:

$$I_n = \frac{\sum \frac{P_n}{P_{n-1}} \times P_{n-1} Q_o}{\sum P_o Q_o} \times 100$$

Keterangan:

- I_n : Indeks bulan ke n (bulan penelitian)
- P_n : Harga bulan ke n (bulan penelitian)
- P_{n-1} : Harga bulan ke n-1 (bulan sebelumnya)
- $P_{n-1} Q_o$: Nilai timbangan bulan n-1 (bulan sebelumnya)
- $P_o Q_o$: Nilai timbangan tahun dasar (2005=100).

Interpretasi

- $I_n > 100$: kondisi harga-harga perdagangan besar/harga grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan pada bulan dan tahun berjalan secara umum lebih besar dibandingkan tahun dasar.
- $I_n = 100$: kondisi harga-harga perdagangan besar/harga grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan pada bulan dan tahun berjalan secara umum sama dengan tahun dasar.
- $I_n < 100$: kondisi harga-harga perdagangan besar/harga grosir dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan pada bulan dan tahun berjalan secara umum lebih kecil dibandingkan tahun dasar.

Sumber Data

Survei Harga Perdagangan Besar.

Level Penyajian

Nasional.

Publikasi

Indeks Harga Perdagangan Besar, Statistik Indonesia.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Harga.

Keterbatasan

- Belum bisa disajikan dalam skala regional (terbatas pada skala nasional).
- Hanya bisa dibandingkan dengan tahun dasar.

Implementasi

Indeks Harga Perdagangan Besar Juni 2010 Naik 0,72%

Jakarta, MINDCOMMONLINE.COM – Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum tanpa migas pada Juni 2010 naik 0,72% dibandingkan bulan Mei. Kenaikan indeks terbesar terjadi pada sektor pertanian sebesar 1,98% dan terendah terjadi pada sektor industri sebesar 0,22%.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, IHPB kelompok bahan bangunan/konstruksi yang terdiri dari lima kelompok jenis bangunan/konstruksi pada Juni 2010 mengalami penurunan sebesar 0,03% dibandingkan bulan sebelumnya.

“Penurunan indeks terbesar terjadi pada kelompok bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal sebesar 0,1%,” demikian diungkapkan dalam dokumen Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Juli 2010, yang dilansir BPS awal Juli.

Dijelaskan pula bahwa IHPB beberapa bahan bangunan/konstruksi yang diwakili oleh delapan jenis komoditi, terdapat tiga komoditi mengalami penurunan dan lima komoditi mengalami kenaikan dibandingkan bulan sebelumnya.

Penurunan terbesar terjadi pada komoditi besi beton sebesar 0,43% dan terendah terjadi pada komoditi kayu lapis sebesar 0,31%. Sedangkan kenaikan terbesar terjadi pada aspal sebesar 0,48% dan kenaikan terkecil terjadi pada komoditi cat tembok sebesar 0,01%.

Sebelumnya, IHPB Umum Mei 2010 mengalami kenaikan 0,41% dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan indeks terbesar terjadi pada kelompok barang ekspor sebesar 1,21% dan terendah terjadi pada kelompok barang impor sebesar 0,19%. (ra)

Sumber: <http://mindcomm-strategy.com/indeks-harga-perdagangan-besar-juni-2010-naik-072/>

Tanggal akses: 10 November 2010

Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Consumer Price Index (CPI)

Konsep dan Definisi

Adalah suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Jenis barang dan jasa tersebut dikelompokkan menjadi 7 kelompok yaitu bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi, dan olahraga; transpor dan komunikasi. Mulai bulan Juni 2008, Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencakup sekitar 284-441 komoditas dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup (SBH) di 66 kota tahun 2007.

Manfaat

- Mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang dan jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat.
- Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan inflasi atau deflasi.
- Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (*wage-indexation*).
- Penyesuaian Nilai Kontrak (*contractual payment*).
- Eskalasi Nilai Proyek (*project escalation*).
- Penentuan Target Inflasi (*inflation targeting*).
- Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*budget indexation*).
- Sebagai pembagi PDB, PDRB (GDP Deflator).
- Sebagai proksi perubahan biaya hidup (*proxy of cost of living*).
- Indikator dini tingkat bunga, valas, dan indeks harga saham.

Rumus

Rumus yang digunakan untuk menghitung IHK adalah Laspeyres yang dimodifikasi (*Modified Laspeyres*).

$$IHK_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} \cdot P_{(n-1)i} \cdot Q_{0i}}{\sum_{i=1}^k P_{0i} \cdot Q_{0i}} \times 100$$

dengan:

- IHK_n : indeks periode ke-(n)
- P_{ni} : Harga jenis barang i, periode ke-(n)
- $P_{(n-1)i}$: Harga jenis barang i, periode ke-(n-1)
- $P_{(n-1)i} \cdot Q_{0i}$: Nilai konsumsi jenis barang i, periode ke-(n-1)
- $P_{0i} \cdot Q_{0i}$: Nilai konsumsi jenis barang i pada tahun dasar
- k : Jumlah jenis barang paket komoditas

Misalkan: IHK pada bulan Juli 2010 adalah 121,74 (2007=100), berarti tingkat harga (konsumen/eceran) pada bulan Juli 2010 lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat harga (konsumen/eceran) tahun 2007.

Interpretasi

- $IHK_n < 100$: tingkat harga (konsumen/ eceran) pada periode

berjalan lebih kecil dibandingkan tahun dasar.

- $IHK_n = 100$: tingkat harga (konsumen/ eceran) pada periode berjalan sama dengan tahun dasar.
- $IHK_n > 100$: tingkat harga (konsumen/ eceran) pada periode berjalan lebih besar dibandingkan tahun dasar.

Sumber Data

Survei Biaya Hidup (SBH), Survei Harga Konsumen (SHK).

Level Penyajian

Nasional dan 66 kota (33 ibukota provinsi dan 33 kota).

Publikasi

Statistik Indonesia (SI), Indikator Ekonomi, Indeks Harga Konsumen di 66 Kota di Indonesia, Warta IHK.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Harga.

Keterbatasan

-

Catatan

Perlu diperhatikan penggunaan tahun dasar di dalam perhitungan IHK, Mulai bulan Juni 2008, Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mencakup sekitar 284 – 441 komoditas dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup (SBH) di 66 kota tahun 2007. Sedangkan IHK sebelum bulan Juni 2008 masih mencakup 283-397 komoditas dengan menggunakan pola konsumsi hasil SBH di 45 kota tahun 2002.

Implementasi

Kupang dan Maumere Alami Peningkatan IHK

Kupang, POS KUPANG.Com - Dua kota di Nusa Tenggara Timur yaitu Kota Kupang dan Kota Maumere mengalami peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2010, kata Kepala Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur Poltak Sutrisno Siahaan, di Kupang, Sabtu (2/10/2010).

Ia menyebut Kota Kupang terjadi peningkatan IHK dari 130,99 pada bulan Agustus 2010 menjadi 131,25 pada bulan September 2010. Sedangkan Kota Maumere terjadi peningkatan IHK dari 134,04 pada bulan Agustus 2010 menjadi 135,89 pada bulan September 2010. Menurut dia, peningkatan IHK ini telah menyebabkan terjadinya inflasi di Kota Kupang 0,20 persen, sedangkan Kota Maumere terjadi inflasi sebesar 1,38 persen.

Laju inflasi tahun kalender September 2010 untuk Kota Kupang, sebesar 8,81 persen dan inflasi "year on year" (September 2010 terhadap September 2009) adalah 11,42 persen. Sedangkan untuk Kota Maumere, laju inflasi tahun kalender September 2010 sebesar 7,84 persen dan inflasi "year on year" (September 2010 terhadap September 2009) adalah 8,05 persen.

Hal ini terjadi untuk Kota Kupang karena selama bulan September 2010, kelompok Kesehatan mengalami peningkatan indeks terbesar, sebesar 1,25 persen, diikuti kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 1,23 persen. Diikuti kelompok transpor,

komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,91 persen, kelompok sandang sebesar 0,53 persen dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 0,02 persen.

Sedangkan kelompok yang mengalami perubahan indeks negatif di Kota Kupang adalah kelompok bahan makanan sebesar -0,98 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar -0,26 persen. Sementara untuk Kota Maumere selama bulan September 2010, kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga mengalami peningkatan indeks terbesar sebesar 2,10 persen diikuti kelompok bahan makanan sebesar 1,84 persen.

Berikutnya kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 1,75 persen, kelompok sandang sebesar 1,37 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,79 persen, dan kelompok kesehatan sebesar 0,76 persen. Kelompok yang mengalami penurunan indeks harga yaitu kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,03 persen.

Ia menyebut dari 66 kota yang diambil sampel IHK Nasional, ada 57 kota mengalami inflasi dan sembilan kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tarakan yakni sebesar 1,80 persen, diikuti Kota Pangkal Pinang (1,50 persen), Kota Maumere (1,38 persen), Kota Tegal (1,27 persen), Kota Bengkulu (1,19 persen). Inflasi terendah terjadi pada Kota Batam, yaitu sebesar 0,03 persen.

Sementara deflasi tertinggi terjadi di Kota Lhokseumawe, yakni sebesar 1,28 persen, diikuti Kota Ternate (0,57 persen), Kota

Manokwari (0,46 persen). Deflasi terendah terjadi di Kota Medan, yaitu sebesar 0,20 persen.

Berikut beberapa kota di bagian timur Indonesia, diantaranya Kota Maumere (1,38 persen), Kota Ambon (0,95 persen), Kota Kupang (0,20 persen), Kota Mataram (0,59 persen), Kota Mamuju (0,23 persen), Kota Ternate (-0,57 persen). Kota Watampone (0,82 persen), Kota Makassar (0,40 persen), Kota Jayapura (0,59 persen), Kota Parepare (0,29 persen), Kota Denpasar (0,22 persen), Kota Palopo (0,46 persen), Kota Bima (0,19 persen), Kota Kendari (-0,42 persen). Kota Manado (0,45 persen), Kota Gorontalo (0,36 persen), Kota Manokwari (-0,46 persen), Kota Sorong (0,92 persen), dan Kota Palu (0,94 persen). (ant)

Sumber: <http://www.pos-kupang.com/read/artikel/53429/ekbis/kupang-dan-maumere-alami-peningkatan-ihk>

Diakses tanggal: 16 November 2010

Inflasi

Inflation

Konsep dan Definisi

Merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang yang harganya naik dan ada yang tetap. Namun, tidak jarang ada barang/jasa yang harganya justru turun. Hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Index* (CPI). Persentase kenaikan IHK dikenal dengan inflasi, sedangkan penurunannya disebut deflasi.

Manfaat

- Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (*wage-indexation*).
- Penyesuaian Nilai Kontrak (*contractual payment*).
- Eskalasi Nilai Proyek (*Project Escalation*).
- Penentuan Target Inflasi (*inflation targeting*).
- Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (*budget indexation*).
- Sebagai pembagi PDB, PDRB (GDP Deflator).
- Sebagai proksi perubahan biaya hidup (*proxy of cost of living*).
- Indikator dini tingkat bunga, valas, dan indeks harga saham.

Rumus

$$INF_n = \left(\frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \right) \times 100$$

dengan:

INF_n : inflasi atau deflasi pada waktu (bulan atau tahun) (n)

IHK_n : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n)

IHK_{n-1} : Indeks Harga Konsumen pada waktu (bulan atau tahun) (n-1)

Interpretasi

- $INF_n < 0$: tingkat harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga pada waktu (bulan atau tahun) (n) mengalami penurunan dibandingkan waktu (bulan atau tahun) (n-1). Keadaan ini disebut juga deflasi.
- $INF_n = 0$: tingkat harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga pada waktu (bulan atau tahun) (n) sama dengan waktu (bulan atau tahun) (n-1).
- $INF_n > 0$: tingkat harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga pada waktu (bulan atau tahun) (n) mengalami peningkatan dibandingkan waktu (bulan atau tahun) (n-1). Keadaan ini disebut juga inflasi.

Misalkan: Berdasarkan hasil pemantauan BPS di 66 kota, pada bulan Juli 2010 terjadi inflasi 1,57 persen, atau terjadi kenaikan IHK dari 119,86 pada bulan Juni 2010 menjadi 121,74 pada bulan Juli 2010. Dengan menggunakan rumus perhitungan inflasi, diperoleh inflasi Juli

2010 sebesar $((121,74-119,86)/119,86) \times 100\% = 1,57\%$.

Sumber Data

Survei Biaya Hidup (SBH), Survei Harga Konsumen (SHK).

Level Penyajian

Nasional dan 66 kota (33 ibukota provinsi dan 33 kota).

Publikasi

Statistik Indonesia (SI), Indikator Ekonomi, Indeks Harga Konsumen di 66 Kota di Indonesia, Warta IHK.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Harga.

Keterbatasan

-

Implementasi

Target Inflasi Bakal Meleset

Jakarta, CyberNews. Pemerintah menargetkan laju inflasi tahun 2010 dalam APBN-Perubahan sebesar 5,3%. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) melansir laju inflasi 'year to date' (Januari-Oktober) sudah mencapai 5,35%.

Kepala BPS Rusman Heriawan menyebutkan dalam sisa dua bulan ke depan harus deflasi agar target inflasi tercapai. "Bisa saja kalau deflasi dua bulan ke depan, laju inflasi kembali ke 5,3%. Tapi memang sulit untuk deflasi dua bulan ke depan," kata Rusman, Senin (1/11).

Menurutnya, jika dua bulan ke depan inflasi maka target inflasi dalam APBNP akan terlampaui. Namun, Rusman meyakini laju inflasi tahun 2010 secara

keseluruhan tidak akan menembus angka 6%. "Masih ada ruang 0,65% untuk dua bulan ke depan supaya inflasi tidak menembus 6%," ujarnya.

Rusman menambahkan, tren laju inflasi pada bulan November dan Desember pada tahun-tahun sebelumnya memang rendah. Meskipun, katanya, di bulan Desember ada hari raya Natal dan Tahun Baru yang dapat mengerek inflasi. "Desember itu yang menggeliat adalah orang-orang kristiani, tapi lain dasyatnya dengan Lebaran kalau dilihat dari komposisi penganut agama di Indonesia. Jadi Desember ada pengaruh inflasi tapi tidak sehebat September saat Lebaran," jelas dia.

Rusman memaparkan, pada tahun lalu bulan November tercatat deflasi sebesar 0,03% dan Desember inflasi 0,33%. Sedangkan di tahun 2008, bulan November tercatat inflasi 0,12% dan Desember deflasi 0,04%. "Belajar dari dua tahun kemarin November Desember bukan bulan inflasi besar," ujar Rusman.

(Kartika Runiasari /CN14).

Sumber:

<http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2010/11/01/69374/Target-Inflasi-Bakal-Meleset>

Diakses tanggal: 16 November 2010

Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT)

Household Consumption Index (HCI)

Konsep dan Definisi

Merupakan indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang dan jasa yang dibayar konsumen di pedesaan. Jenis barang dan jasa tersebut dikelompokkan menjadi 7 kelompok yaitu bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi, dan olahraga; transpor dan komunikasi. Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) yang mencakup sekitar 142-232 komoditas dihitung berdasarkan pola konsumsi masyarakat pedesaan hasil Survei Pergantian Tahun Dasar 2007 dan SUSENAS. Selain IKRT total, disediakan juga IKRT untuk 5 subsektor berikut: tanaman pangan; hortikultura; tanaman perkebunan rakyat; peternakan; dan perikanan.

Manfaat

- Mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang dan jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat.
- Perubahan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) pedesaan atau tingkat penurunan (deflasi) pedesaan dari barang dan jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
- Sebagai pembagi upah riil,

- Sebagai proksi perubahan biaya hidup (*proxy of cost of living*) di pedesaan

Rumus

Rumus yang digunakan untuk menghitung IKRT adalah Laspeyres yang dimodifikasi (*Modified Laspeyres*).

$$IKRT_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} \cdot P_{(n-1)i} \cdot Q_{0i}}{\sum_{i=1}^k P_{0i} \cdot Q_{0i}} \times 100$$

dengan:

- $IKRT_n$: indeks periode ke-(n)
- P_{ni} : Harga jenis barang i, periode ke-(n)
- $P_{(n-1)i}$: Harga jenis barang i, periode ke-(n-1)
- $P_{(n-1)i} \cdot Q_{0i}$: Nilai konsumsi jenis barang i, periode ke-(n-1)
- $P_{0i} \cdot Q_{0i}$: Nilai konsumsi jenis barang i pada tahun dasar
- k : Jumlah jenis barang paket komoditas

Interpretasi

- $IKRT_n < 100$: tingkat harga (konsumen/ eceran) di pedesaan pada periode berjalan lebih kecil dibandingkan tahun dasar.
- $IKRT_n = 100$: tingkat harga (konsumen/ eceran) di pedesaan pada periode berjalan sama dengan tahun dasar.
- $IKRT_n > 100$: tingkat harga (konsumen/ eceran) di pedesaan pada periode berjalan lebih besar dibandingkan tahun dasar.

Sumber Data

Survei Pergantian Tahun Dasar 2007 dan SUSENAS.

Publikasi

Statistik Nilai Tukar Petani di Indonesia, Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, dan Berita Resmi Statistik.

Level Penyajian

Provinsi dan nasional.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Harga.

Keterbatasan

Belum bisa disajikan dalam level kabupaten.

Implementasi

(Tabel pada halaman selanjutnya)

Pada September 2010 terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,41 persen dengan Indeks Umum Konsumsi Rumah Tangga 130,65. Dalam bulan ini dari 32 provinsi, 27 provinsi mengalami inflasi dan 5 provinsi mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Banten sebesar 1,15 persen sedangkan inflasi terendah terjadi di Bali sebesar 0,01 persen. Deflasi tertinggi terjadi di Lampung sebesar 0,29 persen sedangkan deflasi terendah terjadi di Riau sebesar 0,07 persen.

Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi

Inflasi Perdesaan

Rural Inflation

Konsep dan Definisi

Persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga di perdesaan. Ada barang yang harganya naik dan ada yang tetap. Namun, tidak jarang ada barang/jasa yang harganya justru turun. Hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) atau *Household Consumption Index* (HCI). Persentase kenaikan IKRT dikenal dengan inflasi perdesaan, sedangkan penurunannya disebut deflasi perdesaan. Inflasi/deflasi biasanya disediakan dalam tiga jenis waktu atau periode, yaitu dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun (*year-on-year*) dan tahun kalender. Dari bulan ke bulan merupakan perbandingan IKRT bulan sekarang dengan bulan sebelumnya pada tahun yang sama, *year-on-year* merupakan perbandingan IKRT tahun sekarang dengan tahun sebelumnya pada bulan yang sama sedangkan periode tahun kalender merupakan perbandingan IKRT tahun sekarang pada bulan berjalan dengan tahun sebelumnya pada bulan desember.

Inflasi disediakan setiap bulan dan tahun sehingga bisa dilihat perubahannya atau lajunya setiap bulan/tahun.

Manfaat

Sebagai proksi perubahan biaya hidup (*proxy of cost of living*) di perdesaan.

Rumus

$$INFD_n = \left(\frac{IKRT_n - IKRT_{n-1}}{IKRT_{n-1}} \right) \times 100$$

dengan:

$INFD_n$ = inflasi atau deflasi perdesaan pada waktu (bulan atau tahun) (n)

$IKRT_n$ = Indeks Konsumsi Rumah Tangga pada waktu (bulan atau tahun) (n)

$IKRT_{n-1}$ = Indeks Konsumsi Rumah Tangga pada waktu (bulan atau tahun) (n-1).

Interpretasi

- $INFD_n < 0$: tingkat harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga perdesaan pada waktu (bulan atau tahun) (n) mengalami penurunan dibandingkan waktu (bulan atau tahun) (n-1). Dan disebut juga terjadi deflasi.
- $INFD_n = 0$: tingkat harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga perdesaan pada waktu (bulan atau tahun) (n) sama dengan waktu (bulan atau tahun) (n-1).
- $INFD_n > 0$: tingkat harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga perdesaan pada waktu (bulan atau tahun) (n) mengalami peningkatan dibandingkan waktu (bulan atau tahun) (n-1). Dan disebut juga terjadi inflasi.

Sumber Data

Survei Pergantian Tahun Dasar 2007, Susenas, dan Survei Harga Perdesaan.

Level Penyajian

Provinsi dan nasional.

Publikasi

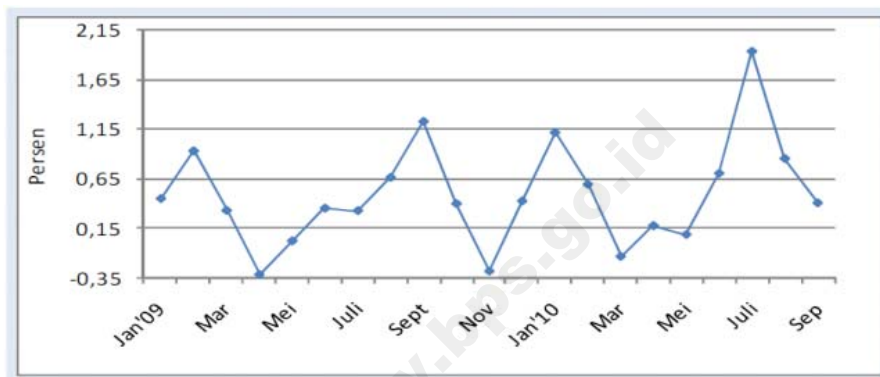
Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi dan Berita Resmi Statistik.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Harga.

Keterbatasan

Belum bisa disajikan dalam level kabupaten.

Implementasi**Inflasi Perdesaan, Januari 2009–September 2010**

Pada September 2010 terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,41 persen dengan Indeks umum Konsumsi Rumah Tangga 130,65. Dalam bulan ini dari 32 provinsi, 27 provinsi mengalami inflasi dan 5 provinsi mengalami deflasi. Inflasi

tertinggi terjadi di Banten sebesar 1,15 persen sedangkan inflasi terendah terjadi di Bali sebesar 0,01 persen. Deflasi tertinggi terjadi di Lampung sebesar 0,29 persen sedangkan deflasi terendah terjadi di Riau sebesar 0,07 persen.

Tabel 8.3
Laju Inflasi Perdesaan, Tahun Kalender 2010, dan September 2010
Terhadap September 2009 Menurut Kelompok Pengeluaran (2007 = 100)

Kelompok Pengeluaran	Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT)			Inflasi Sep 2010 ¹⁾	Laju Inflasi 2010	
	Sep 2009	Des 2009	Sep 2010		Tahun Kalender ²⁾	Year-on-year ³⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umum	122,72	123,39	130,65	0,41	5,88	6,46
1. Bahan makanan	125,66	126,02	136,64	0,29	8,43	8,74
2. Makanan jadi	121,16	122,35	128,15	0,59	4,74	5,77
3. Perumahan	125,16	126,21	130,70	0,45	3,56	4,43
4. Sandang	120,31	121,47	126,15	1,07	3,85	4,86
5. Kesehatan	116,78	117,55	120,73	0,19	2,70	3,38
6. Pendidikan, Rekreasi & OR	116,57	116,96	119,93	0,26	2,02	2,37
7. Transportasi dan komunikasi	110,83	111,04	112,11	0,36	0,96	1,15

¹⁾ Persentase perubahan IKRT September 2010 terhadap IKRT bulan sebelumnya

²⁾ Persentase perubahan IKRT September 2010 terhadap IKRT bulan Desember 2009

³⁾ Persentase perubahan IKRT September 2010 terhadap IKRT bulan September 2009

Laju inflasi perdesaan tahun kalender (Januari-September 2010) sebesar 5,88persen dan *year on year* (September 2010 terhadap September 2009) sebesar 6,46 persen.

Sumber: Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi

Indeks Tendensi Bisnis

Indeks Tendensi Bisnis (ITB)

Business Tendency Index

Konsep dan Definisi

ITB adalah indikator komposit yang memberikan informasi mengenai keadaan bisnis dan perekonomian dalam jangka pendek, yaitu pada triwulan berjalan dan prediksi triwulan kedepan. Indeks Tendensi Bisnis terdiri dari dua jenis indeks yaitu Indeks Indikator Kini (*Current Indicator Index*) dan Indeks Indikator Mendatang (*Future Indicator Index*).

Manfaat

- Memberikan informasi yang dini tentang perkembangan ekonomi dari sisi pengusaha.
- Memberikan perkiraan kondisi bisnis tiga bulan mendatang.

Metode Penghitungan

Penghitungan ITB triwulan berjalan menggunakan Indeks Indikator Kini (*Current Indicator Index*) sedangkan penghitungan ITB triwulan berjalan menggunakan Indeks Indikator Mendatang (*Future Indicator Index*).

Interpretasi

- $100 < I < 200$: jumlah jawaban "meningkat" lebih besar dari jawaban "menurun". Artinya, kondisi bisnis pada triwulan berjalan meningkat dibanding periode triwulan sebelumnya (untuk Indeks Indikator Kini) atau kondisi bisnis pada triwulan mendatang meningkat dibanding periode triwulan berjalan (untuk Indeks Indikator Mendatang).

- $I = 100$: Jumlah jawaban "meningkat" dan "menurun" seimbang. Artinya kondisi bisnis pada triwulan berjalan sama keadaannya dibanding triwulan sebelumnya (untuk Indeks Indikator Kini) atau kondisi bisnis pada triwulan mendatang sama dibanding periode triwulan berjalan (untuk Indeks Indikator Mendatang).
- $I < 100$: Jumlah jawaban "menurun" lebih besar dari jawaban "meningkat". Artinya kondisi bisnis pada triwulan berjalan menurun dibanding keadaan triwulan sebelumnya (untuk Indeks Indikator Kini) atau kondisi bisnis pada triwulan mendatang menurun dibanding periode triwulan berjalan (untuk Indeks Indikator Mendatang).

Sumber Data

Survei Tendensi Bisnis Bank Indonesia.

Level Penyajian

Nasional dan provinsi.

Publikasi

Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen.

Penyedia Informasi

Direktorat Analisis dan Pengembangan.

Keterbatasan

- Hanya bisa dibandingkan dengan 1 periode sebelumnya (karena merupakan indeks berantai).

Implementasi

Kuartal III, Tendensi Bisnis Membaik

JAKARTA - Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Tendensi Bisnis (ITB) kuartal m-2010 sebesar 107,29. Angka ini

mengindikasikan kondisi bisnis meningkat dari kuartal sebelumnya. Selain itu, tingkat optimisme pelaku bisnis pada kuartal III juga lebih tinggi dibandingkan kuartal II-2010.

"Seluruh sektor ekonomi mengalami peningkatan kondisi bisnis. Sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami peningkatan bisnis tertinggi, dengan nilai ITB 109,18. Sedangkan sektor pertanian mengalami peningkatan bisnis terendah, dengan nilai ITB 103,79," kata Deputy Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Slamet Sutomo, di Jakarta, Jumat (5/11).

Slamet menjelaskan, kondisi bisnis kuartal ini membaik, karena adanya peningkatan pendapatan usaha, kapasitas produksi, dan rata-rata jam kerja. Sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami peningkatan pendapatan usaha paling tinggi, sedangkan peningkatan terendah terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian. Terkait ITB, BPS memperkirakan nilai ITB kuartal IV-2010 sebesar 105,45. Dengan demikian, kondisi bisnis kuartal tersebut lebih besar dibandingkan kuartal III.

Sementara itu, Indeks Tendensi Konsumen (ITK) kuartal III-2010 juga meningkat ITK di Jabodetabek mencapai 110,67. Ini berarti kondisi ekonomi konsumen meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya. Tingkat kepercayaan konsumen juga meningkat dibandingkan kuartal II-2010.

Sementara itu, kondisi ekonomi konsumen membaik, karena didorong peningkatan pendapatan rumah tangga. Selain itu, pengaruh inflasi terhadap

konsumsi makanan sehari-hari juga relatif rendah. Hal ini seiring peningkatan konsumsi beberapa komoditas makanan maupun nonmakanan, seperti biaya pendidikan, perumahan, transportasi, dan rekreasi, (teh)

Sumber: <http://bataviase.co.id>

Tanggal akses: 09 November 2010

Indeks Indikator Kini (IIK)

Current Indicator Index (CII)

Konsep dan Definisi

IIK adalah indeks komposit yang terdiri dari 3 indeks variabel pembentuk, yaitu pendapatan usaha, kapasitas produksi, dan jam kerja. IIK merupakan indikator yang mengidentifikasi secara umum tentang kondisi perusahaan dan bisnis pada saat triwulan berjalan dibandingkan periode triwulan sebelumnya.

Manfaat

Memberikan informasi keadaan bisnis dan perekonomian dari sisi pengusaha pada periode berjalan.

Metode Penghitungan

Penghitungan Indeks Tiap Variabel

Nilai tiap jawaban masing-masing variabel:

2="meningkat", 1="tetap", 0="menurun".

Setiap skor untuk masing-masing variabel dijumlahkan untuk mendapatkan Total Skor (TS). Kemudian, penghitungan indeksnya:

$$Iv_i = \frac{TS}{n} \times 100$$

Keterangan :

Iv_i : Indeks variabel terpilih ke -i

TS : Total Skor variabel ke - i dari seluruh responden

n : jumlah responden

Penghitungan Bobot Indeks Variabel

Setiap indeks variabel pembentuk, dicari penimbangannya dengan rumus :

$$\text{LogIIK} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Log}(Y) + \alpha_2 \text{Log}(KP) + \alpha_3 \text{Log}(TK)$$

Keterangan:

IIK : Indeks Indikator Kini

Y : Pendapatan Usaha

KP : Kapasitas Produksi

TK : Jam kerja

$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$: Estimasi parameter fungsi *double log* (penimbang)

Penghitungan IIK

$$IIK = \frac{\sum(w_i \times Iv_i)}{\sum w_i}$$

Keterangan:

IIK : Indeks Indikator Kini

w_i : Penimbang variabel ke-i

Iv_i : Indeks variabel terpilih ke-i

Interpretasi

- 100<I<200: jumlah jawaban "meningkat" lebih besar dari jawaban "menurun". Artinya, kondisi bisnis pada triwulan berjalan meningkat dibanding periode triwulan sebelumnya.
- I=100: kondisi bisnis pada triwulan berjalan sama keadaannya dibanding triwulan sebelumnya.
- I<100: kondisi bisnis pada triwulan berjalan menurun dibanding keadaan triwulan sebelumnya.

Sumber Data

Survei Tendensi Bisnis dan Bank Indonesia.

Level Penyajian

Nasional dan provinsi.

Publikasi

Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen.

Penyedia Informasi

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik.

Keterbatasan

- Hanya bisa meramalkan untuk periode waktu yang singkat (3 bulan berjalan).
- Tidak bisa menyajikan dalam skala regional (terbatas pada skala nasional).
- Hanya bisa dibandingkan dengan 1 periode sebelumnya (karena merupakan indeks berantai).

Implementasi

(Lihat ITB)

Indeks Indikator Mendatang (IIM)

Future Indicator Index (FII)

Konsep dan Definisi

IIM adalah indeks komposit yang terdiri dari 4 indeks variabel pembentuk, yaitu order dari dalam negeri, order dari luar negeri, harga jual sekarang, dan order barang input. IIM merupakan indikator yang dapat mengidentifikasi prospek perusahaan dan bisnis pada periode tiga bulan mendatang.

Manfaat

- Memberikan informasi yang dini mengenai perkembangan bisnis dari sisi pengusaha.
- Memberikan perkiraan kondisi bisnis tiga bulan mendatang.

Metode Penghitungan

Penghitungan Indeks Tiap Variabel

Nilai tiap jawaban masing-masing variabel:

2="meningkat", 1="tetap", 0="menurun".

Setiap skor untuk masing-masing variabel dijumlahkan untuk mendapatkan Total Skor (TS). Kemudian, penghitungan indeksnya:

$$Iv_i = \frac{TS}{n} \times 100$$

Keterangan:

Iv_i : Indeks variabel terpilih ke -i

TS : Total Skor variabel ke-i dari seluruh responden

n : jumlah responden

Penghitungan Bobot Variabel

Setiap variabel pembentuk, dicari penimbangnya dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{LogIIM} = & \alpha_0 + \alpha_1 \text{Log}(\text{ODN}) \\ & + \alpha_2 \text{Log}(\text{OLN}) + \alpha_3 \text{Log}(\text{HJ}) \\ & + \alpha_4 \text{Log}(\text{OBI}) \end{aligned}$$

Keterangan:

IIM : Indeks Indikator Mendatang

ODN : Order Dalam Negeri

OLN : Order Luar Negeri

HJ : Harga Jual

OBI : Order Barang Input

$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$: Estimasi parameter fungsi *double log* (penimbang)

Penghitungan IIM

$$IIM = \frac{\sum (w_i \times Iv_i)}{\sum w_i}$$

Keterangan:

IIM : Indeks Indikator Mendatang

w_i : Penimbang variabel ke-i

Iv_i : Indeks variabel terpilih ke-i

Interpretasi

- $100 < I < 200$: jumlah jawaban "meningkat" lebih besar dari jawaban "menurun". Artinya, kondisi bisnis pada triwulan mendatang diperkirakan meningkat dibanding periode triwulan berjalan.
- $I = 100$: kondisi bisnis pada triwulan mendatang diperkirakan sama keadaannya dibanding triwulan berjalan.
- $I < 100$: kondisi bisnis pada triwulan mendatang diperkirakan menurun

dibanding keadaan triwulan berjalan.

Sumber Data

Survei Tendensi Bisnis dan Bank Indonesia.

Level Penyajian

Nasional dan provinsi.

Publikasi

Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen.

Penyedia Informasi

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik.

Keterbatasan

- Hanya bisa meramalkan untuk periode waktu yang singkat (3 bulan ke depan).
- Hanya bisa dibandingkan dengan 1 periode sebelumnya (karena merupakan indeks berantai).

Implementasi

(Lihat ITB)

Indeks Tendensi Konsumen

<http://www.mps.go.id>

Indeks Tendensi Konsumen (ITK)

Consumer Tendency Index

Konsep dan Definisi

Indeks Tendensi Konsumen adalah indeks yang dapat memberikan gambaran mengenai situasi bisnis dan perekonomian secara umum menurut pendapat konsumen yang didasarkan pada persepsi konsumen mengenai kondisi bisnis dan perekonomian. Indeks ini terdiri dari dua jenis indeks yaitu Indeks Indikator Kini (*Current Indicator Index*) dan Indeks Indikator Mendatang (*Future Indicator Index*).

Manfaat

Memberikan informasi dini mengenai keadaan dan perkembangan perekonomian.

Metode Penghitungan

Penghitungan ITK triwulan berjalan menggunakan Indeks Indikator Kini (*Current Indicator Index*) sedangkan penghitungan ITK triwulan berjalan menggunakan Indeks Indikator Mendatang (*Future Indicator Index*).

Interpretasi

- $100 < I < 200$: jumlah jawaban "meningkat" lebih besar dari jawaban "menurun" artinya kondisi perekonomian pada triwulan berjalan meningkat dibanding periode triwulan sebelumnya untuk Indeks Indikator Kini dan para konsumen optimis bahwa kondisi perekonomian pada triwulan mendatang sangat meningkat jika

dibandingkan dengan triwulan berjalan untuk indikator mendatang.

- $I = 100$: jumlah jawaban "meningkat" dan "menurun" adalah seimbang, artinya kondisi perekonomian pada triwulan berjalan hampir sama dengan triwulan sebelumnya untuk Indeks Indikator Kini dan para konsumen beranggapan bahwa kondisi perekonomian pada triwulan mendatang hampir sama dengan periode triwulan berjalan untuk indikator mendatang.
- $I < 100$: jumlah jawaban "menurun" lebih besar dari jawaban "meningkat", artinya kondisi perekonomian pada triwulan berjalan menurun dibanding keadaan triwulan sebelumnya untuk Indeks Indikator Kini dan para konsumen beranggapan bahwa kondisi perekonomian pada triwulan mendatang akan menurun dibanding keadaan triwulan berjalan untuk indikator mendatang.

Sumber Data

Survei Tendensi Konsumen dan Bank Indonesia.

Level Penyajian

Nasional dan provinsi.

Publikasi

Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen.

Penyedia Informasi

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik.

Keterbatasan

- Hanya bisa dibandingkan dengan 1 periode sebelumnya (karena merupakan indeks berantai).
- Survei dilakukan hanya di daerah Jabodetabek.

Implementasi

Indeks Tendensi Konsumen Triwulan III Diramalkan Meningkat

JAKARTA-Badan Pusat Statistik (BPS) meramalkan nilai Indeks Tendensi Konsumen (ITK) di triwulan III-2009 bakal meningkat atau berada di level 109,05 dibandingkan triwulan II tahun ini.

Pasalnya, potensi inflasi yang rendah dan memasuki musim lebaran dan puasa adanya keyakinan daya beli masyarakat meningkat.

"Kita melihat daya beli masyarakat atau indeks tendensi konsumen di triwulan III meningkat, karena adanya keyakinan inflasi rendah dan menghadapi musim puasa dan lebaran," kata Kepala BPS Rusman Heriawan kepada wartawan saat konferensi pers di Jakarta, Senin (10/8/2009).

Nilai indeks tendensi konsumen (ITK) triwulan III diprediksikan akan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perbaikan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan III-2009 diperkirakan terjadi peningkatan pendapatan, meskipun rencana pembelian barang-barang tahan lama diperkirakan menurun.

Sebelumnya, BPS merilis ITK triwulan II-2009 di Jabodetabek sebesar 106,42

persen, artinya kondisi ekonomi konsumen pada triwulan II-2009 meningkat bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 102,15.

Rusman menambahkan, kondisi ekonomi konsumen membaik karena adanya peningkatan pendapatan rumah tangga, rendahnya pengaruh inflasi terhadap konsumsi makanan sehari-hari dan meningkatnya konsumsi beberapa komoditi makanan dan bukan makanan seperti biaya perumahan.

Sedangkan untuk Indeks Tendensi Bisnis (ITB), BPS merilis di triwulan II-2009 sebesar 110,43 persen yang mengindikasikan bisnis pada triwulan tersebut secara umum meningkat dibandingkan pada triwulan I-2009 sebesar 96,91 persen.

BPS juga memprediksikan pada triwulan III-2009, ITB bakal meningkat atau berada di level 107,80. Namun peningkatan tersebut lambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Meskipun ITB triwulan III diprediksi tidak sebesar triwulan II. Namun, BPS masih menyakini adanya peningkatan nilai indeks di semua sektor ekonomi di triwulan III-2009, kecuali sektor keuangan, persewaan, dan jasa yang bakal turun. (ade)

Sumber:

<http://economy.okezone.com/read/2009/08/10/20/246716/20/indeks-tendensi-konsumen-triwulan-iii-diramalkan-meningkat>

Diakses Selasa, 16 November 2010

Indeks Indikator Kini (IIK)

Current Indicator Index (CII)

Konsep dan Definisi

IIK adalah indeks komposit yang terdiri dari 3 indeks variabel pembentuk, yaitu pendapatan seluruh anggota keluarga 3 (tiga) bulan terakhir, pengaruh kenaikan harga-harga terhadap konsumsi makanan sehari-hari, dan volume konsumsi beberapa komoditi saat ini jika dibandingkan dengan keadaan periode 3 bulan yang lalu (daging, ikan, susu, buah-buahan, pakaian, biaya perumahan, biaya pendidikan, transportasi, biaya kesehatan, rekreasi). IIK merupakan indikator yang mengidentifikasi kondisi keuangan konsumen pada saat triwulan berjalan (saat survei) dibandingkan periode triwulan sebelumnya.

Manfaat

Memberikan informasi mengenai keadaan keuangan konsumen pada saat periode survei dibanding dengan periode sebelumnya.

Metode Penghitungan

Penghitungan Indeks Tiap Variabel

Nilai tiap jawaban masing-masing variabel:

2="meningkat", 1="tetap, 0="menurun".

Setiap skor untuk masing-masing variabel dijumlahkan untuk mendapatkan Total Skor (TS). Kemudian, penghitungan indeksnya:

$$Iv_i = \frac{TS}{n} \times 100$$

Iv_i : Indeks variabel terpilih ke -i

TS : Total Skor variabel ke-i dari seluruh responden

n : jumlah responden

Penghitungan Bobot Indeks Variabel

Setiap indeks variabel pembentuk, dicari penimbangannya dengan rumus :

$$\begin{aligned} \text{Log IIK} = & \alpha_0 + \alpha_1 \text{Log(PDK)} \\ & + \alpha_2 \text{Log(KH)} \\ & + \alpha_3 \text{Log(KK)} \end{aligned}$$

IIK : Indeks Indikator Kini

PDK : Pendapatan seluruh anggota rumah tangga pada triwulan berjalan

KH : Pengaruh kenaikan harga terhadap konsumsimakanan sehari-hari

KK : Konsumsi beberapa komoditi

$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$: Estimasi parameter fungsi *double log* (penimbang)

Penghitungan IIK

$$IIK = \frac{\sum(w_i \times Iv_i)}{\sum w_i}$$

IIK : Indeks Indikator Kini

w_i : Penimbang variabel ke-i

Iv_i : Indeks variabel terpilih ke-i

Interpretasi

- 100<I<200: jumlah jawaban "meningkat" lebih besar dari jawaban "menurun" artinya perekonomian pada triwulan berjalan meningkat dibanding triwulan sebelumnya.
- I=100: jumlah jawaban "meningkat" dan "menurun" adalah seimbang, artinya perekonomian pada triwulan berjalan hampir sama dengan triwulan sebelumnya.
- I<100: jumlah jawaban "menurun" lebih besar dari jawaban

"meningkat", artinya perekonomian pada triwulan berjalan menurun dibanding triwulan sebelumnya.

Sumber Data

Survei Tendensi Konsumen (STK) dan Bank Indonesia (BI).

Level Penyajian

Nasional dan provinsi.

Publikasi

ITB dan ITK.

Penyedia Informasi

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik.

Keterbatasan

Hanya bisa meramalkan untuk periode waktu yang singkat (3 bulan ke depan).

Implementasi

(Lihat ITK)

Indeks Indikator Mendatang (IIM)

Future Indicator Index (FII)

Konsep dan Definisi

IIM adalah indeks komposit yang terdiri dari 2 indeks variabel pembentuk, yaitu pendapatan seluruh anggota keluarga pada periode 3 bulan yang akan datang, dan rencana pembelian barang-barang tahan lama untuk periode 3 bulan yang akan datang (televisi, CD/VCD player/compo, lemari es, mesin cuci, oven listrik, AC, komputer, meubel/lemari/meja kursi, tempat tidur, sepeda motor). IIM merupakan indikator yang dapat mengidentifikasi rencana rumah tangga untuk membeli barang-barang tahan lama pada periode tiga bulan mendatang.

Manfaat

Memberikan informasi mengenai rencana rumah tangga untuk membeli barang-barang tahan lama periode tiga bulan mendatang.

Metode Penghitungan

Penghitungan Indeks Tiap Variabel

Nilai tiap jawaban masing-masing variabel:

2="meningkat", 1="tetap", 0="menurun".

Setiap skor untuk masing-masing variabel dijumlahkan untuk mendapatkan Total Skor (TS). Kemudian, penghitungan indeksnya:

$$Iv_i = \frac{TS}{n} \times 100$$

Iv_i : Indeks variabel terpilih ke -i

TS : Total Skor variabel ke-i seluruh responden

n : jumlah responden

Penghitungan Bobot Variabel

Setiap variabel pembentuk, dicari penimbangannya dengan rumus :

$$\begin{aligned} LogIIM &= \alpha_0 + \alpha_1 Log(PDM) \\ &+ \alpha_2 Log(RTH) \end{aligned}$$

IIM : Indeks Indikator Mendatang

PDM : Pendapatan seluruh anggota rumah tangga padatriwulan mendatang.

RTH : Rencana pembelian barang-barang tahan lama

$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$: Estimasi parameter fungsi *double log* (penimbang)

Penghitungan IIM

$$IIM = \frac{\sum(w_i \times Iv_i)}{\sum w_i}$$

IIM : Indeks Indikator Mendatang

w_i : Penimbang variabel ke-i

Iv_i : Indeks variabel terpilih ke-i

Interpretasi

- $100 < I < 200$: jumlah jawaban "meningkat" lebih besar dari jawaban "menurun", artinya konsumen optimis bahwa perekonomian triwulan mendatang sangat meningkat dibandingkan dengan triwulan berjalan.
- $I = 100$: jumlah jawaban "meningkat" dan "menurun" adalah seimbang, artinya para konsumen beranggapan perekonomian triwulan mendatang

hampir sama dengan triwulan berjalan.

- $I < 100$: jumlah jawaban "menurun" lebih besar dari jawaban "meningkat", artinya konsumen beranggapan perekonomian pada triwulan mendatang akan menurun dibanding triwulan berjalan.

Sumber Data

STK dan BI.

Level Penyajian

Nasional dan provinsi.

Publikasi

ITB dan ITK.

Penyedia Informasi

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik.

Keterbatasan

Hanya bisa meramalkan untuk periode waktu yang singkat (3 bulan ke depan).

Implementasi

(Lihat ITK)

Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP)

Konsep dan definisi

Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (I_t) dengan indeks harga yang dibayar petani (I_b) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian.

Manfaat

Untuk mengukur kemampuan tukar (*term of trade*) produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga, dapat digunakan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkat pendapatan petani dari waktu ke waktu yang dapat dipakai sebagai dasar kebijakan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan petani. Selain itu menunjukkan tingkat daya saing (*competiveness*) produk pertanian dibandingkan dengan produk lain.

Rumus

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100\%$$

I_t : Indeks harga yang diterima petani

I_b : Indeks harga yang dibayar petani

NTP : Nilai Tukar Petani

Interpretasi

- NTP>100, berarti petani mengalami surplus. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya;

dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.

- NTP=100, berarti petani mengalami impas/*break even*. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.
- NTP<100, berarti petani mengalami defisit. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

Sumber Data

Survei Harga Perdesaan.

Level Penyajian.

Nasional dan provinsi.

Publikasi

Statistik Nilai Tukar Petani, Indikator Pertanian, Statistik Tanaman Pangan.

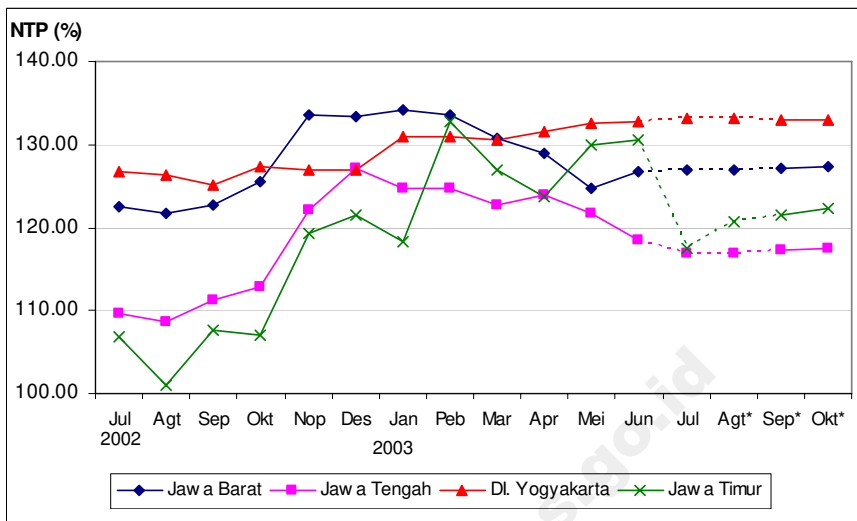
Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Harga.

Keterbatasan

NTP hanya bisa merujuk rumah tangga petani tanaman bahan makanan dan perkebunan rakyat saja sehingga tidak bisa dijadikan penciri kondisi rumah tangga tani secara umum. Selain itu, NTP hanya bisa mengakomodir pendapatan rumah tangga tani dari usaha bahan makanan dan perkebunan padahal dalam realitanya, RT petani juga mendapat pendapatan dari usaha peternakan atau perikanan atau non pertanian.

Implementasi



NTP provinsi Jawa Barat diperkirakan akan turun pada bulan Agustus menjadi 126,84 persen, tetapi naik pada dua bulan berikutnya menjadi 127,07 persen dan 127,29 persen.

NTP provinsi Jawa Tengah diperkirakan menurun pada bulan Agustus 2003 menjadi 116,84 persen, sedangkan bulan September dan Oktober 2003 naik masing-masing menjadi 117,20 persen dan 117,55 persen.

NTP provinsi DI. Yogyakarta diperkirakan sedikit mengalami penurunan pada periode bulan Juli sampai dengan September 2003 masing-masing menjadi 133,15 persen, 133,05 persen, dan 132,95 persen.

NTP provinsi Jawa Timur diperkirakan akan naik menjadi 120,75 persen (Agustus 2003), 121,55 persen

(September 2003) dan 122,33 persen (Oktober 2003).

(Sumber: Deptan, 2003, Buletin Nilai Tukar Petani)

Indeks Harga yang Diterima Petani (It)

Konsep dan Definisi

Nilai produksi yang dijual petani dari tiap jenis barang hasil pertanian tanaman bahan makanan dan perkebunan rakyat.

It terdiri dari:

- Indeks Subsektor Tanaman Pangan:
 - Indeks Kelompok Tanaman Padi
 - Indeks Kelompok Tanaman Palawija
- Indeks Subsektor Tanaman Hortikultura:
 - Indeks Kelompok Tanaman Sayur-sayuran
 - Indeks Kelompok Tanaman Buah-buahan
- Indeks Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR):
 - Indeks Kelompok Tanaman Perkebunan Rakyat
- Indeks Subsektor Peternakan:
 - Indeks Kelompok Ternak Besar
 - Indeks Kelompok Ternak Kecil
 - Indeks Kelompok Unggas
 - Indeks Kelompok Hasil Ternak
- Indeks Subsektor Perikanan:
 - Indeks Kelompok Penangkapan
 - Indeks Kelompok Budidaya

Manfaat

Dari indeks harga yang diterima petani (It) dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang

dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.

Rumus

$$I_t = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{P_{ti}}{P_{(t-1)i}} P_{(t-1)i} Q_{0i}}{\sum_{i=1}^m P_{0i} Q_{0i}} \times 100$$

Dimana:

I_t : Indeks harga bulan ke t baik I_t maupun I_b

P_{ti} : Harga bulan ke t untuk jenis barang ke i

$P_{(t-1)i}$: Harga bulan ke (t-1) untuk jenis barang ke i

$\frac{P_{ti}}{P_{(t-1)i}}$: Relatif harga bulan ke t dibanding ke (t-1) untuk jenis barang ke i

P_{0i} : Harga pada tahun dasar untuk jenis barang ke-i

Q_{0i} : Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke-i

m : Banyak jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas

Interpretasi

Semakin tinggi nilai I_t maka semakin tinggi nilai produksi yang dihasilkan petani, sedangkan bila semakin turun maka pendapatan yang diterima petani makin rendah. Misalnya IT provinsi Jawa Timur turun dari 581,86 persen (September 2002) menjadi 572,78 persen (Oktober 2002) karena adanya penurunan harga sayuran dan buah - buahan.

Sumber Data

Survei Harga Perdesaan.

Level Penyajian

Nasional dan provinsi.

Publikasi

Statistik Nilai Tukar Petani, Indikator Pertanian, Statistik Tanaman Pangan.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Harga

Keterbatasan

It hanya merujuk rumah tangga petani tanaman bahan makanan dan perkebunan rakyat saja sehingga tidak bisa dijadikan penciri pendapatan rumah tangga tani secara umum. Selain itu, It hanya bisa mengakomodir pendapatan rumah tangga tani dari usaha bahan makanan dan perkebunan padahal dalam realitanya, RT petani juga mendapat pendapatan dari usaha peternakan atau perikanan atau non pertanian.

Implementasi

No.	Provinsi	Juli 2003 (1993=100)			Agustus 2003 (1993=100)		
		IT	IB	NTP	IT	IB	NTP
1	Jawa Barat	577.77	455.00	126.98	595.96	456.03	130.68
2	Jawa Tengah	576.77	493.57	116.86	608.07	503.28	120.82
3	DI. Yogyakarta	579.16	434.8	133.20	590.83	440.56	134.11
4	Jawa Timur	672.94	572.44	117.56	661.26	594.88	111.16
5	N. Aceh Darussalam	505.26	439.16	115.05	509.56	445.30	114.43
6	Sumatera Utara	568.02	577.86	98.30	-	-	-
7	Sumatera Barat	443.76	488.23	90.89	443.33	490.79	90.33
8	Sumatera Selatan	267.06	373.04	71.59	266.16	373.80	71.20
9	Lampung	280.09	387.92	72.20	282.59	394.14	71.70
10	Bali	663.59	460.43	144.12	652.80	463.28	140.91
11	Nusa Tenggara Barat	472.82	569.28	83.06	476.52	572.91	83.18
12	Kalimantan Selatan	406.68	394.66	103.05	410.63	389.64	105.39
13	Sulawesi Utara	446.82	525.54	85.02	445.64	527.49	84.48
14	Sulawesi Selatan	560.60	477.21	117.47	565.08	478.98	117.98
	Nasional	554.29	487.41	113.72	565.16	490.35	115.26

Sumber : Badan Pusat Statistik

Indeks harga yang diterima petani (IT) digunakan untuk mengetahui fluktuasi harga komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Secara nasional IT bulan Agustus 2003 naik dibandingkan bulan sebelumnya yaitu dari 554,29 persen (Juli 2003) menjadi 565,16

persen. Peningkatan tersebut merupakan akibat dari adanya peningkatan harga komoditas tanaman bahan makanan yang cukup besar meskipun harga komoditas tanaman perkebunan rakyat justru turun.

Sumber: Deptan, 2003, Buletin Nilai Tukar Petani.

Indeks Harga yang Dibayar Petani (I_b)

Konsep dan Definisi

Nilai barang yang di konsumsi oleh rumah tangga petani untuk menghasilkan tanaman bahan makanan dan perkebunan rakyat.

I_b terdiri dari:

- Indeks Kelompok Konsumsi Rumah Tangga (KRT):
 - Indeks Subkelompok Bahan Makanan
 - Indeks Subkelompok Makanan Jadi
 - Indeks Subkelompok Perumahan
 - Indeks Subkelompok Sandang
 - Indeks Subkelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga
 - Indeks Subkelompok Transportasi dan Komunikasi
- Indeks Kelompok Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM), terdiri dari:
 - Indeks Subkelompok Bibit
 - Indeks Subkelompok Pupuk dan Obat-obatan
 - Indeks Subkelompok Transportasi
 - Indeks Subkelompok Sewa, Pajak, dan Lainnya
 - Indeks Subkelompok Penambahan Barang Modal
 - Indeks Subkelompok Upah Buruh Tani

Manfaat

Dari indeks harga yang dibayar petani (I_b), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat dipedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan I_b juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.

Rumus

$$I_t = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{P_{ti}}{P_{(t-1)i}} P_{(t-1)i} Q_{0i}}{\sum_{i=1}^m P_{0i} Q_{0i}} \times 100$$

Dimana:

I_t : Indeks harga bulan ke t baik I_t maupun I_b

P_{ti} : Harga bulan ke t untuk jenis barang ke i

P_{(t-1)i} : Harga bulan ke (t-1) untuk jenis barang ke i

$\frac{P_{ti}}{P_{(t-1)i}}$: Relatif harga bulan ke t dibanding ke (t-1) untuk jenis barang ke i

P_{0i} : Harga pada tahun dasar untuk jenis barang ke-i

Q_{0i} : Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke-i

m : Banyak jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas

Interpretasi

Semakin tinggi nilai I_b maka semakin tinggi nilai konsumsi yang digunakan petani, sedangkan bila semakin turun maka konsumsi yang dikeluarkan petani makin rendah. Misalnya I_b provinsi Jawa Timur turun dari 581,86 persen

(September 2002) menjadi 572,78 persen (Oktober 2002).

Sumber Data

Survei Harga Perdesaan.

Level Penyajian

Nasional dan provinsi.

Publikasi

Statistik Nilai Tukar Petani, Indikator Pertanian, Statistik Tanaman Pangan.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Harga

Keterbatasan

Ib hanya merujuk pada pengeluaran rumah tangga petani tanaman bahan makanan dan perkebunan rakyat saja sehingga tidak bisa dijadikan penciri pendapatan rumah tangga tani secara umum.

Implementasi

No.	Provinsi	Juli 2003 (1993=100)			Agustus 2003 (1993=100)		
		IT	IB	NTP	IT	IB	NTP
1	Jawa Barat	577.77	455.00	126.98	595.96	456.03	130.68
2	Jawa Tengah	576.77	493.57	116.86	608.07	503.28	120.82
3	DI. Yogyakarta	579.16	434.8	133.20	590.83	440.56	134.11
4	Jawa Timur	672.94	572.44	117.56	661.26	594.88	111.16
5	N. Aceh Darussalam	505.26	439.16	115.05	509.56	445.30	114.43
6	Sumatera Utara	568.02	577.86	98.30	-	-	-
7	Sumatera Barat	443.76	488.23	90.89	443.33	490.79	90.33
8	Sumatera Selatan	267.06	373.04	71.59	266.16	373.80	71.20
9	Lampung	280.09	387.92	72.20	282.59	394.14	71.70
10	Bali	663.59	460.43	144.12	652.80	463.28	140.91
11	Nusa Tenggara Barat	472.82	569.28	83.06	476.52	572.91	83.18
12	Kalimantan Selatan	406.68	394.66	103.05	410.63	389.64	105.39
13	Sulawesi Utara	446.82	525.54	85.02	445.64	527.49	84.48
14	Sulawesi Selatan	560.60	477.21	117.47	565.08	478.98	117.98
	Nasional	554.29	487.41	113.72	565.16	490.35	115.26

Sumber : Badan Pusat Statistik

Fluktuasi harga komoditas yang dikonsumsi oleh petani dan harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian dapat diketahui dari indeks harga yang dibayar petani (IB). Pada bulan Agustus 2003 IB nasional meningkat dari 487,41 persen menjadi 490,35 persen. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan

harga barang/jasa konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi dan biaya penambahan barang modal.

Sumber: Deptan, 2003, Buletin Nilai Tukar Petani

Tabel 8.1
Nilai Tukar Petani Menurut Subsektor Serta Perubahannya
Agustus - September 2010 (2007=100)

Subsektor	Bulan		Persentase Perubahan Agustus – September
	Agustus	September	
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tanaman pangan			
a. Nilai tukar petani (NTPP)	97,66	98,14	0,49
b. Indeks harga yang diterima petani (It)	126,24	127,37	0,89
- Padi	122,44	123,37	0,76
- Palawija	133,82	135,17	1,01
c. Indeks harga yang dibayar petani (Ib)	129,27	129,78	0,40
- Indeks konsumsi rumah tangga	130,60	131,13	0,41
- Indeks BPPBM	123,89	124,33	0,35
2. Hortikultura			
a. Nilai tukar petani (NTPH)	109,61	109,31	-0,27
b. Indeks harga yang diterima petani (It)	140,63	140,75	0,09
- Sayur-sayuran	146,14	144,21	-1,33
- Buah-buahan	137,48	138,89	1,03
c. Indeks harga yang dibayar petani (Ib)	128,30	128,76	0,36
- Indeks konsumsi rumah tangga	129,92	130,45	0,41
- Indeks BPPBM	121,17	121,34	0,14
3. Tanaman perkebunan rakyat			
a. Nilai tukar petani (NTPR)	102,90	103,13	0,23
b. Indeks harga yang diterima petani (It)	130,92	131,64	0,55
- Tanaman perkebunan rakyat	130,92	131,64	0,55
c. Indeks harga yang dibayar petani (Ib)	127,24	127,64	0,32
- Indeks konsumsi rumah tangga	129,59	130,08	0,38
- Indeks BPPBM	119,48	119,60	0,10
4. Peternakan			
a. Nilai tukar petani (NTPT)	103,78	104,42	0,62
b. Indeks harga yang diterima petani (It)	130,50	131,80	1,00
- Ternak besar	124,13	125,07	0,76
- Ternak kecil	137,99	139,96	1,43
- Unggas	135,22	136,65	1,05
- Hasil ternak	136,88	138,28	1,02
c. Indeks harga yang dibayar petani (Ib)	125,74	126,22	0,38
- Indeks konsumsi rumah tangga	129,13	129,67	0,42
- Indeks BPPBM	119,25	119,62	0,31
5. Perikanan			
a. Nilai tukar petani (NTN)	105,43	106,26	0,79
b. Indeks harga yang diterima petani (It)	131,24	132,76	1,16
- Penangkapan	132,95	134,19	0,94
- Budidaya	120,76	122,54	1,48
c. Indeks harga yang dibayar petani (Ib)	124,47	124,94	0,37
- Indeks konsumsi rumah tangga	130,11	130,67	0,43
- Indeks BPPBM	115,18	115,47	0,25
Gabungan/nasional			
a. Nilai tukar petani (NTP)	101,82	102,19	0,36
b. Indeks harga yang diterima petani (It)	130,25	131,21	0,74
c. Indeks harga yang dibayar petani (Ib)	127,93	128,41	0,37
- Indeks konsumsi rumah tangga	130,12	130,65	0,41
- Indeks BPPBM	121,42	121,74	0,27

Rata-Rata Harga Gabah

Konsep dan Definisi

Harga di tingkat petani adalah harga yang disepakati pada waktu terjadinya transaksi/penjualan antara petani dengan pedagang pengumpul/tengkulak/pihak penggilingan yang ditentukan pada hari dilaksanakannya observasi dengan kualitas apa adanya sebelum adanya ongkos angkut pasca panen.

Biaya ke penggilingan adalah semua biaya pasca panen siap jual dari tempat transaksi tingkat petani ke lokasi unit penggilingan terdekat

Harga di tingkat penggilingan adalah harga di tingkat petani ditambah besarnya biaya ke penggilingan terdekat

Harga Pembelian Pemerintah adalah harga minimal gabah yang harus dibayarkan pihak penggilingan kepada petani sesuai mutu masing-masing kelompok kualitas gabah yang telah ditetapkan Pemerintah.

Manfaat

Memberikan informasi sekaligus sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam rangka pengamanan harga dasar gabah yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Inpres yang dikenal dengan Harga Pembelian Pemerintah.

Rumus

Rata-rata Harga Gabah Kering Giling (GKG):

$$= \frac{\sum \text{Harga GKG bulan ke } - n}{\text{Jumlah observasi bulan ke } - n}$$

Rata-rata Harga Gabah Kering Panen (GKP):

$$= \frac{\sum \text{Harga GKP bulan ke } - n}{\text{Jumlah observasi bulan ke } - n}$$

Rata-rata Harga Gabah Kualitas Rendah (GKR):

$$= \frac{\sum \text{Harga GKR bulan ke } - n}{\text{Jumlah observasi bulan ke } - n}$$

Interpretasi

Rata-rata harga gabah menggambarkan harga jual gabah yang diterima petani secara nasional ketika saat panen atau di penggilingan. Dengan adanya rata-rata harga gabah ini, pemerintah dapat mengontrol dan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah.

Sumber Data

Survei Harga Produsen Gabah. Pemantauan harga produsen gabah ini dilaksanakan di 25 provinsi di Indonesia, tidak termasuk Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara.

Level Penyajian

Nasional dan provinsi terpilih.

Publikasi

Statistik Harga Produsen Gabah.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Harga.

Keterbatasan

Belum mencakup seluruh provinsi.

Implementasi

Panen Raya, Harga Gabah Turun 1,75%

JAKARTA - Masih berlanjutnya panen raya menyebabkan harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani turun 1,75

persen. Rata-rata harga gabah kualitas GKP pada April 2010 turun menjadi Rp2.807,40 per kilogram dibandingkan bulan lalu.

Berdasarkan komposisi jumlah observasi dari 886 transaksi gabah di 20 provinsi selama April 2010, didominasi GKP sebesar 68,62 persen, diikuti oleh gabah kualitas rendah sebesar 26,75 persen dan Gabah Kering Giling (GKG) sebesar 4,63 persen.

"April ini memang masih terjadi panen raya meskipun tidak sebesar bulan Maret. Jadi wajar kalau harga Gabah Kering menurun," ujar Kepala BPS Rusman Heriawan saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (3/5/2010).

Harga gabah tertinggi di tingkat petani berasal dari gabah kualitas GKP varietas Siam Unus senilai Rp5.200 per kilogram di Kabupaten Barito Kuala (Kalimantan Selatan). Sedangkan harga terendah berasal dari gabah kualitas rendah varietas Ciherang senilai Rp2.000 per kilogram di Kabupaten Blora, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Bojonegoro.

Sementara itu, di tingkat penggilingan harga gabah tertinggi berasal dari gabah kualitas GKP varietas Siam Unus senilai Rp5.300 per kilogram yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala, dan harga terendah senilai Rp2.050 per kilogram juga berasal dari gabah kualitas rendah varietas Ciherang yang terjadi di Kabupaten Blora.

Sementara rata-rata harga gabah kualitas Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani turun 0,94 persen menjadi Rp3.311,59 persen, sedangkan ditingkat

penggilingan masing-masing turun 1,87 persen menjadi Rp3.355,85 per kilogram dan 1,89 persen menjadi Rp2.866,98 per kilogram. Sementara itu, gabah kualitas rendah ditingkat petani juga mengalami penurunan 3,36 persen menjadi Rp2.407,11 per kilogram.

Dari keseluruhan observasi selama april, terdapat 151 observasi (23,27 persen) kasus harga di bawah HPP ditemukan di tingkat penggilingan, masing-masing sebanyak 17 observasi (41,46 persen) pada gabah kualitas GKG dan 134 ibservasi (22,04 persen) pada gabah kualitas GKP.

Sedangkan di tingkat petani, terdapat 134 observasi (22,04) kasus harga yang terjadi di 14 provinsi yaitu NAD, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.

Sumber:

<http://economy.okezone.com/read/2010/05/03/320/328801/320/panen-raya-harga-gabah-turun-1-75>

<http://www.bps.go.id>

Pariwisata

Rata-Rata Lama Menginap Tamu (Asing dan Dalam Negeri)

Konsep dan Definisi

Banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi dengan banyaknya tamu yang datang menginap.

Manfaat

Untuk mengetahui berapa lama seorang tamu menginap di suatu akomodasi pada suatu waktu tertentu.

Rumus

Rata-rata lama menginap tamu

$$= \frac{\text{banyaknya malam tempat tidur yang dipakai}}{\text{banyaknya tamu}}$$

Rata-rata lama menginap tamu asing

$$= \frac{\text{banyaknya malam tempat tidur yang dipakai tamu asing}}{\text{banyaknya tamu asing}}$$

Rata-rata lama menginap tamu Indonesia

$$= \frac{\text{banyaknya malam tempat tidur yang dipakai tamu INA}}{\text{banyaknya tamu Indonesia}}$$

Interpretasi

Misal: Rata-rata lama menginap tamu asing di Sulawesi Selatan pada September 2010 adalah 2,59 hari.

Maksudnya: Setiap tamu asing di Indonesia secara rata-rata menginap di suatu akomodasi di Indonesia dalam waktu sekitar 3 hari.

Sumber Data

Survei VHTS.

Level Penyajian

Nasional dan provinsi.

Publikasi

Statistik Tingkat Penghunian Kamar Hotel, Statistik Indonesia.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi, Informasi dan Pariwisata.

Keterbatasan

-

Implementasi

Tamu Asing Betah Nginap di Makassar

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel berbintang di Sulawesi Selatan pada September 2010 mencapai 2,59 hari atau mengalami kenaikan 0,44 hari, jika di bandingkan lama menginap pada Agustus 2010 kemarin.

Menurut Kepala BPS, Bambang Suprijanto, secara keseluruhan, rata-rata menginap tamu asing pada September 2010 lebih lama di banding tamu Indonesia yang hanya mencapai 1,93 hari.

Tak ada penjelasan mengapa hal ini terjadi. Saat ini hotel di Makassar juga selalu penuh oleh tamu lokal.

Sumber:

<http://202.146.4.121/read/artikel/135311/Tamu-Asing-Betah-Nginap-di-Makassar>

Diakses Kamis, 18 November 2010, pukul 08.52

Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara

Konsep dan Definisi

Lamanya wisatawan mancanegara mengunjungi Indonesia dalam satu kali kunjungan.

Manfaat

Untuk mengetahui rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara di Indonesia dalam satu kali kunjungan.

Metode Penghitungan

Rata-rata lama tinggal wisman menurut negara tempat tinggal diperoleh dari *Passenger Exit Survey* (PES) yang dilakukan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Survei dilakukan terhadap wisman yang akan meninggalkan Indonesia.

Interpretasi

Misal: Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara pada Mei 2010 adalah 2,66 hari.

Maksudnya: Setiap wisatawan mancanegara di Indonesia secara rata-rata tinggal di Indonesia dalam waktu sekitar 3 hari.

Sumber Data

PES Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Level Penyajian

Nasional

Publikasi

Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara (BPS), Pendataan Profil Wisman (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata).

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi, Informasi dan Pariwisata.

Keterbatasan

-

Implementasi

Lama Tinggal Wisman Turun 11%
Kontribusi Turis Asal Eropa Stagnan

JAKARTA Pergeseran segmen pasar turis asing pascakrisis ekonomi global mengakibatkan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (wisman) di Indonesia turun 11,62%, dari 3,01 hari per Mei 2009 menjadi 2,66 hari pada bulan sama 2010. "Pada tahun ini kunjungan wisman lebih didominasi turis asing dengan masa liburan jangka pendek asal Asia. Kunjungan wisman dari Malaysia bahkan tumbuh pesat dan menggeser posisi Singapura di nomor satu," ujar Adi Lumaksono, Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi-Komunikasi, dan Pariwisata Badan Pusat Statistik, kemarin.

Dia menjelaskan rata-rata lama tinggal wisman Asia sekitar 3 hari-4 hari, sedangkan rata-rata lama tinggal wisman asal Eropa mencapai 7 hari-10 hari perkunjungan. Dengan demikian, sambungnya, meskipun keseluruhan kunjungan wisman tumbuh, tetapi jika pertumbuhan terjadi pada wisman yang masa liburannya pendek, akan berpengaruh juga pada rata-rata lama tinggal wisman.

Kepala Badan Pusat Statistik Rusman Heriawan menyebutkan kunjungan wisman pada Mei 2010 mencapai 600.031 kunjungan, naik 15,01%

dibandingkan dengan kunjungan pada periode yang sama pada tahun lalu (521.700). Angka itu juga naik 7,94% dibandingkan dengan realisasi kunjungan pada April 2010.

Dia menjelaskan pertumbuhan kunjungan wisman itu turut mendorong kenaikan tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang pada 17 provinsi per Mei 2010 menjadi rata-rata 51,22%, atau naik 3,39 poin dibandingkan TPK Mei 2009 sebesar 47,83 %. Rusman menambahkan total kunjungan wisman ke Indonesia pada Januari-Mei 2010 mencapai 2,77 juta kunjungan atau naik 14,59 % dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 2,41 juta kunjungan.

Sumber:

<http://bataviase.co.id/node/278103>

Diakses Kamis, 18 November 2010, pukul 15.03

Rata-Rata Pengeluaran per Wisman per Hari per Kunjungan

Konsep dan Definisi

Banyaknya uang yang dibelanjakan oleh seorang wisatawan mancanegara selama berada di Indonesia dalam satu hari dan dalam satu kali kunjungan.

Manfaat

Untuk mengetahui rata-rata penerimaan negara yang diperoleh dari seorang wisatawan mancanegara dalam satu hari dan dalam satu kali kunjungan.

Metode Penghitungan

Rata-rata Pengeluaran Wisman per Hari dan per Kunjungan dapat diperoleh dari *Passenger Exit Survey* (PES) yang dilakukan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Survei dilakukan terhadap wisman yang akan meninggalkan Indonesia.

Interpretasi

Apabila rata-rata pengeluaran wisman per hari dan per kunjungan memiliki nilai yang cukup besar, hal ini berarti rata-rata penerimaan negara yang diperoleh dari seorang wisatawan mancanegara dalam satu hari dan dalam satu kunjungan juga cukup besar sehingga wisata di suatu negara bisa dibilang memiliki kontribusi yang cukup besar dalam memberikan pendapatan bagi negara.

Sumber Data

PES, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Level Penyajian Nasional

Publikasi

Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi, Informasi dan Pariwisata.

Keterbatasan

-

Implementasi

Indonesia Jelaskan Bencana Mentawai dan Merapi di WTM

London (ANTARA News) - Dirjen Pemasaran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Dr Sapta Nirwandar, menjelaskan tsunami di Mentawai dan letusan gunung Merapi pada pelaku sektor pariwisata dunia di London.

Dikatakan kedua peristiwa tersebut tidak banyak berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Bahkan ada sedikit peningkatan, khususnya dari kalangan geologi yang menaruh perhatian pada kedua peristiwa tersebut serta fotografer yang ingin mengabadikan peristiwa meletusnya Gunung Merapi.

Tahun 2009, wisman Inggris yang berkunjung ke Indonesia sejumlah 160.036 wisman. Target tahun 2010, wisman asal Inggris sebesar 210.000 wisman. Wisman asal Inggris yang telah berkunjung ke Indonesia periode Januari-Juli 2010 berjumlah 107.487 wisman, ujar Jordi Paliama.

Berdasarkan hasil penelitian PES (*Passenger Exit Survey*) tahun 2009, rata-rata lama tinggal wisatawan asal Inggris

di Indonesia tercatat selama 11,85 hari, sementara rata-rata pengeluaran sebesar 118.66 dolar AS per orang per hari atau 1.405.95 dolar AS per orang per kunjungan. Destinasi yang paling banyak dikunjungi wisatawan asal Inggris adalah Bali dan DKI Jakarta.

Sumber:

<http://www.antaranews.com/berita/1289323408/indonesia-jelaskan-bencana-mentawai-dan-merapi-di-wtm>

Diakses Kamis, 18 November 2010, pukul 10.05

<http://www.bps.go.id>

Tingkat Penghunian Kamar (TPK)

Konsep dan Definisi

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel adalah perbandingan antara banyaknya malam kamar yang terpakai dengan banyaknya malam kamar yang tersedia (dalam persen).

Manfaat

- Untuk memberikan gambaran berapa persen kamar yang tersedia pada akomodasi terisi oleh tamu yang menginap dalam suatu waktu tertentu.
- Angka ini menunjukkan apakah suatu akomodasi diminati oleh pengunjung atau tidak, sehingga dapat dilihat apakah di suatu daerah masih kurang keberadaan akomodasi atau tidak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (wisatawan).

Rumus

$$\text{TPK} = \frac{\text{Malam Kamar Terpakai}}{\text{Malam Kamar Tersedia}} \times 100\%$$

Interpretasi

- Apabila TPK memiliki nilai cukup besar berarti akomodasi hotel di suatu daerah diminati oleh pengunjung.
- Apabila TPK memiliki nilai yang kecil berarti akomodasi di suatu daerah kurang diminati oleh pengunjung.

Sumber Data

Survei VHT-S

Level Penyajian

Nasional dan provinsi.

Publikasi

Statistik Tingkat Penghunian Kamar Hotel, Statistik Indonesia.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi, Informasi dan Pariwisata.

Keterbatasan

Tidak membedakan Tingkat Penghunian Kamar untuk wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.

Implementasi

BANDUNG, TRIBUN - Musim libur sekolah pada Juli 2010, diperkirakan menjadi faktor yang memberi kontribusi besar terhadap meningkatnya hunian hotel di Jawa Barat.

Sepanjang Juli 2010 rata-rata tingkat penghunian kamar (TPK) hotel mencapai 51,59 persen. TPK hotel bintang mencapai 53,66 persen dan hotel non bintang 40,17 persen. Kondisi ini jauh berbeda pada Agustus 2010 terutama ketika memasuki Bulan Suci Ramadan 1431 H.

Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jabar mencatat, rata-rata TPK Hotel di Jabar sepanjang Agustus 2010 mengalami penurunan 13,73 poin dibanding bulan sebelumnya. Kepala BPS Jabar Lukman Ismail, dalam konferensi pers di Kantor BPS provinsi Jabar, Jumat (1/10) pagi mengatakan, penurunan TPK hotel berbintang pada Agustus 2010 disebabkan menurunnya besaran TPK di semua kelas hotel berbintang.

"Penurunan terbesar terjadi pada kelas hotel bintang satu dari 43,93 persen

menjadi 20,84 persen atau turun 23,09 persen," ujar Lukman.

Sumber:

<http://www.tribunjabar.co.id/read/artikel/30875/tingkat-penghunian-kamar-hotel-turun>

Diakses Selasa, 9 November 2010 pukul 15.02 WIB

<http://www.bps.go.id>

Penerimaan dari Wisatawan Mancanegara

Konsep dan Definisi

Besarnya pengeluaran wisman akan konsumsi barang dan jasa selama berada di Indonesia.

Manfaat

Untuk mengetahui besarnya devisa yang diterima oleh negara dari kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia

Rumus

Penerimaan dari wisatawan mancanegara = rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan \times jumlah kunjungan wisman

Interpretasi

Apabila penerimaan dari wisatawan mancanegara cukup besar, hal ini berarti pariwisata di Indonesia dapat dikatakan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam memberikan pendapatan bagi negara.

Sumber Data

VIOT (BPS) dan PES (*Passenger Exit Survey*) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Level Penyajian

Nasional

Publikasi

Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi, Informasi dan Pariwisata.

Keterbatasan

-

Implementasi

Mendongkrak Penerimaan Devisa Pariwisata

INDUSTRI pariwisata nasional mendapatkan pukulan yang cukup berat sepanjang 2009. Lesunya perekonomian global sedikit banyak memberikan sumbangan terhadap penurunan kinerja pariwisata Indonesia.

Data Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menyebutkan pada 2009 penerimaan devisa dari sektor pariwisata menurun sebesar 123% jika dibandingkan dengan devisa pada 2008, yakni dari US\$7,3 miliar (sekitar Rp69 triliun) menjadi US\$6,4 miliar (Rp60,8 triliun). Menurut Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar), Jero Wacik, para wisatawan mancanegara (wisman) cenderung membatasi pengeluaran dan lama kunjungan. Hal itu akibat menurunnya daya beli wisman sebagai imbas krisis ekonomi yang turut melanda negara-negara asal wisman.

Pengeluaran rata-rata per kunjungan pada 2009 hanya mencapai US\$995,93 dengan lama tinggal 7,69 hari. Padahal, pada tahun sebelumnya sekali berkunjung setiap wisman rata-rata menghabiskan US\$1,178,54 dengan lama tinggal 8,58 hari. Menbudpar optimistis keadaan akan membaik pada 2010 seiring pulihnya perekonomian global.

Sumber:

<http://www.puspar.ugm.ac.id/berita-dan-event/9-berita/93-mendongkrak-penerimaan-devisa-pariwisata>

Diakses Kamis, 18 November 2010, pukul 11.26

PDB/PDRB

Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Gross Domestic Product/Gross Domestic Regional Product

Konsep dan Definisi

Nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

PDB terbagi menjadi dua jenis yaitu PDB atas dasar harga berlaku (nominal) dan atas dasar harga konstan (riil). PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sedangkan PDB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu negara. Untuk PDRB, secara keseluruhan sama dengan PDB, yang membedakan hanya PDB dalam lingkup nasional dan PDRB dalam lingkup yang lebih kecil (wilayah).

Manfaat

- Indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah;
- Bahan analisis tingkat kemakmuran masyarakat dan tingkat perubahan barang dan jasa;
- Bahan analisis produktivitas secara sektoral;
- Alat kontrol dalam menentukan kebijakan pembangunan.

Rumus

Terdapat tiga pendekatan untuk menghitung PDB/PDRB, yaitu

pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

Pendekatan produksi

Menghitung nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara dari masing-masing total nilai produksi (output) tiap-tiap sektor atau subsektor, yang terbagi dalam 9 sektor.

Rumusnya yaitu:

$$\text{Output}_{b,t} = \text{Produksi}_t \times \text{Harga}_t$$

$$\text{NTB}_{b,t} = \text{Output}_{b,t} - \text{Biaya Antara}_{b,t}$$

Atau

$$\text{NTB}_{b,t} = \text{Output}_{b,t} \times \text{Rasio NTB}_o$$

Ket:

Output_{b,t} : Output/nilai produksi bruto atas dasar harga berlaku tahun t

NTB_{b,t} : Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku tahun ke t

Produksi_t : Kuantum produksi tahun ke t

Harga_t : Harga produksi tahun ke t

Rasio NTB : Perbandingan NTB terhadap Output (NTB/Output)

Rasio NTB_o : Rasio NTB pada tahun dasar (o)

Pendekatan pengeluaran

PDB diperoleh dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi.

Rumusnya yaitu,

$$\text{PDB} = C + \text{investasi} + \text{pengeluaran pemerintah} + (\text{ekspor-impor})$$

Pendekatan pendapatan

PDB diperoleh dari hasil penjumlahan semua komponen permintaan akhir.

Rumusnya yaitu

$$\text{PDB} = \text{sewa} + \text{upah} + \text{bunga} + \text{laba}$$

Interpretasi

Misalnya, pada tahun 2005 diketahui PDB Indonesia adalah sebesar 1.750.815,2 milyar rupiah, yang artinya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia pada tahun 2006 senilai 1.750.815,2 milyar rupiah.

Sumber Data

Susenas; Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diterima BPS dari Kantor-kantor Bea Cukai; Data sayur-sayuran dan buah-buahan diperoleh dari Ditjen Bina Program Tanaman Pangan, Departemen Pertanian; data produksi tanaman perkebunan besar dari BPS, data produksi perkebunan rakyat dari Ditjen Perkebunan Departemen Pertanian; Laporan Tahunan Pertambangan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Survei Tahunan Industri Besar Sedang, Laporan Tahunan Pertambangan Migas dan Pertamina; PN Gas, dan PDAM; Laporan Keuangan PT. KAI dll

Publikasi

Statistik Indonesia, Pendapatan Nasional Indonesia, PDRB provinsi di Indonesia, Statistik Industri Besar dan Sedang, Statistik Ekspor, Statistik Impor, Indikator Ekonomi

Level Penyajian

PDB : Nasional, disajikan triwulan

PDRB : provinsi dan kabupaten/kota, disajikan tahunan.

Penyedia Informasi

Direktorat Neraca Produksi

Keterbatasan

- PDB tidak selalu mencerminkan ukuran kesejahteraan sosial suatu negara.
- PDB hanya mengukur berapa banyak output yang diproduksi di suatu negara dan bagaimana struktur serta perkembangannya antarwaktu.
- PDB tidak mencerminkan pemerataan pendapatan. Nilai PDB suatu negara tidak dapat menunjukkan apakah pendapatan nasional tersebut terbagi secara merata diantara penduduknya atau tidak.

Catatan

Di dalam perhitungan PDB/PDRB atas dasar harga konstan, BPS saat ini menggunakan tahun dasar 2000 (sebelumnya menggunakan tahun dasar 1993).

Implementasi

Pekan lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan PDB Indonesia untuk kuartal I/2007. Pertumbuhan ekonomi secara riil mencapai 6%, mendekati proyeksi pemerintah pada APBN 2007, sedikit lebih tinggi dari prediksi Bank Indonesia.

Sebagaimana biasanya, angka semacam ini menimbulkan pro-kontra. Sebagian kalangan menyatakan angka PDB itu tidak memiliki dasar pertumbuhan yang kuat, sementara ada pihak yang

menyatakan skeptis dengan angka yang dianggap terlalu tinggi itu.

Angka PDB tersebut juga menarik dilihat dari sisi yang lain. Majalah *Economist* dalam laporan khususnya akhir 2006 memprediksi perekonomian Indonesia akan menghasilkan PDB sebesar US\$396 miliar sepanjang 2007.

Dengan angka ini, majalah itu menempatkan Indonesia di urutan perekonomian nomor 21 dunia, persis di bawah Taiwan yang diprediksi menghasilkan PDB sebesar US\$398 miliar. Dengan PDB berdasarkan harga yang berlaku pada kuartal I/2007 sebesar Rp915 triliun, maka angka tersebut dalam nilai tukar pasar diterjemahkan menjadi lebih dari US\$100 miliar, yaitu jika melihat pergerakan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah sepanjang kuartal pertama.

Ini berarti pencapaian PDB di atas US\$400 miliar pada 2007 bukan lagi sesuatu yang mustahil dengan catatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah tidak berbeda jauh dari kisaran Rp9.000. Kalau ini yang terjadi, maka pada 2007 inipun Indonesia bakal merangsek ke atas lagi dan akan melampaui Taiwan menjadi kekuatan ekonomi nomor 20 di dunia.

Sumber:

http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=8125&coid=2&caid=19&gid=2

diakses tanggal 16 November 2010

Laju Pertumbuhan PDB/PDRB

Economy Growth

Konsep dan Definisi

Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sama dengan pertumbuhan PDB. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan PDB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga.

Manfaat

- Untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional;
- Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional;
- Sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan.

Rumus

Laju pertumbuhan PDB:

$$= \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$$

Laju pertumbuhan PDRB:

$$= \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Ket:

PDB/PDRB_t : PDB/PDRB tahun tertentu

PDB/PDRB_{t-1} : PDB/PDRB tahun sebelumnya

Interpretasi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu.

Sumber Data

Susenas; Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diterima BPS dari Kantor-kantor Bea Cukai; Data sayur-sayuran dan buah-buahan diperoleh dari Ditjen Bina Program Tanaman Pangan, Departemen Pertanian; data produksi tanaman perkebunan besar dari BPS, data produksi perkebunan rakyat dari Ditjen Perkebunan Departemen Pertanian; Laporan Tahunan Pertambangan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Survei Tahunan Industri Besar Sedang, Laporan Tahunan Pertambangan Migas dan Pertamina; PN Gas, dan PDAM; Laporan Keuangan PT. KAI dll

Level Penyajian

- Laju Pertumbuhan PDB: Nasional
- Laju Pertumbuhan PDRB: provinsi dan kabupaten/kota

Kedua data disajikan tahunan.

Publikasi

Pendapatan Nasional Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia, Statistik Indonesia, PDRB provinsi di Indonesia, PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia

Penyedia Informasi

Direktorat Neraca Produksi

Keterbatasan

-

Implementasi

PDB Indonesia dinilai masih '*on track*'

JAKARTA: Bappenas menilai laju pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menjanjikan meski perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal III/2010 di bawah ekspektasi pemerintah.

Direktur Perencanaan Ekonomi Makro Kementerian PPN/Bappenas Bambang Prijambodo menilai unsur pembentuk pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2010 masih menunjukkan kondisi ekonomi yang kuat. "Daya beli masyarakat meningkat yaitu 5,2%, pertumbuhan investasi juga masih baik. Memang ekspor-impor melambat tapi itu memang karena trennya seperti itu," katanya di Jakarta hari ini. Menurut dia, perlambatan ekonomi pada kuartal III/2010 turut dipengaruhi oleh penurunan kredit perbankan pada September yaitu dari 20,4% pada Agustus turun menjadi 19,5% pada September. "Ada juga pengaruh musim, gangguan iklim, dan banjir yang memengaruhi produksi pertanian," katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2010 mencapai 3,45% meningkat dibandingkan kuartal II/2010 2,81%. Pertumbuhan ini jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu tumbuh 5,8%.

Sumber:

<http://web.bisnis.com/keuangan/ekonomi-makro/1id219104.html>

diakses tanggal 16 November 2010

Indeks Implisit

Implicit Indeks

Konsep dan Definisi

Suatu indeks yang menunjukkan tingkat perkembangan harga di tingkat produsen (*producer price index*).

Manfaat

Digunakan untuk mengetahui adanya perubahan harga barang dan jasa secara keseluruhan yang lebih dikenal dengan tingkat inflasi.

Rumus

$$\text{Indeks Implisit} = \frac{PDB_{HB}}{PDB_{HK}} \times 100$$

Ket:

PDB_{HB} : Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku

PDB_{HK} : Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan

Interpretasi

Indeks implisit Indonesia pada triwulan II tahun 2004 mencapai 138,71 persen yang menunjukkan adanya kenaikan harga sebesar 38,71 persen dibandingkan tahun 2000.

Sumber Data

Susenas, Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diterima BPS dari Kantor-kantor Bea Cukai; Data sayur-sayuran dan buah-buahan diperoleh dari Ditjen Bina Program Tanaman Pangan, Departemen Pertanian; data produksi tanaman perkebunan besar dari BPS, data produksi perkebunan rakyat dari Ditjen Perkebunan Departemen Pertanian; Laporan Tahunan Pertambangan Energi,

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Survei Tahunan Industri Besar Sedang, Laporan Tahunan Pertambangan Migas dan Pertamina; PN Gas, dan PDAM; Laporan Keuangan PT. KAI dll

Level Penyajian

Nasional dan provinsi.

Publikasi

Statistik Indonesia (SI), Indikator Ekonomi, PDRB provinsi di Indonesia.

Penyedia Informasi

- Direktorat Statistik Harga
- Direktorat Distribusi

Keterbatasan

Tidak bisa dibandingkan dengan IHK dan IHPB.

Implementasi

Berbeda dengan Indeks Harga Konsumen (IHK), indeks implisit menggambarkan perubahan harga di tingkat produsen. Harga yang dicakup dalam indeks implisit relatif lebih lengkap karena memperhitungkan harga barang dan jasa.

Perubahan indeks implisit cenderung mengalami peningkatan pada setiap triwulan. Namun untuk triwulan III tahun 2003, indeks implisit pertanian mengalami penurunan dari 412,46 persen menjadi 409,88 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan harga barang dan jasa sektor pertanian bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan indeks ini disebabkan menurunnya indeks sub sektor tanaman bahan makanan, perkebunan dan perikanan.

Perubahan indeks implisit sejalan dengan perubahan harga sub sektor tanaman bahan makanan yang juga menurun pada triwulan III tahun 2003 dibandingkan dengan triwulan II tahun 2003 dari 410,55 persen menjadi 408,43 persen.

Namun selama satu tahun terakhir (triwulan III tahun 2002 sampai dengan triwulan III tahun 2003) sub sektor tanaman bahan makanan telah mengalami perubahan indeks implisit sebesar 17,26 persen.

Sumber:

<http://www.deptan.go.id/buletin/data/TERBIT%2004-03.doc>

diakses tanggal 18 November 2010

Distribusi Persentase PDB/PDRB

Distribution of GDP/GRDP

Konsep dan Definisi

Sumbangan dari setiap satuan unit pengamatan (lapangan usaha dalam PDB/PDRB sektoral atau penggunaan dalam PDRB/PDB pengeluaran) terhadap total agregat PDRB/PDB yang dinyatakan dalam persentase.

Manfaat

Menunjukkan peranan/sumbangan setiap sektor ekonomi terhadap PDB/PDRB pada periode tertentu.

Rumus

Distribusi PDB:

$$= \frac{PDB_i}{\sum PDB} \times 100 \%$$

Distribusi PDRB:

$$= \frac{PDRB_i}{\sum PDRB} \times 100 \%$$

Ket:

PDB_i : Nominal PDB atas dasar harga berlaku sektor ke- i

$PDRB_i$: Nominal PDRB atas dasar harga berlaku sektor ke- i

Interpretasi

Besarnya sumber pertumbuhan PDB dari sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2008 sebesar 1,2 persen. yang artinya sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 1,2 persen terhadap nilai PDB pada tahun 2008.

Sumber Data

Susenas; Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diterima BPS dari Kantor-kantor Bea Cukai; Data sayur-sayuran dan buah-buahan diperoleh dari Ditjen Bina Program Tanaman Pangan, Departemen Pertanian; data produksi tanaman perkebunan besar dari BPS, data produksi perkebunan rakyat dari Ditjen Perkebunan Departemen Pertanian; Laporan Tahunan Pertambangan Energi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Survei Tahunan Industri Besar Sedang, Laporan Tahunan Pertambangan Migas dan Pertamina; PN Gas, dan PDAM; Laporan Keuangan PT. KAI dll

Level Penyajian

- PDB: Nasional
 - PDRB: provinsi dan kabupaten/kota
- Keduanya disajikan tahunan

Publikasi

Statistik Indonesia (SI), Indikator Ekonomi, PRDB provinsi di Indonesia

Penyedia Informasi

Direktorat Neraca Produksi

Keterbatasan

-

PDB/PDRB per Kapita

GDP/GDRP per Capita

Konsep dan Definisi

Merupakan nilai PDB atau PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu.

Manfaat

- PDB dan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
- PDB dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Rumus

PDB per kapita

$$= \frac{\text{PDB}}{\sum \text{penduduk}} \times 100 \%$$

PDRB per kapita

$$= \frac{\text{PDRB}}{\sum \text{penduduk}} \times 100 \%$$

Interpretasi

Saat ini PDB per kapita Indonesia sudah berada di kisaran 2.500 dollar AS-2.900 dollar AS. Yang artinya pendapatan tiap penduduk Indonesia secara rata-rata sudah mencapai 2500-2900 dolar AS.

Sumber Data

PDB, PDRB dan Proyeksi Penduduk hasil Supas/SP.

Level Penyajian

Nasional, provinsi dan kabupaten.

Publikasi

Statistik Indonesia (SI), Indikator Ekonomi, Daerah dalam Angka, PDRB Provinsi di Indonesia, dan PDRB Kabupaten/Kota di Indonesia.

Penyedia Informasi

Direktorat Neraca Produksi.

Keterbatasan

-

Implementasi

PDB per Kapita Dekati USD3.000

JAKARTA - Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia dalam kurun waktu enam tahun terus menunjukkan kenaikan. Pemerintah optimistis PDB per kapita bisa menembus angka USD3.000. Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, kondisi perekonomian dalam negeri semakin membaik dilihat dari pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dalam negeri dari guncangan krisis global tahun 2008 lalu."Berdasarkan hasil sensus nasional yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu, PDB per kapita kita hampir mendekati USD3.000. Angka yang jauh meningkat dibanding tahun 2004 yang hanya mencapai USD1.189," ungkap Hatta saat menutup Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Jakarta Sabtu (25/9) malam.

Hatta memaparkan, saat ini dari jumlah pekerja Indonesia yang mencapai 90 juta orang, 30 persen di antaranya termasuk berpenghasilan cukup tinggi, yakni USD5.000-6.000 per kapita. Sedangkan 10 persennya masih berpenghasilan rata-

rata USD4.000 dan sisanya, 60 persen masih berkisar USD2.000 per kapita.

"Disparitas inilah pekerjaan besar untuk meningkatkan PDB per kapita kita agar lebih tinggi," ujar Hatta.

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo menuturkan, saat ini PDB per kapita Indonesia masih berkisar di angka USD2.500-2.900.

"Bisa saja dalam waktu dekat PDB per kapita kita akan mencapai USD3.000," ungkap Lukita.

Berdasarkan data yang dilansir BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2009 yang mencapai 4,5 persen mendorong pendapatan per kapita Indonesia pada 2009 naik menjadi Rp24,3 juta atau setara dengan USD 2.590,1. Angka tersebut menunjukkan peningkatan 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp21,7 juta (USD 2.269,9).

Sedangkan pada tahun 2007 PDB per kapita Indonesia hanya USD1.964,3. Berdasarkan data tersebut, ujar dia, dapat diartikan bahwa PDB per kapita Indonesia mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun ke tahun.

"Itu menggambarkan kondisi pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia saat ini, dan besar kemungkinan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi," kata Lukita.

Lukita menjelaskan, peningkatan PDB Indonesia yang kini di kisaran Rp7.000 triliun dengan PDB per kapita berada pada kisaran angka USD2.500-2.900,

membuat Indonesia naik peringkat menjadi negara berpenghasilan menengah atau *lower middle income country*.

Namun, nominal PDB atau PDB per kapita tidak serta-merta dapat diartikan kayanya suatu negara. Menurut dia, PDB Indonesia yang cukup besar tidak serta-merta diikuti dengan besarnya PDB per kapita.

"Karena perhitungan ini tergantung banyaknya jumlah penduduk, dan Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar," katanya.

Hal inilah yang membuat PDB per kapita Indonesia lebih rendah dibanding negara-negara lain. Namun, dengan jumlah penduduk yang sangat besar, tetap ada sisi positif yang bisa dioptimalkan.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) terpilih Suryo Bambang Sulisto (SBS) menyatakan perekonomian Indonesia menghadapi persaingan global dalam upaya menuju perekonomian yang tangguh. Untuk itu, dia meminta semua seluruh unsur-unsur bisnis dan komponen bangsa bisa bekerja sama secara efektif dengan pemerintah. Menurut SBS, tantangan yang dihadapi dalam lima tahun ke depan antara lain menggairahkan dunia usaha, meningkatkan dan menggenjot daya saing.

SBS menegaskan, akan fokus pada pembangunan ekonomi di daerah karena menutrutnya ekonomi di daerah adalah pusat kekuatan ekonomi bangsa. Dia melihat, peluang-peluang usaha banyak terdapat di daerah sehingga layak

diberikan lebih banyak perhatian. “Kita perlu mendorong investor untuk berinvestasi di daerah dan ekonomi daerah bisa bangkit,” kata pria kelahiran Solo, 11 Februari 1947 itu.

Sumber:

<http://economy.okezone.com/read/2010/09/27/20/376199/pdb-per-kapita-dekati-usd3-000>

<http://www.bps.go.id>

Rasio Modal-Output Marginal

Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Konsep dan Definisi

Rasio Modal-Output Marginal (*Incremental Capital Output Ratio - ICOR*) adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/ menambah satu unit output. Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. Karena unit kapital bentuknya berbeda-beda dan beraneka ragam sementara unit output relatif tidak berbeda, maka untuk memudahkan penghitungan keduanya dinilaidalam bentuk uang (nominal).

Manfaat

Pengkajian mengenai ICOR menjadi sangat menarik karena ICOR dapat merefleksikan besarnya produktifitas kapital yang pada akhirnya menyangkut besarnya pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai.

Rumus

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y}$$

$$\Delta Y = Y_t - Y_{t-1}$$

Dimana:

I : Investasi

ΔY : Perubahan output

Y_t : output pada tahun berjalan

Y_{t-1} : output pada tahun sebelumnya

Interpretasi

ICOR dapat diartikan sebagai banyaknya kebutuhan investasi yang diperlukan

untuk mendapatkan 1 unit output. Sebagai contoh, misalnya besarnya investasi pada suatu tahun di negara A adalah sebesar Rp 300 miliar, sedangkan tambahan output yang diperoleh dari hasil penanaman investasi itu adalah sebesar Rp 60 miliar, maka nilai ICOR negara A adalah sebesar 5 (300 miliar / 60 miliar). Angka ini menunjukkan bahwa untuk menaikkan 1 unit output diperlukan investasi sebesar 5 unit.

Sumber Data

Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstant dan survei tahunan Industri Besar Sedang, Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Publikasi

ICOR Nasional periode 1990 -1996 dan 2000-2004, ICOR persektor 1990 – 1996 dan 2000 -2004, ICOR per 2 digit sektor industri 1990-1996 dan 2000- 2004

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Industri

Keterbatasan

Pada kenyataannya pertambahan output bukan hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi seperti pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi dan kemampuan kewiraswastaan. Dengan demikian untuk melihat peranan investasi terhadap output berdasarkan konsep ICOR, maka peranan faktor-faktor selain investasi diasumsikan konstan (*ceteris paribus*).

Rasio Tenaga Kerja-Output Marginal

Incremental Labour Output Ratio (ILOR)

Konsep dan Definisi

Rasio Tenaga Kerja-Output Marginal (*Incremental Labour Output Ratio – ILOR*) adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan tenaga kerja baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. Besaran ILOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan tenaga kerja dengan tambahan output.

Manfaat

Nilai ILOR menunjukkan jumlah tenaga kerja yang terserap menurut laju pertumbuhan pendapatan/ekonominya di suatu wilayah pada periode tertentu.

Rumus

$$ILOR = \frac{(\Delta L / L_t)}{(\Delta Y / Y_t)}$$

$$\Delta L = L_t - L_{t-1}$$

$$\Delta Y = Y_t - Y_{t-1}$$

Dimana:

ΔL : perubahan jumlah tenaga kerja dari tahun (t-1) ke tahun t

L_t : Jumlah tenaga kerja pada tahun berjalan

L_{t-1} : Jumlah tenaga kerja pada tahun sebelumnya

ΔY : perubahan pertumbuhan output dari tahun (t-1) ke tahun t

Y_t : output pada tahun berjalan

Y_{t-1} : output pada tahun sebelumnya

Interpretasi

ILOR dapat diartikan sebagai banyaknya kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk mendapatkan 1 unit output. Sebagai contoh, misalnya pada tahun 2007 perubahan pertumbuhan pendapatan sebesar 0,04455 dan perubahan jumlah tenaga kerja sebesar 0,0323 maka nilai ILOR pada tahun 2007 sebesar 0,725. Hal ini berarti setiap kenaikan Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1% akan menyerap sebesar 72 – 73 tenaga kerja.

Sumber Data

Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan dan survei tahunan industri besar sedang 1975, indeks harga perdagangan besar (IHPB)

Level Penyajian

Nasional

Publikasi

Analisis Incremental Labour Output Ratio 1990-2004

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Industri

Keterbatasan

-

Implementasi

-

<http://www.bps.go.id>

Pertumbuhan Produksi Industri

Pertumbuhan Produksi Industri Pengolahan

Manufacturing Industrial Production Growth

Konsep dan Definisi

Suatu angka yang menunjukkan persentase kenaikan/penurunan nilai produksi industri pengolahan pada periode berjalan/periode bersangkutan terhadap nilai produksi industri pengolahan pada periode sebelumnya. Angka ini juga disajikan dalam periode bulanan, triwulanan, dan tahunan serta disajikan angka pertumbuhan produksi industri dalam KBLI 2 (dua) digit.

Manfaat

Untuk mengetahui apakah terjadi kenaikan/penurunan nilai produksi industri dan seberapa besar kenaikan/penurunan nilai produksi industri pengolahan pada periode bersangkutan dibandingkan dengan periode sebelumnya (bulanan, triwulanan, atau tahunan).

Rumus

$$PPI = \frac{I_t - I_{(t-1)}}{I_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

PPI : Pertumbuhan Produksi Industri

I_t : Indeks pada periode berjalan

$I_{(t-1)}$: Indeks pada periode sebelumnya

Interpretasi

- Jika angka ini bernilai nol (0) maka nilai produksi industri pada periode yang bersangkutan sama dengan sebelumnya.

- Jika angka ini bernilai positif (+) maka produksi industri pada periode yang bersangkutan lebih besar atau mengalami peningkatan dibanding produksi industri pada periode sebelumnya.
- Jika angka ini bernilai negatif (-) maka produksi industri pada periode yang bersangkutan lebih kecil atau mengalami penurunan dibanding produksi industri pada periode sebelumnya.

Besarnya kenaikan/penurunan yang ditunjukkan oleh angka ini adalah dalam bentuk persentase.

Misalkan pertumbuhan produksi industri pengolahan tembakau (KBLI 16) pada tahun 2006 sebesar -0,89%. Ini berarti bahwa pada tahun 2006 terjadi penurunan produksi industri pengolahan tembakau dibanding produksi industri pengolahan tembakau pada tahun 2005 namun penurunan yang terjadi relatif tidak terlalu besar.

Sumber Data

Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan (IBS).

Level Penyajian

Nasional

Publikasi

Perkembangan Indeks Produksi Industri Besar dan Sedang, Indikator Ekonomi.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Industri

Keterbatasan

Belum bisa disajikan dalam skala regional (terbatas pada skala nasional).

Implementasi

MEDAN-pertumbuhan produksi industri pengolahan besar dan sedang pada triwulan III tahun 2010 mengalami kenaikan 4,82 % dibandingkan triwulan II tahun 2010. Hal tersebut dikatakan, Kepala Bidang Integritasi Pengolahan dan Deseminasi Statistik, Panusunan Siregar kepada wartawan hari ini.

“Kenaikan produksi industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia yang mencapai 14,38 persen merupakan penyebab utama kenaikan produksi pada triwulan III,” katanya.

Dia menjelaskan, selain itu, industri makanan dan minuman yang mengalami kenaikan sebesar 13,0%, barang-barang dari kayu dan barang-barang anyaman naik 5,72% dan industri kertas dan barang dari kertas naik 1,52% juga mempengaruhi kenaikan produksi pada triwulan III.

“Namun demikian, ada juga barang yang mengalami penurunan seperti logam dasar yang turun 2,58 %, karet dan barang dari karet dan plastik 0,48 %,” tambahnya.(WP)

Sumber:

<http://www.medankoma.com/2010/11/02/pertumbuhan-produksi-industri-pengolahan-naik-482/>

Diakses pada : Jumat, 19 Nopember 2010

Indeks Produksi Industri Pengolahan

Industrial Production Growth Index

Konsep dan Definisi

Angka indeks yang menggambarkan perkembangan produksi sektor industri pengolahan secara lebih dini karena sifatnya yang dirancang secara periodik bulanan. Data bulanan tersebut juga dapat disajikan sebagai data triwulanan maupun tahunan. Data Triwulanan merupakan rata-rata dari indeks bulanan pada triwulan yang bersangkutan dan indeks tahunan merupakan rata-rata 4 (empat) triwulan pada tahun yang bersangkutan. Angka ini juga menyajikan indeks produksi dalam KBLI 2 (dua) digit.

Industri yang dimaksudkan adalah industri pengolahan (*manufacturing industry*) dengan cakupan perusahaan industri berskala besar dan sedang. Perusahaan industri berskala besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, sedangkan perusahaan industri berskala sedang adalah perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

Manfaat

Angka indeks yang dihasilkan menggambarkan perkembangan produksi sektor industri pengolahan secara lebih dini dan data series yang lebih panjang dan lengkap karena sifatnya yang dirancang secara periodik bulanan.

Rumus

Banyaknya perusahaan industri yang ditetapkan sebagai sampel adalah 1.576

perusahaan. Metode penghitungan indeks produksi bulanan menggunakan “Metode Divisia”, pada klasifikasi level 2 digit menurut KBLI 2005 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2005) yang disadur dari ISIC Rev-3 (*International Standard Industrial Classification, Revision 3*). Indeks produksi industri besar dan sedang digunakan sebagai dasar penghitungan tingkat pertumbuhan produksi industri besar dan sedang triwulanan.

Formula *Discrete Divisia* berdasarkan atas rasio antar bulan masing-masing variabel dengan tahapan agregasi secara berjenjang sebagai berikut:

Menghitung rasio perusahaan

$$R_{ij} = e^{\left[\sum_k \frac{V_{ijk}}{\sum_k V_{ijk}} x \ln \left(\frac{Q_{ijk2}}{Q_{ijk1}} \right) \right]}$$

Menghitung rasio KBLI

$$R_i = e^{\left[\sum_j \frac{W_{ij} V_{ij}}{\sum_j W_{ij} V_{ij}} x \ln(R_{ij}) \right]}$$

Menghitung rasio total

$$R_{tot} = e^{\left[\sum_i \frac{W_i V_i}{\sum_i W_i V_i} x \ln(R_i) \right]}$$

Menghitung indeks KBLI dan total

$$I_t = I_{(t-1)} x R$$

di mana:

Rasio Perusahaan

R_{ij} : rasio perusahaan j dalam KBLI- i pada bulan ke-2 terhadap bulan ke-1.

V_{ijk} : nilai produksi dari komoditas k untuk perusahaan j dalam KBLI i selama periode dua bulan

Q_{ijk1} : produksi dari komodit k untuk perusahaan j dalam KBLI- i pada bulan ke-1

Q_{ijk2} : produksi dari komodit k untuk perusahaan j dalam KBLI- i pada bulan ke-2

R_i : rasio KBLI- i

V_{ij} : nilai produksi perusahaan j dalam KBLI- i selama periode dua bulan, di mana:

$$V_{ij} = \sum_k V_{ijk}$$

W_{ijadj} : penimbang sampling yang disesuaikan untuk perusahaan j dalam KBLI- i

R_{tot} : rasio total

$W_i V_i$: total nilai produksi tertimbang dari seluruh perusahaan untuk KBLI- i selama periode dua bulan, di mana:

$$W_i V_i = \sum_j W_{ijadj} V_{ij}$$

R : rasio

I_t : indeks pada bulan ke- t

$I_{(t-1)}$: indeks pada bulan ke- $(t - 1)$

Interpretasi

- Indeks produksi industri pengolahan menunjukkan perkembangan produksi industri pengolahan bila dibandingkan dengan periode dasar (tahun dasar=100).
- Jika nilai indeks produksi industri periode berjalan (I_t)>100, maka secara umum industri pengolahan pada periode yang bersangkutan

mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode dasar,

- Jika nilai indeks produksi industri periode berjalan (I_t)<100, maka secara umum industri pengolahan pada periode yang bersangkutan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode dasar.

Angka indeks produksi tahunan industri besar dan sedang untuk KBLI 15 (makanan dan minuman) pada tahun 2006 sebesar 232,91. Ini berarti bahwa kondisi industri pengolahan pada tahun 2006 secara umum berkembang lebih dari dua kali lipat dibandingkan industri pengolahan makanan dan minuman pada tahun 2000.

Sumber Data

Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan (IBS).

Level Penyajian

Nasional

Publikasi

Statistik Indonesia, Perkembangan Indeks Produksi Industri Besar dan Sedang, Indikator Ekonomi.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Industri

Keterbatasan

- Belum bisa disajikan dalam skala regional (terbatas pada skala nasional).
- Hanya bisa dibandingkan dengan tahun dasar.

Implementasi

Tokyo-Jepang) Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Perindustrian Jepang,

Kamis (15/04) mengumumkan revisi indeks produksi untuk bulan Februari, yang menunjukkan produksi industri Jepang bulan Februari, turun 0,6 persen dibanding bulan Januari, karena anjloknya industri kimia.

Sementara indeks produksi untuk pabrik dan pertambangan, anjlok untuk pertama kalinya dalam tahun ini, menjadi 93,7. Selain itu, dalam data awal yang dikeluarkan pada 30 Maret disebutkan, bahwa produksi pada bulan Februari turun 0,9 persen, sementara dalam data revisi menjadi 0,0 persen.

Selain itu, Kementerian juga melakukan koreksi data pada bulan Januari 2009, sampai Februari 2010, yang merupakan bagian dari proses penyesuaian ulang.

Berdasarkan data yang direvisi, indeks pengiriman industri pada bulan Februari turun 0,2 persen menjadi 94,8 persen, dan persediaan industri naik 1,6 persen menjadi 95,5. (YD/KN)

Sumber:

<http://www.nusantara-news.com/2010/04/160114.html>.

Diakses pada: Jumat, 19 Nopember 2010

<http://www.bps.go.id>

Transportasi

Rasio Penumpang per Pesawat Udara

Konsep dan Definisi

Perbandingan antara total jumlah penumpang yang datang atau berangkat dengan pesawat udara dengan total jumlah armada pesawat udara yang datang atau berangkat.

Manfaat

Untuk mengetahui rata-rata jumlah penumpang yang datang atau berangkat dengan pesawat udara per unit pesawat udara yang datang atau berangkat.

Rumus

$$RPPU = \frac{JPPU}{JPUB}$$

RPPU : Rasio Penumpang per Pesawat Udara (orang/unit)

JPPU : Total jumlah penumpang yang datang atau berangkat dengan pesawat udara (orang)

JPUB : Total jumlah armada pesawat udara yang datang atau berangkat (unit)

Interpretasi

Contohnya jika rasio penumpang berangkat per pesawat udara pada tahun 1999 sebesar 78,59 maka dapat dikatakan bahwa setiap satu armada pesawat udara yang berangkat rata-rata mengangkut kurang lebih 79 orang penumpang yang berangkat.

Sumber Data

Data untuk variabel-variabel pembentuk indikator ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari bandar udara cabang dan PT. Angkasa Pura I & II.

Level Penyajian

Provinsi

Publikasi

Belum ada publikasi yang menyajikan indikator ini. Namun untuk variabel pembentuknya yaitu jumlah penumpang yang datang atau berangkat dan jumlah pesawat udara yang datang atau berangkat dapat dilihat dalam publikasi Statistik Transportasi.

Penyedia Informasi

Direktorat Distribusi

Keterbatasan

-

Implementasi

Rasio Penumpang per Pesawat Udara di provinsi Sumatera Utara Tahun 1993-1999

Thn	RPPU			
	Internasional		Domestik	
	Dtg	Brkt	Dtg	Brkt
1993	85,53	69,32	51,13	49,83
1994	87,49	74,84	51,63	53,67
1995	99,62	87,34	58,93	60,99
1996	91,12	86,01	56,14	57,48
1997	81,92	76,58	56,3	56,92
1998	77,65	70,77	53,9	54,02
1999	80,60	78,59	51,31	49,83

Rasio jumlah penumpang transportasi udara mancanegara (internasional) per pesawat di bandara Polonia Medan baik yang datang maupun berangkat antara tahun 1993-1999 mengalami fluktuasi. Kenaikan terjadi dari tahun 1993 ke tahun 1995, setelah itu mulai dari tahun 1996 sampai dengan 1998 menunjukkan

penurunan dan pada tahun 1999 menunjukkan kenaikan kembali. Pada tahun 1993 sebanyak 85,53 dan 69,32 penumpang per pesawat yang datang dan berangkat, meningkat menjadi 99,62 dan 87,84 penumpang pada tahun 1995, kemudian menurun menjadi 91,12 dan 86,01 penumpang pada tahun 1996 lalu menurun lagi pada tahun 1998. Rasio penumpang kembali meningkat pada tahun 1999 yaitu menjadi 80,60 dan 78,59.

Sumber :

Laporan Akhir: Studi Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Transportasi
Wilayah dengan Model Pendekatan I-O,
Desember 2000, Departemen
Perhubungan & Badan Pusat Statistik

Rasio Barang per Pesawat Udara

Konsep dan Definisi

Perbandingan antara jumlah barang yang dibongkar dari pesawat udara atau dimuat dengan pesawat udara dengan jumlah armada pesawat udara yang datang atau berangkat.

Barang yang dibongkar dari pesawat udara atau dimuat dengan pesawat udara adalah setiap hak milik atas barang tertentu yang dibongkar dari pesawat udara atau diangkut/dibawa oleh pesawat udara, selain benda-benda pos, barang-barang kelengkapan pesawat udara, dan bagasi.

Manfaat

Untuk mengetahui rata-rata jumlah barang yang dibongkar atau diangkut per unit pesawat udara yang datang atau berangkat.

Rumus

$$RBPU = \frac{JBPU}{JPU}$$

RBPU : Rasio Barang per Pesawat Udara (ton/unit)

JBPU : Total jumlah barang yang dibongkar dari pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara (ton)

JPU : Total jumlah armada pesawat terbang yang datang atau berangkat (unit)

Interpretasi

Contohnya, jika rasio barang yang dibongkar per pesawat udara pada tahun 1999 sebesar 0,53 maka dapat dikatakan bahwa secara rata-rata kurang lebih 1 ton

barang diturunkan dari satu armada pesawat udara yang datang.

Sumber Data

Data untuk variabel-variabel pembentuk indikator ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari bandar udara cabang dan PT. Angkasa Pura I & II.

Level Penyajian

Provinsi

Publikasi

Belum ada publikasi yang menyajikan indikator ini. Namun untuk variabel pembentuknya yaitu jumlah barang yang dibongkar atau diangkut dan jumlah pesawat udara yang datang atau berangkat dapat dilihat dalam publikasi Statistik Transportasi.

Penyedia Informasi

Direktorat Distribusi

Keterbatasan

-

Implementasi

Rasio Barang per Pesawat Udara di provinsi Sumatera Utara Tahun 1993-1999

Thn	RBPU			
	Internasional		Domestik	
	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
1993	0,53	2,53	0,64	0,59
1994	0,51	2,93	0,74	0,85
1995	0,58	3,25	0,86	1,08
1996	0,43	2,64	1,03	0,99
1997	0,75	0,95	1,20	1,29
1998	0,51	2,60	1,13	1,48
1999	0,53	2,57	1,26	1,64

Untuk jumlah barang yang diangkut, secara umum rasio jumlah barang per pesawat yang dimuat dari bandar udara Polonia lebih besar dibandingkan dengan yang dibongkar, baik untuk penerbangan mancanegara maupun domestik. Jumlah barang tertinggi untuk penerbangan mancanegara yang dimuat terjadi pada tahun 1995 dengan rata-rata muatan sebesar 3,25 ton per pesawat, sedangkan yang terendah pada tahun 1997 dengan hanya rata-rata muatan sebesar 0,95 ton per pesawat

Sumber:

Laporan Akhir: Studi Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Transportasi
Wilayah dengan Model Pendekatan I-O,
Desember 2000, Departemen
Perhubungan & Badan Pusat Statistik

Rasio Penumpang per Kapal

Konsep dan Definisi

Perbandingan antara jumlah penumpang datang atau berangkat dengan kapal dengan jumlah armada kapal yang datang atau berangkat.

Manfaat

Untuk mengetahui rata-rata jumlah penumpang yang datang atau berangkat per unit kapal laut yang datang atau berangkat.

Rumus

$$RPK = \frac{JPK}{JK}$$

RPK : Rasio Penumpang per Kapal (orang/unit)

JPK : Total jumlah penumpang datang atau berangkat dengan kapal(orang)

JK : Total jumlah armada kapal yang datang atau berangkat (unit)

Interpretasi

Contohnya, jika rasio penumpang yang berangkat per kapal pada tahun 1999 adalah 13,35 maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 1999 setiap kapal rata-rata mengangkut kurang lebih 13 orang penumpang yang berangkat.

Sumber Data

Data untuk variabel-variabel pembentuk indikator ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I s/d IV (untuk pelabuhan yang diusahakan) atau Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (untuk pelabuhan yang tidak diusahakan).

Level Penyajian

Provinsi

Publikasi

Belum ada publikasi yang menyajikan indikator ini. Namun untuk variabel pembentuknya yaitu jumlah penumpang datang atau berangkat dan jumlah armada kapal yang datang atau berangkat dapat dilihat dalam publikasi yang berjudul Statistik Transportasi.

Penyedia Informasi

Direktorat Distribusi

Keterbatasan

-

Implementasi

Rasio Penumpang per Kapal di provinsi Sumatera Utara Tahun 1993-1999

Thn	RPK (0rang/unit)			
	Pelayaran Luar Negeri		Pelayaran Dalam Negeri	
	Dtg	Brgkt	Dtg	Brgkt
1993	17,70	23,98	24,70	26,48
1994	18,37	24,65	24,85	26,30
1995	18,48	22,81	25,82	27,38
1996	13,16	16,68	20,36	20,18
1997	13,61	11,76	23,63	23,60
1998	16,63	14,60	24,81	25,62
1999	16,42	13,35	24,19	24,77

Rasio jumlah penumpang yang datang dan berangkat per kapal dengan menggunakan jasa transportasi laut (pelayaran) dalam negeri pada pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan di provinsi Sumatera Utara dari tahun 1993 sampai dengan 1995 mengalami kenaikan yaitu dari rasio sebesar 24,70 dan 26,48

penumpang per kunjungan kapal menjadi 25,82 dan 27,38 penumpang tahun 1995. Meskipun pada tahun 1996 sedikit mengalami penurunan tetapi pada tahun 1997 mulai menunjukkan peningkatan kembali. Hal ini mengindikasikan bahwa transportasi laut dalam negeri masih menjadi andalan untuk mengangkut penumpang dan barang, baik pada masa sebelum dan selama berlangsung krisis ekonomi.

Dalam hal transportasi laut (pelayaran) luar negeri dalam hal rasio jumlah penumpang per kapal yang datang dan berangkat mempunyai pola yang hampir sama dengan pelayaran domestik (dalam negeri). Rasio jumlah penumpang per kapal yang berangkat antara periode 1993 dan 1994 pertumbuhannya naik lalu turun pada tahun 1995 sampai tahun 1997, dan kemudian mulai terjadi peningkatan kembali di tahun 1998 dengan rasio sebesar 14,60 orang. Rasio jumlah penumpang yang datang per kapal dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1995 mengalami kenaikan yaitu dari 17,70 orang menjadi 18,48 orang kemudian mengalami penurunan di tahun 1996 menjadi 13,16 orang. Jumlah tersebut meningkat kembali sampai tahun 1998 menjadi 16,63 orang. Dibandingkan dengan transportasi udara indikasi ini juga dapat menunjukkan bahwa transportasi laut masih menjadi fungsi substitusi dalam menggantikan peran transportasi udara yang tarifnya relatif lebih tinggi, meskipun dengan jarak tempuh yang sama.

Sumber:

Laporan Akhir :Studi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Transportasi Wilayah dengan Model Pendekatan I-O, Desember 2000, Departemen Perhubungan & Badan Pusat Statistik.

Rasio Barang per Kapal

Konsep dan Definisi

Perbandingan antara jumlah barang yang dibongkar atau diangkut dengan kapal dengan jumlah armada kapal yang datang atau berangkat.

Manfaat

Untuk mengetahui rata-rata jumlah barang yang dibongkar atau diangkut per unit kapal yang datang atau berangkat.

Rumus

$$RBK = \frac{JBK}{JK}$$

RBK : Rasio Barang per Kapal (ton/unit)

JBK : Total jumlah barang yang dibongkar atau diangkut dengan kapal laut (ton)

JK : Total jumlah armada kapal yang datang atau berangkat (unit)

Interpretasi

Contohnya, jika rasio barang yang dibongkar per kapal pada tahun 1999 sebesar 345,84 maka dapat dikatakan bahwa pada tahun 1999 secara rata-rata kurang lebih 346 ton barang diturunkan dari satu kapal yang datang.

Sumber Data

Data untuk variabel-variabel pembentuk indikator ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I s/d IV (untuk pelabuhan yang diusahakan) atau Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan (untuk pelabuhan yang tidak diusahakan).

Level Penyajian

Provinsi

Publikasi

Belum ada publikasi yang menyajikan indikator ini. Namun untuk variabel pembentuknya yaitu jumlah barang yang dibongkar atau dimuat dan jumlah kapal yang datang atau berangkat dapat dilihat dalam publikasi yang berjudul Statistik Transportasi.

Penyedia Informasi

Direktorat Distribusi

Keterbatasan

-

Implementasi

Rasio Barang per Kapal di provinsi Sumatera Utara Tahun 1993-1999

Thn	RBK (ton/unit)			
	Pelayaran Luar Negeri		Pelayaran Dalam Negeri	
	Bgkr	Muat	Bgkr	Muat
1993	546,03	1151,81	421,90	149,42
1994	489,54	954,94	410,40	138,61
1995	1082,52	575,53	283,24	154,54
1996	1183,33	711,52	241,67	112,91
1997	1073,67	1035,64	250,58	110,44
1998	459,82	444,54	169,36	85,52
1999	345,84	418,01	143,52	69,46

Rasio jumlah barang yang dibongkar dan dimuat per kapal baik pelayaran dalam negeri dan luar negeri cenderung mempunyai pola yang tidak beraturan. Krisis ekonomi yang melanda perekonomian provinsi Sumatera Utara ini ikut berdampak pula terhadap kegiatan pendistribusian barang di sektor riil yang kebanyakan diangkut melalui transportasi laut dalam negeri. Hal yang sama berlaku pula untuk pelayaran luar negeri (internasional) dimana rasio

jumlah barang yang dibongkar dan dimuat per kapal juga menunjukkan pola yang sama, bahkan rata-rata pertumbuhannya lebih besar dibandingkan dengan pelayaran dalam negeri.

<http://www.bps.go.id>

Rasio Penduduk terhadap Mobil Penumpang

Konsep dan Definisi

Perbandingan antara jumlah penduduk di suatu daerah dengan jumlah mobil penumpang.

Manfaat

Dapat menggambarkan potensial produksi (penduduk) terhadap fasilitas mobil penumpang yang tersedia.

Rumus

$$RPMP = \frac{JP}{JMP}$$

RPMP : Rasio Penduduk terhadap Mobil Penumpang (orang/kendaraan)

JP : Total jumlah penduduk

JMP : Jumlah Mobil Penumpang

Interpretasi

Misalnya pada tahun 1999, rasio penduduk terhadap mobil penumpang adalah 555,26 dapat diartikan bahwa satu mobil penumpang disediakan untuk kurang lebih 555 orang.

Sumber Data

Data untuk variabel-variabel pembentuk indikator ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari :

- Jumlah penduduk diperoleh dari hasil Sensus Penduduk dan hasil Suvei Penduduk Antar Sensus (Supas)
- Jumlah mobil penumpang diperoleh dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Ditlantas POLRI) di DKI Jakarta dan Kepolisian Daerah (POLDA).

Level Penyajian

- Data mengenai jumlah penduduk disajikan hingga level kabupaten
- Data mengenai jumlah mobil penumpang disajikan hingga level provinsi

Publikasi

Belum ada publikasi yang menyajikan indikator ini. Namun untuk variabel pembentuknya yaitu jumlah penduduk dapat dilihat dalam Statistik Indonesia, Daerah Dalam Angka, sedangkan jumlah mobil penumpang dapat dilihat dalam publikasi Statistik Transportasi.

Penyedia Informasi

- Jumlah penduduk: Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- Jumlah kendaraan bermotor: Direktorat Distribusi

Keterbatasan

-

Implementasi

Rasio Penduduk terhadap Mobil Penumpang di provinsi Sumatera Utara Tahun 1993-1999

Tahun	RPMP
1993	838,95
1994	725,85
1995	630,99
1996	546,04
1997	497,59
1998	503,52
1999	555,26

Perbandingan antara jumlah penduduk dengan mobil penumpang umum, selama tahun 1993 sampai 1999 cenderung

menunjukkan penurunan dari sebesar 838,95 orang per-kendaraan menjadi 555,26 orang per-kendaraan. Rasio ini menggambarkan bahwa jumlah fasilitas bus umum dan mobil penumpang yang tersedia cenderung semakin cepat pertambahannya dibandingkan dengan penambahan jumlah penduduk di provinsi Sumatera Utara. Meskipun rasionya cenderung semakin mengecil (khususnya dari tahun 1993 ke tahun 1997) tetapi setelah itu mulai terjadi peningkatan kembali. Dengan adanya penurunan rasio tersebut menunjukkan bahwa fasilitas yang tersedia relatif sudah cukup memenuhi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dalam artian seharusnya sekarang masyarakat dapat menikmati fasilitas jasa transportasi secara lebih nyaman.

Rasio Penduduk terhadap Kendaraan Bermotor

Konsep dan Definisi

Perbandingan dari jumlah penduduk terhadap jumlah kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik, digunakan untuk angkutan orang atau barang di jalan selain kendaraan yang berjalan di atas rel, yang tercatat di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Ditlantas POLRI) di DKI Jakarta dan Kepolisian Daerah (POLDA). Kendaraan bermotor yang dicatat adalah semua jenis kendaraan kecuali kendaraan bermotor TNI/Polri dan Korps Diplomatik.

Manfaat

Dapat menggambarkan rata-rata jumlah penduduk untuk setiap unit kendaraan bermotor.

Rumus

$$RPKB = \frac{JP}{JKB}$$

RPKB : Rasio penduduk terhadap kendaraan bermotor

JP : Total jumlah penduduk

JKB : Total jumlah kendaraan bermotor

Interpretasi

Jika rasio penduduk terhadap kendaraan bermotor tahun 1999 adalah 10,74 berarti bahwa pada tahun 1999 setiap unit kendaraan bermotor disediakan untuk 11 orang penduduk.

Sumber Data

- Data untuk variabel-variabel pembentuk indikator ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari :
- Jumlah penduduk diperoleh dari hasil Sensus Penduduk dan hasil Suvei Penduduk Antar Sensus (Supas)
- Jumlah kendaraan bermotor diperoleh dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Ditlantas POLRI) di DKI Jakarta dan Kepolisian Daerah (POLDA).

Level Penyajian

- Data mengenai jumlah penduduk disajikan hingga level kabupaten
- Data mengenai jumlah kendaraan bermotor disajikan hingga level provinsi

Publikasi

Belum ada publikasi yang menyajikan indikator ini. Namun untuk variabel pembentuknya yaitu jumlah penduduk dapat dilihat dalam Statistik Indonesia, Daerah Dalam Angka sedangkan kendaraan bermotor dapat dilihat dalam publikasi Statistik Transportasi.

Penyedia Informasi

- Jumlah penduduk: Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- Jumlah Kendaraan bermotor: Direktorat Distribusi

Keterbatasan

-

Implementasi

Tahun	RPKB
1993	13,11
1994	12,69
1995	11,84
1996	11,92
1997	10,97
1998	10,89
1999	10,74

Data rasio perbandingan antara jumlah penduduk provinsi Sumatera Utara dengan jumlah kendaraan bermotor (mobil penumpang, bus, gerobak, dan sepeda motor) cenderung menunjukkan penurunan antara tahun 1993 sampai dengan 1999. Data tersebut menggambarkan “**potensial**” produksi (penduduk) terhadap fasilitas moda transportasi yang tersedia. Jika rasio pada tahun 1993 adalah sebesar 13,11, menunjukkan bahwa satu kendaraan bermotor disediakan bagi 13,11 orang, maka pada tahun 1999 rasio ini menurun menjadi sebesar 10,74 orang per moda. Dengan rasio tersebut dapat dikatakan bahwa dari tahun 1993 sampai dengan 1999 pelayanan transportasi jalan di provinsi Sumatera Utara kemungkinan akan semakin membaik. Dalam artian kapasitas muat yang tersedia akan lebih luas (besar), sehingga akan mengurangi kepadatan penumpang.

Rasio Penduduk terhadap Bus Umum

Konsep dan Definisi

Perbandingan antara jumlah penduduk di suatu daerah dengan jumlah bus umum.

Manfaat

Dapat menggambarkan potensial produksi (penduduk) terhadap fasilitas bus umum yang tersedia.

Rumus

$$RPBU = \frac{JP}{JBU}$$

RPBU : Rasio Penduduk terhadap Bus Umum (orang/kendaraan)

JP : Total jumlah penduduk

JBU : Total jumlah bus umum

Interpretasi

Jika rasio penduduk terhadap bus umum pada tahun 1993 sebesar 2006,01 maka dapat dikatakan bahwa setiap satu kendaraan bus umum disediakan untuk kurang lebih 2006 orang.

Sumber Data

Data untuk variabel-variabel pembentuk indikator ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari :

- Jumlah penduduk diperoleh dari hasil Sensus Penduduk, hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), dan hasil proyeksi.
- Jumlah bus umum diperoleh dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Ditlantas POLRI) di DKI Jakarta dan Kepolisian Daerah (POLDA).

Level Penyajian

- Data mengenai jumlah penduduk disajikan hingga level kabupaten
- Data mengenai jumlah bus umum disajikan hingga level provinsi.

Publikasi

Belum ada publikasi yang menyajikan indikator ini. Namun untuk variabel pembentuknya yaitu jumlah penduduk dapat dilihat dalam Statistik Indonesia, Daerah Dalam Angka sedangkan jumlah bus umum dapat dilihat dalam publikasi Statistik Transportasi.

Penyedia Informasi

- Jumlah penduduk: Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- Jumlah kendaraan bermotor: Direktorat Distribusi

Keterbatasan

-

Implementasi

Rasio Penduduk terhadap Bus Umum di provinsi Sumatera Utara Tahun 1993-1999

Tahun	RPBU
1993	2006,01
1994	1682,99
1995	1655,26
1996	1734,89
1997	1517,53
1998	1534,48
1999	1629,47

Perbandingan antara jumlah penduduk di provinsi Sumatera Utara dengan jumlah bus umum pada periode yang sama, pada tahun 1993 setia satu

kendaraan bus umum disediakan untuk kurang lebih 2.006,01 orang maka pada tahun 1999 setiap satu bus digunakan untuk melayani 1.629,47 orang. Penurunan tingkat kapasitas muatan yang terjadi pada tahun 1996 dan 1997 (dari 1.734,89 menjadi 1.517,53 orang per kendaraan) disebabkan oleh dampak dari krisis ekonomi dimana ada sebagian besar penduduk yang mengurangi frekuensi perjalanannya. Meskipun demikian pada tahun 1998 dan 1999 rasio tersebut sudah menunjukkan peningkatan kembali masing-masing sebesar 1.534,48 dan 1.629,47.

Jumlah Kendaraan Bermotor

Konsep dan Definisi

Jumlah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut, biasanya untuk angkutan orang atau barang di atas jalan raya selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor yang dicatat adalah semua jenis kendaraan kecuali kendaraan bermotor TNI/Polri dan Korps Diplomatik. Data yang disajikan dalam bentuk data berkala tahunan.

Manfaat

Dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam pengembangan infrastruktur jalan, selain itu juga dapat mencerminkan tingkat kemakmuran masyarakat.

Rumus

Jumlah kendaraan bermotor dirinci menurut jenis kendaraan.

Interpretasi

Jika jumlah kendaraan bermotor pada tahun X adalah 1.000.000 berarti ada 1.000.000 buah kendaraan bermotor yang telah tercatat di Kepolisian Republik Indonesia maupun di Kepolisian Daerah, tidak termasuk di dalamnya kendaraan bermotor TNI/POLRI dan Korps Diplomatik.

Sumber Data

Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Ditlantas POLRI) di DKI Jakarta dan Kepolisian Daerah (POLDA).

Publikasi

Statistik Transportasi.

Penyedia Informasi

Direktorat Distribusi.

Keterbatasan

-

Implementasi

1,4 Unit Kendaraan Bermotor Macetkan Jalan Kaltim

Samarinda (ANTARANews - Kaltim)- Di provinsi Kaltim yang berpenduduk 3,5 juta jiwa, memiliki kendaraan bermotor 1,4 juta unit, inilah yang menyebabkan seringnya terjadi kemacetan lalu lintas terutama di Kota Samarinda.

Kepala Bidang Integrasi, Pengolahan dan Desiminasi Statistik (IPDS)- Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Achmad Zaini di Samarinda, Selasa mengatakan setiap tahun jumlah kendaraan bertambah banyak namun panjang jalan hanya bertambah sedikit sehingga kemacetan terus terjadi.

Pada jalan provinsi (jalan negara) misalnya, lanjut Zaini, sejak 2004 hingga 2009 berdasarkan data yang dia kumpulkan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kaltim, tidak ada perubahan, yakni masih tetap sepanjang 1.762,07 km.

Sedangkan total jalan kabupaten dan kota di seluruh Kaltim terjadi perubahan tipis, yakni dari sepanjang 5.283, 04 km pada 2007, bertambah tipis menjadi sepanjang 5.702,04 pada 2008, dan pada 2009 terjadi penambahan jalan agak lumayan yang menjadi sepanjang 8.116,13 km.

Sementara itu dari tahun ke tahun jumlah kendaraan yang harus menggunakan jalan yang ada selalu bertambah, pada 2007 misalnya, kendaran bermotor yang beroperasi di Kaltim hanya berjumlah 1.080.905, namun pada 2009 naik menjadi 1.404.472 kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

Dari jumlah 1,4 juta kendaraan tersebut, kendaraan yang beroperasi terbanyak adalah di Kota Samarinda yang mencapai 402.817 unit, sementara panjang jalan milik Samarinda hanya 536,42 km, sehingga di lokasi dan saat-saat tertentu terjadi kemacetan panjang.

Sejumlah jalan di Samarinda yang sering macet pada jam-jam tertentu itu antara lain, Jl RE Martadinata-Slamet Riyadi hingga Jembatan Mahakam, kemudian di sekitar Pasar Pagi, Pasar Sungai Dama, Jl. Basuki Rahmat, dan hampir semua jalan yang berada di tengah kota.

Jumlah kendaraan terbanyak kedua adalah di Kota Balikpapan yang mencapai 324.636 unit, sementara panjang jalan yang dimiliki sepanjang 418,43 km.

Kemacetan di kota minyak ini tidak begitu terjadi meski tingkat kepadatan kendaraannya hampir sama dengan Samarinda, pasalnya di Balikpapan lebih rapi dalam pengaturan jalan dan lalu lintasnya.

Daerah yang memiliki jumlah kendaraan terbanyak ketiga adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, yakni sejumlah 186.169 unit kendaraan roda dua dan roda empat, sedangkan panjang jalan yang dimiliki kabupaten terkaya tersebut sepanjang 1.499,47 km.

Kendaraan terbanyak keempat berada di Kota Bontang dengan jumlah sebanyak 99.945 unit roda dua dan roda empat, sementara panjang jalan yang dimiliki kota ini hanya sepanjang 158,03 km.

Kendaraan terbanyak kelima berada di Kabupaten Paser dengan jumlah kendaraan sebanyak 85.893 unit, sementara jalan yang dimiliki daerah yang terletak paling Selatan provinsi Kaltim ini sepanjang 707,79 km.

Sumber:

www.kaltim.antaranews.com/berita/3311/14-unit-kendaraan-bermotor-macetkan-jalan-kaltim

Tanggal akses : 16 November 2010

Panjang Jalan

Konsep dan Definisi

Panjang prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Data yang disajikan adalah semua jalan di Indonesia baik di bawah wewenang pemerintah pusat maupun tingkat I dan tingkat II. Data mengenai panjang jalan juga disajikan menurut kondisi jalan (baik, sedang, rusak, dan rusak berat) serta menurut jenis permukaan (aspal, kerikil, tanah, dan lainnya).

Rumus

Data mengenai panjang jalan diperoleh dari Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, dan Dinas Pekerjaan Umum Pemprov/Pemkab/Pemkot melalui dokumen yang disebut PJ II/5 dan PJ II/6

Manfaat

Dapat menunjukkan sejauh mana perkembangan pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia.

Interpretasi

Jika pada tahun X panjang jalan yang ada di Indonesia adalah 1.000.000 berarti ada 1.000.000 km jalan yang telah dibangun di Indonesia, dirinci menurut tingkat kewenangan, kondisi jalan dan jenis permukaannya.

Sumber Data

Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, dan Dinas Pekerjaan Umum Pemprop/Pemkab/Pemkot.

Level Penyajian

-

Publikasi

Statistik Transportasi.

Penyedia Informasi

Direktorat Distribusi.

Keterbatasan

-

Rasio Kendaraan Bermotor terhadap Panjang Jalan

Konsep dan Definisi

Perbandingan dari banyaknya kendaraan bermotor terhadap panjang jalan.

Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik, digunakan untuk angkutan orang atau barang di jalan selain kendaraan yang berjalan di atas rel, yang tercatat di Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Ditlantas POLRI) di DKI Jakarta dan Kepolisian Daerah (POLDA). Kendaraan bermotor yang dicatat adalah semua jenis kendaraan kecuali kendaraan bermotor TNI/Polri dan Korps Diplomatik.

Sedangkan untuk jalan meliputi semua jalan di Indonesia yang ada di bawah wewenang pemerintah pusat maupun tingkat I dan tingkat II.

Manfaat

Untuk mengetahui kepadatan kendaraan bermotor yang berada di jalan.

Rumus

$$RKBPJ = \frac{\text{jumlah kendaraan bermotor}}{\text{panjang jalan}}$$

Keterangan:

RKBPJ : rasio kendaraan bermotor terhadap panjang jalan (unit/kilometer)

jml kendaraan : banyaknya kendaraan bermotor yang ada di suatu wilayah (unit)

panjang jalan : panjang jalan di suatu wilayah (kilometer)

Interpretasi

Jika pada tahun 1999 rasio kendaraan bermotor terhadap panjang jalan adalah 35,23 berarti bahwa pada tahun 1999 setiap km jalan dipadati oleh kurang lebih 35 unit kendaraan bermotor.

Sumber Data

Data untuk variabel-variabel pembentuk indikator ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari :

- Jumlah kendaraan bermotor diperoleh dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Ditlantas POLRI) di DKI Jakarta dan Kepolisian Daerah (POLDA).
- Panjang jalan diperoleh Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, dan Dinas Pekerjaan Umum Pemprov/Pemkab/Pemkot.

Level Penyajian

Provinsi

Publikasi

Belum ada publikasi yang menyajikan indikator ini. Namun, untuk variabel pembentuknya yaitu jumlah kendaraan bermotor dan panjang jalan bisa didapatkan pada publikasi Statistik Transportasi.

Penyedia Informasi

Direktorat Distribusi

Keterbatasan

-

Implementasi

Rasio Kendaraan Bermotor terhadap Panjang Jalan di provinsi Sumatra Utara Tahun 1993-1999

Tahun	RKBJP
1993	26,29
1994	26,96
1995	29,18
1996	30,61
1997	33,57
1998	34,42
1999	35,23

Bila dilihat perbandingan antara jumlah kendaraan bermotor dengan panjang jalan nampak rasionya semakin membesar dari tahun 1993 ke tahun 1999, yaitu dari 26,29 pada tahun 1993 menjadi 35,23 pada tahun 1999. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap satu kilometer jalan akan semakin dipadati oleh kendaraan bermotor, dalam artian bahwa pembangunan penambahan panjang jalan tidak secepat dan tidak sebanding dengan penambahan jumlah kendaraan bermotor. Meningkatnya kepadatan ini tentunya akan menimbulkan efek terhadap kemacetan lalu lintas apabila kapasitas jalan dipakai secara penuh, khususnya pada waktu-waktu tertentu.

Sumber:

Laporan Akhir: Studi Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Transportasi
Wilayah dengan Model Pendekatan I-O,
Desember 2000, Departemen
Perhubungan & Badan Pusat Statistik

<http://www.bps.go.id>

Pendidikan

Angka Melek Huruf (AMH)

(*Adult Literacy Rate*)

Konsep dan Definisi

Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis Huruf Latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Manfaat

Untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Rumus

$$AMH_{15+}^t = \frac{MH_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$$

$$ABH_{15+}^t = \frac{BH_{15+}^t}{P_{15+}^t} \times 100$$

Dimana:

AMH_{15+}^t : Angka melek huruf (15+) pada tahun ke-t

ABH_{15+}^t : Angka buta huruf (15+) pada tahun ke-t

MH_{15+}^t : Jumlah penduduk yang melek huruf (15+) pada tahun ke-t

BH_{15+}^t : Jumlah penduduk yang buta huruf (15+) pada tahun ke-t

P_{15+}^t : Jumlah penduduk (15+) pada tahun ke-t

$$AMH_{15+}^t + ABH_{15+}^t = 100\%$$

Interpretasi

Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

Sumber Data

Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Publikasi

Statistik Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia, Indikator Kesejahteraan Rakyat.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dan Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik.

Keterbatasan

Belum mencakup kriteria mampu melakukan penghitungan sederhana (pengurangan dan penjumlahan) dan kriteria mampu berkomunikasi menggunakan Bahasa Daerah dan Bahasa Indonesia secara lisan.

Implementasi

Tabel Angka Melek Huruf dan Peringkatnya Menurut provinsi, Tahun 2007-2008.

Provinsi	AMH		Peringkat Provinsi	
	2007	2008	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
NAD	96,20	96,20	8	10
SUMATERA UTARA	97,03	97,08	6	6
SUMATERA BARAT	96,10	96,66	9	8
RIAU	97,80	97,81	4	4
JAMBI	96,00	96,05	10*	11
SUMATERA SELATAN	96,66	97,05	7	7
BENGKULU	94,69	94,87	20	20
LAMPUNG	93,47	93,63	21	21
KEP. BANGKA BELITUNG	95,40	95,57	15	16
KEPULAUAN RIAU	96,00	96,00	10*	12
DKI JAKARTA	98,76	98,76	2	2
JAWA BARAT	95,32	95,53	16	17
JAWA TENGAH	88,62	89,24	25	26
D I YOGYAKARTA	87,78	89,46	26	24
JAWA TIMUR	87,42	87,43	27	28
BANTEN	95,60	95,60	14	15
BALI	86,21	86,94	31	30
NUSA TENGGARA BARAT	80,10	80,13	32	32
NUSA TENGGARA TIMUR	87,25	87,66	28	27
KALIMANTAN BARAT	89,40	89,40	24	25
KALIMANTAN TENGAH	97,50	97,67	5	5
KALIMANTAN SELATAN	95,26	95,30	17	19
KALIMANTAN TIMUR	95,70	96,36	13	9
SULAWESI UTARA	99,30	99,31	1	1
SULAWESI TENGAH	94,94	95,68	19	14
SULAWESI SELATAN	86,24	86,53	30	31
SULAWESI TENGGARA	91,30	91,42	22	23
GORONTALO	95,75	95,75	12	13
SULAWESI BARAT	86,40	87,31	29	29
MALUKU	98,00	98,12	3	3
MALUKU UTARA	95,20	95,44	18	18
PAPUA BARAT	90,32	92,15	23	22
PAPUA	75,41	75,41	33	33
Indonesia	91,87	92,19		

Dilihat menurut provinsi, pada periode 2007-2008, Sulawesi Utara memiliki AMH tertinggi, yaitu mencapai 99,31 persen yang kemudian diikuti oleh DKI Jakarta di peringkat ke dua tertinggi sebesar 98,76 persen dan Maluku di peringkat ketiga tertinggi sebesar 98,12 persen. Sementara itu, dilain pihak, Papua menjadi provinsi yang memiliki AMH

terendah yaitu sebesar 75,41 persen, kemudian diikuti oleh Nusa Tenggara Barat di peringkat dua terendah dengan AMH sebesar 80,13 persen dan Sulawesi Selatan di peringkat tiga terendah dengan AMH sebesar 86,53 persen.

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Gross Enrolment Ratio (GER)

Konsep dan Definisi

Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2009 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan.

Manfaat

Untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan.

Rumus

Angka Partisipasi Kasar diperoleh dengan membagi jumlah murid (atau mahasiswa) terdaftar di tingkat pendidikan tertentu tanpa memperhitungkan usia pendidikan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia yang sesuai dengan tingkat pendidikan.

$$APK \text{ SD/MI} = \frac{P_{SD/MI}}{P_{7-12}} \times 100\%$$

$$APK \text{ SLTP/MTs} = \frac{P_{SLTP/MTs}}{P_{13-15}} \times 100\%$$

$$APK \text{ SLTA/MA} = \frac{P_{SLTA/MA}}{P_{16-18}} \times 100\%$$

$P_{SD/MI}$: Jumlah penduduk yang sekolah di SD/MI.

P_{7-12} : Jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

$P_{SLTP/MTs}$: Jumlah penduduk yang sekolah di SLTP/MTs.

P_{13-15} : Jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

$P_{SLTA/MA}$: Jumlah penduduk yang sekolah di SLTA/MA.

P_{16-18} : Jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

Penduduk usia kelompok umur a yang sesuai dengan tingkat pendidikan h pada tahun sekolah ke-t.

Interpretasi

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih daripada target yang sesungguhnya

Sumber Data

Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Proyeksi Penduduk, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Level Penyajian

-

Publikasi

Statistik Pendidikan

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat,

Keterbatasan

APK dapat melebihi 100 persen akibat dimasukkannya penduduk yang berpartisipasi sekolah berada di bawah

umur dan atau melebihi umur karena lebih awal atau terlambat mendaftar, dan mengulang kelas.

<http://www.bps.go.id>

Angka Partisipasi Murni (APM)

Net Enrolment Rate (NER)

Konsep dan Definisi

Proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan.

Manfaat

Untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya.

Rumus/Metode Penghitungan

APM pada suatu jenjang pendidikan diperoleh dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut.

$$APM\ SD = \frac{P_{7-12}SD}{P_{7-12}} \times 100\%$$

$$APM\ SMP = \frac{P_{13-15}SMP}{P_{13-15}} \times 100\%$$

$$APM\ SM = \frac{P_{16-18}SM}{P_{16-18}} \times 100\%$$

$P_{7-12}\ SD$: Jumlah penduduk usia 7-12 yang sekolah di SD

P_{7-12} : Jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

$P_{13-15}SMP$: Jumlah penduduk usia 13-15 yang sekolah di SMP

P_{13-15} : Jumlah penduduk usia 13-15 tahun

$P_{16-18}SM$: Jumlah penduduk usia 16-12 yang sekolah di SM

P_{16-18} : Jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

Interpretasi

APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang pendidikannya.

Sumber Data

Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Level Penyajian

Nasional dan provinsi

Publikasi

Statistik Pendidikan dan Indikator Kesejahteraan Rakyat

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dan Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik.

Keterbatasan

- Untuk pendidikan tinggi, tidak relevan karena kesulitan dalam menentukan kelompok umur yang tepat karena banyaknya variasi dalam lamanya program-program di tingkat pendidikan ini. Mengenai pendidikan dasar dan menengah, kesulitan mungkin timbul ketika menghitung nilai APM yang mendekati 100% jika:
- referensi tanggal untuk masuk ke pendidikan dasar tidak bertepatan dengan tanggal lahir dari semua

kelompok yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri pada tingkat pendidikan;

- porsi yang signifikan dari penduduk yang memulai sekolah dasar lebih awal dari usia yang ditentukan sebelumnya dan akibatnya menyelesaikannya juga lebih awal;
- terdapat peningkatan di pintu masuk usia untuk pendidikan dasar namun lamanya pendidikan dasar tetap tidak berubah.

<http://www.bps.go.id>

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

School Enrolment Rate

Konsep dan Definisi

Proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada satu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan.

Manfaat

Untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu.

Rumus

$$APS_{7-12} = \frac{P_{7-12} \text{ Masih sekolah}}{P_{7-12}} \times 100\%$$

$$APS_{13-15} = \frac{P_{13-15} \text{ Masih sekolah}}{P_{13-15}} \times 100\%$$

$$APS_{16-18} = \frac{P_{16-18} \text{ Masih sekolah}}{P_{16-18}} \times 100\%$$

P_{7-12} Masih sekolah : Jumlah penduduk usia 7-12 yang masih sekolah

P_{13-15} Masih sekolah : Jumlah penduduk usia 13-15 yang masih sekolah

P_{16-18} Masih sekolah : Jumlah penduduk usia 16-12 yang masih sekolah

P_{7-12} : Jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

P_{13-15} : Jumlah penduduk usia 13-15 tahun.

P_{16-18} : Jumlah penduduk usia 16-18 tahun

Interpretasi

APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS setiap kelompok umur.

Sumber Data

Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Level Penyajian

Nasional dan provinsi

Publikasi

Statistik Pendidikan dan Indikator Kesejahteraan Rakyat

Penyedia Informasi

- Direktorat Kesejahteraan Rakyat
- Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Keterbatasan

Indikator ini tidak memberikan gambaran tentang jenjang pendidikan yang sedang dijalani.

Implementasi

Tingkat Pendidikan di provinsi Papua Barat

Proses peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang pada gilirannya merupakan modal investasi manusia bagi kepentingan pembangunan daerah,

bahkan sampai pada tingkat nasional. Pembangunan pendidikan yang masih menempati posisi penting dalam skala prioritas ini akan terus ditingkatkan, program wajib belajar 9 tahun bagi pendidikan dasar terus digalakkan sehingga diharapkan seluruh anak-anak usia sekolah dapat memasuki jejang pendidikan dasar.

Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2004 di provinsi Papua Barat, persentase penduduk berumur 10 tahun yang buta huruf di provinsi Papua Barat pada tahun 2004 sebesar 9,45 persen dengan angka tertinggi terdapat di Kabupaten Manokwari yaitu sebesar 51,80 persen dan angka terendah berada di Kabupaten Fakfak dan Raja Ampat yaitu sebesar 1,30 persen.

Komposisi persentase pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk usia 10 tahun ke atas di provinsi Papua Barat pada tahun 2004 adalah tamat sekolah dasar menempati urutan tertinggi dengan jumlah sebesar 35,88 persen, sementara tidak tamat SD sebesar 19,63 persen, tidak/belum pernah sekolah 6,05 persen dan yang SLTP dan SMU masing-masing sebesar 18,30 persen dan 12,23 persen. Sementara untuk SLTA kejuruan, akademi dan yang sempat lulus sarjana masing-masing sebesar 4,87 persen, 0,60 persen dan 1,83 persen.

Angka partisipasi murni untuk SD, SLTP dan SLTA di provinsi Papua Barat tahun 2004 tertinggi dicapai pada tingkat Sekolah Dasar (SD) yaitu 83,41 persen disusul SLTP sebesar 73,89 persen dan SLTA sebesar 45,01 persen.

Persentase penduduk 5 tahun keatas yang masih sekolah di provinsi Papua Barat tahun 2004 masih didominasi oleh kelompok umur 25 tahun keatas yaitu sebesar 50,60 persen dan yang terendah adalah kelompok umur 5 - 6 tahun.

Sumber:

<http://www.batukar.info/wiki/pendidikan-papua-barat>

Tanggal akses : 27 Desember 2010

Rata-Rata Lama Sekolah

Mean Years School (MYS)

Konsep dan Definisi

Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi tentang:

- Partisipasi sekolah
- Jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki
- Ijasah tertinggi yang dimiliki
- Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki

Manfaat

Untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal.

Rumus

Rata-rata Lama Sekolah untuk yang partisipasi sekolahnya Masih Bersekolah dan Tidak Bersekolah Lagi namun tidak Tamat:

MYS = Tahun Konversi + Kelas Tertinggi yang pernah diduduki - 1

Rata-rata Lama Sekolah untuk yang partisipasi sekolahnya Tidak Bersekolah Lagi namun sudah Tamat :

MYS = Tahun Konversi + Kelas Tertinggi yang pernah diduduki - 1

Adapun Tahun Konversi dari Pendidikan yang Ditamatkan adalah:

SD : 6 tahun

SMP : 9 tahun

SM : 12 tahun

Diploma I : 13 tahun

Diploma II : 14 tahun

Akademik/Diploma III : 15 tahun

Sarjana/Diploma IV : 16 tahun

Pasca Sarjana : 18 tahun

Doktor : 21 tahun

Interpretasi

Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Sumber Data

Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Publikasi

Statistik Pendidikan dan Indikator Kesejahteraan Rakyat

Penyedia Informasi

Direktorat Kesejahteraan Rakyat dan Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Keterbatasan

Harus disamakan di setiap negara/wilayah. Selain itu, sebagai indikator ini tidak secara langsung memperhitungkan efek pengulangan, yang mungkin tidak ketat antar satu wilayah dengan lainnya bila dibandingkan.

Implementasi

Tabel Rata-rata Lama Sekolah dan Peringkatnya Menurut provinsi, Tahun 2007-2008

Provinsi	Rata2 Lama Sekolah		Peringkat Provinsi	
	2007	2008	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
NAD	8,50	8,50	9	10
SUMATERA UTARA	8,60	8,60	5*	6*
SUMATERA BARAT	8,18	8,26	11	11
RIAU	8,40	8,51	10	9
JAMBI	7,63	7,63	18	19
SUMATERA SELATAN	7,60	7,60	19	20
BENGKULU	8,00	8,00	13*	13*
LAMPUNG	7,30	7,30	23	24
KEP. BANGKA BELITUNG	7,18	7,37	25	23
KEPULAUAN RIAU	8,94	8,94	2	2
DKI JAKARTA	10,80	10,80	1	1
JAWA BARAT	7,50	7,50	21	21
JAWA TENGAH	6,80	6,86	28	29
D I YOGYAKARTA	8,59	8,71	8	5
JAWA TIMUR	6,90	6,95	27	27
BANTEN	8,10	8,10	12	12
BALI	7,60	7,81	20	15*
NUSA TENGGARA BARAT	6,70	6,70	29*	30*
NUSA TENGGARA TIMUR	6,42	6,55	33	32
KALIMANTAN BARAT	6,70	6,70	29*	30*
KALIMANTAN TENGAH	8,00	8,00	13*	13*
KALIMANTAN SELATAN	7,40	7,44	22	22
KALIMANTAN TIMUR	8,80	8,80	3*	3*
SULAWESI UTARA	8,80	8,80	3*	3*
SULAWESI TENGAH	7,73	7,81	15	15*
SULAWESI SELATAN	7,23	7,23	24	25
SULAWESI TENGGARA	7,71	7,74	16	17
GORONTALO	6,91	6,91	26	28
SULAWESI BARAT	6,51	6,99	32	26
MALUKU	8,60	8,60	5*	6*
MALUKU UTARA	8,60	8,60	5*	6*
PAPUA BARAT	7,65	7,67	17	18
PAPUA	6,52	6,52	31	33
Indonesia	7,47	7,52		

Dilihat menurut peringkat Rata-rata Lama Sekolah provinsi pada tahun 2008 DKI Jakarta sebagai ibukota negara memiliki rata-rata lama sekolah paling tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lainnya, yaitu mencapai 10,8 tahun. Tertinggi kedua adalah provinsi

Kepulauan Riau dengan rata-rata lama sekolah sebesar 8,94 tahun dan tertinggi ketiga adalah Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara, yaitu masing-masing sebesar 8,8 tahun. provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kota pelajar berada di urutan 5 dengan

rata-rata lama sekolah sebesar 8,71 tahun.

Sementara itu, di lain pihak, provinsi dengan rata-rata lama sekolah terendah adalah Papua, yaitu sebesar 6,52 tahun, kemudian diikuti oleh Nusa Tenggara Timur pada peringkat kedua terendah sebesar 6,55 tahun. Sedangkan untuk peringkat ketiga terendah ditempati oleh dua provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Barat yang masing-masing memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 6,7 tahun. Rendahnya pencapaian rata-rata lama sekolah dikarenakan masih tingginya persentase penduduk yang tidak/belum sekolah di provinsi-provinsi tersebut.

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Angka Putus Sekolah

Drop out Rate

Konsep dan Definisi

Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun.

Manfaat

Untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15, dan 16-18 tahun).

Rumus

Angka putus sekolah kelompok umur 7-12 tahun

$$APTS_{7-12} = \frac{P_{7-12(PTS)}}{P_{7-12}}$$

Angka putus sekolah kelompok umur 13-15 tahun

$$APTS_{13-15} = \frac{P_{13-15(PTS)}}{P_{13-15}}$$

Angka putus sekolah kelompok umur 16-18 tahun

$$APTS_{16-18} = \frac{P_{16-18(PTS)}}{P_{16-18}}$$

Dimana:

$P_{7-12(PTS)}$: Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi (putus sekolah).

$P_{13-15(PTS)}$: Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah lagi (putus sekolah).

$P_{16-18(PTS)}$: Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah lagi (putus sekolah).

P_{7-12} : Jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah (amat dan yang tidak amat).

P_{13-15} : Jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang atau pernah bersekolah (amat dan yang tidak amat).

P_{16-18} : Jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang sedang atau pernah bersekolah (amat dan yang tidak amat).

Interpretasi

Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Contoh $APTS_{7-12} = 10,11\%$ berarti secara rata-rata dari 100 anak usia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 10 sampai 11 anak yang putussekolah dan lebih cenderung 10 anak yang putus sekolah.

Sumber Data

Susenas KOR.

Publikasi

Indikator Kesejahteraan Rakyat.

Level Penyajian

Nasional.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat dan Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Keterbatasan

Tidak dapat menjelaskan fenomena yang menyebabkan anak putus sekolah.

Implementasi

PEKANBARU, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan provinsi Riau menyatakan, perkiraan angka putus sekolah di daerah kaya minyak itu kini mencapai 18.000 anak. Minimnya pengetahuan orang tua dinilai berkontribusi pada terhentinya keberlanjutan pendidikan anak-anak usia sekolah di kawasan tersebut.

"Estimasi anak usia sekolah yang memutuskan tidak melanjutkan pendidikan itu mencapai 18 ribu atau 20 persen dari setiap jenjang mulai SD hingga SMA," kata Kepala Dinas Pendidikan provinsi Riau Irwan Effendi, di Pekanbaru, Senin (26/7/2010).

Irwan menjelaskan, pihaknya telah berupaya maksimal agar anak-anak di Riau dapat melanjutkan program pendidikannya. Namun, seringkali hal itu berbenturan dengan minimnya pengetahuan orang tua, sehingga keberlanjutan pendidikan anak-anak usia sekolah terpaksa terhenti.

"Jadi, mereka tidak melanjutkan sekolah karena keinginan sendiri. Hal ini sangatlah disayangkan sekali," ujarnya.

Meski begitu, kata Irwan, estimasi putus itu masih jauh dari rata-rata anak putus

sekolah secara nasional yang mencapai 30 persen. Karena itu, lanjutnya, pemerintah pusat dan daerah kini sedang berusaha keras mengatasi permasalahan putus sekolah tersebut. Salah satunya dengan menggiatkan sosialisasi wajib belajar 12 tahun, dan memberikan pengertian serta penyadaran atas pentingnya pendidikan sekolah bagi anak kepada orang tua bersangkutan.

"Kita berharap persoalan nasional ini dapat teratasi," ujarnya.

Rasio Murid-Guru

Pupil-Teacher Ratio (PTR)

Konsep dan Definisi

Rata-rata jumlah murid/siswa per guru di tingkat pendidikan tertentu pada tahun ajaran tertentu.

Manfaat

Untuk menggambarkan beban kerja seorang guru dalam mengajar dan untuk melihat mutu pengajaran di kelas.

Rumus

$$\text{Rasio } (M - G)_h^t = \frac{M_h^t}{G_h^t}$$

Keterangan:

Rasio $(M - G)_h^t$: Rasio murid-guru di tingkat pendidikan h pada tahun ajaran t.

M_h^t : Jumlah murid/siswa yang terdaftar di tingkat pendidikan h pada tahun ajaran t.

G_h^t : Jumlah guru yang terdaftar di tingkat pendidikan h pada tahun ajaran t.

Interpretasi

Semakin tinggi nilai rasionya, diduga akan semakin berkurang pengawasan/perhatian guru terhadap murid sehingga kualitas pengajaran akan cenderung semakin rendah. Hal ini umumnya diasumsikan bahwa rasio guru-murid yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil yang memungkinkan para guru untuk lebih memperhatikan individu siswa, yang mungkin dalam jangka panjang menghasilkan performa yang lebih baik dari murid.

Sumber Data

Registrasi Sekolah, Murid dan Guru yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional melalui Dinas Pendidikan di Tingkat Kabupaten/Kota yang dilakukan setiap tahun.

Level Penyajian

Nasional, provinsi dan kabupaten

Publikasi

Statistik Pendidikan, Indikator Kesejahteraan Rakyat.

Publikasi

Statistik Pendidikan dan Indikator Kesejahteraan Rakyat

Penyedia Informasi

Direktorat Kesejahteraan Rakyat dan Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik.

Keterbatasan

Indikator ini tidak memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pengajaran/pembelajaran, seperti perbedaan dalam kualifikasi guru, pelatihan pedagogi, pengalaman dan status, metode pengajaran, kondisi bahan ajar dan variasi di dalam kelas.

Pengeluaran Publik masuk Pendidikan sebagai Persentase dari Total Belanja Pemerintah

Public Expenditure On Education As % Of Total Government Expenditure (PXE)

Konsep dan Definisi

Total pengeluaran publik untuk pendidikan (saat ini dan modal) yang dinyatakan sebagai persentase dari total pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran tertentu.

Manfaat

Untuk melihat kebijakan pemerintah dalam hal investasi di bidang pendidikan yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia.

Rumus

$$\%PXE_t = \frac{PXE_t}{TPX_t} \times 100$$

dimana:

$\%PXE_t$: Persentase belanja publik untuk pendidikan sebagai persentase dari total pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran t

PXE_t : Total pengeluaran publik untuk pendidikan pada tahun anggaran t

TPX_t : Total pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran t

Interpretasi

Tingginya persentase pengeluaran pemerintah untuk pendidikan menunjukkan perhatian pemerintah untuk pendidikan relatif tinggi

dibandingkan untuk investasi publik lainnya, termasuk pertahanan dan keamanan, perawatan kesehatan, jaminan sosial untuk pengangguran dan lanjut usia, dan sektor sosial atau ekonomi lainnya

Sumber Data

Kementerian Keuangan.

Level Penyajian

Nasional.

Publikasi

Keuangan Pemerintah.

Penyedia Informasi

Sub Direktorat Statistik Keuangan
Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi dan Pariwisata.

Keterbatasan

Perbedaan tahun fiskal dan periode anggaran pendidikan mungkin akan menjadi masalah yang harus dipertimbangkan. Dalam beberapa kasus, data total pengeluaran pemerintah untuk pendidikan hanya mengacu pada anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional tanpa memperhatikan pengeluaran pendidikan dari instansi lainnya.

<http://www.bps.go.id>

Kesehatan

Persentase Balita yang Ditolong Penolong Kelahiran

Percentage of Children Under Five by Birth Attendants

Konsep dan Definisi

Persentase balita (0-59 bulan) yang proses kelahirannya dibantu oleh tenaga penolong kelahiran yang terbagi menjadi nakes (tenaga kesehatan/medis) dan non-nakes (tenaga non-medis).

Yang termasuk nakes antara lain dokter, bidan, mantri kesehatan, dll. Non-nakes diantaranya tradisional, dukun bayi, paraji, dll.

Manfaat

Memberikan gambaran tentang tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum.

Rumus

$$\% \text{ bayi lahir ditolong nakes} = \frac{a}{b}$$

$$\% \text{ bayi lahir ditolong non-nakes} = \frac{c}{b}$$

a : jumlah balita yang ditolong tenaga kesehatan/medis,

b : jumlah bayi,

c : jumlah bayi yang ditolong tenaga non-medis.

Interpretasi

Hasil Susenas tahun 2009 menunjukkan kelahiran yang ditolong bidan sebesar 61,24% artinya bahwa dari seluruh kelahiran yang terjadi pada tahun 2009, sebanyak 61,24 persen-nya ditolong oleh bidan. Dengan kata lain sebagian besar kelahiran bayi sudah ditolong oleh tenaga kesehatan.

Sumber Data

Susenas.

Level Penyajian

Kabupaten.

Publikasi

Indikator Kesejahteraan Rakyat, SDKI.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Keterbatasan

-

Cakupan Imunisasi

Immunization Coverage (CI)

Keterbatasan

-

Konsep dan Definisi

Perbandingan antara jumlah anak usia 1-2 tahun yang telah mendapat imunisasi lengkap dengan jumlah anak usia 1-2 tahun, dan biasanya dinyatakan dalam persen.

Manfaat

Memberikan gambaran tentang tingkat pelayanan kesehatan terhadap anak usia 1-2 tahun. Cakupan yang baik minimal 80 persen.

Rumus

$$CI = \frac{\text{jumlah anak usia 1-2 tahun yang diimunisasi lengkap}}{\text{jumlah anak usia 1-2 tahun}} \times 100\%$$

Interpretasi

Pencapaian *Universal Child Immunization* (UCI) pada dasarnya merupakan proksiterhadap cakupan atas imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0 -11 bulan). Idealnya, seorang anak mendapatkan seluruh imunisasi dasar sesuai umurnya, sehingga kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dapat optimal

Sumber Data

Susenas, Riskesdas

Level Penyajian

Kabupaten

Publikasi

Buku Profil Kesehatan Indonesia, Laporan Riskesdas

Penyedia Informasi

Kementrian Kesehatan

Persentase Balita yang Sudah Diimunisasi Lengkap

Percentage of completely Immunized Baby (PBD)

Konsep dan Defenisi

Perbandingan antara jumlah balita yang diimunisasi DPT sebanyak tiga kali, polio sebanyak tiga kali, BCG dan campak dengan jumlah anak usia < 5tahun, dan biasanya dinyatakan dalam persen.

Manfaat

Indikator ini menggambarkan tingkat pelayanan imunisasi lengkap terhadap balita. Semakin tinggi nilai indicator ini semakin baik program pelayanan kesehatan, dalam hal ini pemberian imunisasi.

Rumus

$$PBD = \frac{\begin{array}{c} \text{Jumlah balita} \\ \text{yang diimunisasi} \\ \text{DPT sebanyak tiga kali,} \\ \text{polio sebanyak tiga kali,} \\ \text{BCG dan campak} \end{array}}{\text{Jumlah anak usia <5 tahun}} \times 100\%$$

Interpretasi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan kunjungan bayi umur 29 hari – 11 bulan di sarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit) maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan sebagainya melalui kunjungan petugas kesehatan. Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali dalam setahun, yaitu satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan Campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK) bayi, dan

penyuluhan perawatan kesehatan bayi. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan

Sumber Data

Susenas, Riskesdas

Level Penyajian

Kabupaten

Publikasi

Buku Profil Kesehatan Indonesia, Laporan Riskesdas

Penyedia Informasi

Kementrian Kesehatan

Keterbatasan

-

Persentase Penduduk Sakit dengan Pengobatan sendiri

Percentage of Sick-People Using Self-Treatment (PSO)

Konsep dan Definisi

Perbandingan antara jumlah penduduk sakit yang diobati sendiri dengan jumlah penduduk yang mengalami keluhan yang menyebabkan kegiatannya terganggu, biasanya dinyatakan dalam persen.

Manfaat

Indikator ini memberikan angka persentase penduduk sakit yang tidak menggunakan sarana kesehatan. Semakin kecil nilai indikator ini semakin tinggi tingkat kesadaran penduduk untuk memanfaatkan sarana kesehatan.

Rumus

$$PSO = \frac{\text{Jumlah penduduk sakit yang diobati sendiri}}{\text{Jumlah penduduk yang mengalami keluhan yang menyebabkan kegiatannya terganggu (penduduk yang sakit)}} \times 100\%$$

Interpretasi

Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dilakukan dengan menerapkan berbagai pendekatan, termasuk di dalamnya dengan melibatkan potensi masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan pengembangan masyarakat. Pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan juga mendorong usaha mandiri dalam melakukan pencegahan maupun pengobatan penyakit yang diderita.

Sumber Data

Susenas, Riskesdas

Level Penyajian

Kabupaten

Publikasi

Indikator Kesejahteraan Rakyat , Laporan Riskesdas

Penyedia Informasi

BPS, Kementerian Kesehatan

Keterbatasan

-

Persentase Penduduk Sakit yang Konsultasi ke Tenaga Medis

Percentage of Sick-People Treated by Trained Paramedics (PKSM)

Konsep dan Definisi

Perbandingan antara jumlah penduduk sakit yang konsultasi ke RS Pemerintah/Swasta, dokter, Puskesmas, Klinik/KIA/BP dan petugas kesehatan dengan jumlah penduduk yang sakit, biasanya dinyatakan dalam persen.

Manfaat

Indikator ini menggambarkan tingkat pemanfaatan tenaga medis untuk konsultasi. Semakin besar nilai indikator ini semakin tinggi tingkat kesadaran penduduk akan kesehatan

Rumus

$$PKSM = \frac{\text{Jumlah penduduk sakit yang konsultasi ke RS Pemerintah/Swasta, Dokter, Puskesmas, Klinik/KIA/BP, dan petugas kesehatan}}{\text{Jumlah penduduk yang sakit}} \times 100\%$$

Interpretasi

Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas di sarana pelayanan kesehatan di masyarakat. Namun demikian banyaknya penduduk yang pergi ke tenaga medis juga dipengaruhi kondisi sosial-ekonomi masyarakat tersebut. Semakin baik kondisinya maka perbandingan antara jumlah yang sakit dengan yang pergi ke tenaga medis semakin besar rasionya.

Sumber Data

Susenas, Riskesdas

Level Penyajian

Kabupaten

Publikasi

Indikator Kesejahteraan Rakyat, Laporan Riskesdas

Penyedia Informasi

BPS, Kementerian Kesehatan

Keterbatasan

-

Persentase Penduduk Sakit yang Menjalani Rawat Inap di RS/Klinik yang Menyediakan Tenaga Medis

Percentage of Hospitalized People (PSRI)

Konsep dan Definisi

Perbandingan antara jumlah penduduk sakit dan menjalani rawat inap di RS Pemerintah/Swasta, praktek dokter, Puskesmas, Klinik/KIA/BP dan praktek petugas kesehatan dengan jumlah penduduk yang sakit, dinyatakan dalam persen.

Manfaat

- Untuk menggambarkan tingkat pemanfaatan sarana kesehatan untuk rawat inap.
- Untuk menggambarkan tingkat penanganan kesehatan yang terjadi di suatu daerah.
- Untuk menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat dalam melakukan pengobatan terhadap penyakit yang dialami.

Rumus

Jumlah penduduk yang sakit dan menjalani rawat inap di RS Pemerintah/Swasta, Praktek dokter, Puskesmas, Klinik/KIA/BP dan praktek petugas kesehatan

$$PSRI = \frac{\text{jumlah penduduk yang sakit}}{\text{jumlah penduduk yang sakit}} \times 100\%$$

Interpretasi

Ruang lingkup pembangunan kesehatan selain upaya promotif dan preventif, di dalamnya juga terdapat pembangunan kesehatan bersifat kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang bergerak dalam kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Rumah sakit juga berfungsi

sebagai sarana pelayanan kesehatan. Sebagai tempat Rujukan dan sarana pelayanan kesehatan sekaligus, pilihan untuk berobat didasari pada jenis dan bobot penyakit. Besarnya indikator pelayanan kesejatan di tingkat dasar dan lanjutan, menunjukkan bobot angka kesakitan dan jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat.

rujukan. **Sumber Data**

Susenas, Riskesdas

Level Penyajian

Kabupaten

Publikasi

Indikator Kesejahteraan Rakyat , Laporan Riskesdas

Penyedia Informasi

BPS, Kementrian Kesehatan

Keterbatasan

-

Fertilitas

Rata-rata Jumlah Anak yang Pernah Dilahirkan/Paritas

Child Ever Born (CEB)

Konsep dan Definisi

Rata-rata jumlah kelahiran sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya.

Manfaat

Mendapatkan suatu informasi tentang *completed family size* yaitu dari rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita kelompok usia 45-49 tahun.

Rumus

$$\text{Paritas} = \frac{CEB_i}{P_i^f}$$

CEB_i : jumlah anak lahir hidup oleh kelompok usia ke- i ;

P_i^f : jumlah wanita kelompok usia ke- i .

Interpretasi

Rata-rata CEB dari wanita usia 45-49 tahun sebesar 4,899 artinya rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita usia 45-49 adalah 4-5 anak. *Completed family size* dari suatu kohor wanita tersebut sebanyak 4–5 anak.

Sumber Data

Sensus Penduduk, SUPAS, SDKI, Registrasi Vital, Susenas pada Keterangan Fertilitas dan KB.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Publikasi

SDKI, Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Penyedia Informasi

- Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
- Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Keterbatasan

Sering terjadi kesalahan pelaporan usia terutama di negara sedang berkembang, adanya kecenderungan semakin tua semakin lupa jumlah anak yang pernah dilahirkan, dan fertilitas wanita yang telah meninggal dianggap sama dengan wanita masih hidup.

Anak Lahir Hidup (ALH)

Children Live Birth (CLB)

Konsep dan Definisi

Banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya.

Manfaat

Mengetahui rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh sekelompok wanita mulai dari masa reproduksi hingga saat wawancara.

Rumus

Rata-rata ALH

$$= \frac{ALH_i}{P_i^f}$$

ALH_i: jumlah anak lahir hidup oleh wanita kelompok usia ke-i;

P_i^f : jumlah wanita kelompok usia ke-i;

i : kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49.

Interpretasi

Rata-rata ALH wanita usia 25-29 sebesar 3,7 artinya kemampuan reproduksi wanita usia 25-29 rata-rata melahirkan 3-4 anak.

Sumber Data

Sensus Penduduk, Susenas, SUPAS.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Publikasi

Statistik Kesejahteraan Rakyat, Laporan Sosial Indonesia (Perkembangan Kondisi Kependudukan dan Program KB).

Penyedia Informasi

Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

Tidak memberikan informasi mengenai kapan kelahiran terjadi, seringkali terjadi salah pencatatan terutamawanita yang sudah tua karena lupa.

Anak Masih Hidup (AMH)

Children Still Alive (CSA)

Konsep dan Definisi

Jumlah anak masih hidup yang dimiliki seorang wanita sampai saat wawancara dilakukan.

Manfaat

Mengetahui jumlah anak yang dimiliki seorang wanita secara riil. Data ini menjadi dasar perhitungan Angka Kematian Bayi (AKB) menggunakan probabilitas bayi mati (*proportion dying*).

Rumus

Jumlahkan seluruh anak yang dilahirkan oleh setiap wanita kawin dan masih hidup sampai saat wawancara.

Interpretasi

Perbandingan antara jumlah ALH dan AMH akan mencerminkan proporsi bayi mati pada tiap-tiap usia. Perbedaan antara ALH dan AMH yang kecil menggambarkan tingkat kematian anak yang rendah. AMH harus lebih kecil atau sama dengan ALH.

Sumber Data

Susenas, Sensus Penduduk, SUPAS.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, Kabupaten.

Publikasi

Statistik Kesejahteraan Rakyat, Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk, Indikator Kesejahteraan Anak.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Keterbatasan

Hanya menggambarkan jumlah anak yang masih hidup yang dimiliki seorang ibu, tidak dijelaskan (apabila terjadi) pada usia berapa anak tersebut meninggal sehingga tidak dapat dijelaskan dengan lebih cermat anak usia berapa yang menyumbang jumlah kematian terbesar.

Angka Kelahiran Kasar

Crude Birth Rate (CBR)

Konsep dan Definisi

Banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama.

Manfaat

Untuk mengetahui tingkat kelahiran yang di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu.

Rumus

$$CBR = \frac{B}{P} \times 1000$$

B : jumlah kelahiran;

P : jumlah penduduk pada pertengahan tahun dimana $P : (P_0 + P_1)/2$,

P_0 : jumlah penduduk pada awal tahun

P_1 : jumlah penduduk pada akhir tahun.

Data jumlah kelahiran hidup dapat diestimasi secara tidak langsung dari data jumlah anak lahir hidup menggunakan *softwaremortality-pack-lite*.

Interpretasi

CBR tahun 2004 sebesar 20, artinya terdapat 20 kelahiran per 1000 penduduk Indonesia pada tahun 2004.

Sumber Data

Sensus Penduduk, Registrasi Vital, SDKI, Susenas.

Level Penyajian

Nasional, provinsi.

Publikasi

SDKI, Laporan Sosial Indonesia (Perkembangan Kondisi Kependudukan dan Program KB).

Penyedia Informasi

Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

Perhitungan CBR mudah dan sederhana tetapi kasar karena yang menjadi pembagi adalah seluruh penduduk baik laki-laki maupun wanita dan seluruh usia termasuk yang bukan usia reproduksi (di luar 15-49 tahun).

Angka Kelahiran Menurut Umur

Age Specific Fertility Rate (ASFR)

Konsep dan Definisi

Banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut kelompok usianya. Pola ASFR membentuk huruf U terbalik.

Kegunaan

Data dasar untuk proyeksi penduduk, mengetahui jumlah penduduk menurut usia dan jenis kelamin dimasa yang akan datang. Pengetahuan tentang ASFR berguna untuk pelaksanaan program KB dan peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

Rumus

$$ASFR_i = \frac{B_i}{P_i} \times 1000$$

$ASFR_i$: $ASFR$ untuk wanita pada kelompok usia ke- i ;

B_i : jumlah kelahiran dari wanita kelompok usia ke- i ;

P_i^f : jumlah wanita pada kelompok usia ke- i ;

i : kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49.

Perhitungan langsung

Dari data 'riwayat kelahiran' SDKI.

Perhitungan tidak langsung

Dari data Sensus Penduduk menggunakan program EastWestPop berdasarkan metode 'anak kandung' atau anak dari daftar ART.

Interpretasi

ASFR pada kelompok usia 25-29 tahun 1999-2004 sebesar 138, artinya terdapat 138 bayi yang dilahirkan oleh 1000 wanita usia 25-29 pada tahun 1999 dan 2004.

Sumber Data

Sensus Penduduk, SUPAS, Registrasi Vital, Susenas, SDKI.

Level Penyajian

Nasional, provinsi.

Publikasi

SDKI, Estimasi Parameter Demografi.

Penyedia Informasi

Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

Sering terjadi kesalahan pelaporan usia ibu dan jumlah anak lahir hidup. Terutama pelaporan bayi yang lahir hidup kemudian meninggal di kalangan wanita berpendidikan rendah di perdesaan.

Angka Kelahiran Total

Total Fertility Rate (TFR)

Konsep dan Definisi

Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya.

Manfaat

Sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan Ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Rumus

$$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$$

ASFR_i : ASFR kelompok usia ke-i;

i : kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49.

Interpretasi

- TFR sebesar 2,35 berarti bahwa wanita(usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 orang anak selama masa usia suburnya.
- TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya, dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi).

Replacement Level (Tingkat Penggantian)

Penduduk Indonesia akan mencapai tingkat penggantian manusia (*replacement level*) apabila TFR mencapai 2,1, seorang ibu akan digantikan oleh seorang anak wanita untuk meneruskan keturunan tetapi tidak menghasilkan pertambahan penduduk yang tinggi yang tidak terkendali.

Sumber Data

Sensus Penduduk, SUPAS, Registrasi Vital, Susenas, SDKI.

Level Penyajian

Nasional, provinsi.

Publikasi

SDKI, Estimasi Parameter Demografi, Proyeksi Penduduk Indonesia, Laporan Sosial Indonesia (Perkembangan Kondisi Kependudukan dan Program KB).

Penyedia Informasi

Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

Sama dengan kelemahan ASFR, ukuran ini membutuhkan data terperinci yaitu banyaknya kelahiran tiap kelompok usia sedangkan data tersebut belum ada di tiap negara/daerah.

Angka Kelahiran Umum

General Fertility Rate (GFR)

Konsep dan Definisi

Jumlah kelahiran hidup per 1000 wanita usia 15-49 atau 15-44 tahun.

Manfaat

Mengetahui kemampuan reproduksi dari kohor wanita usia subur.

Rumus

$$GFR = \frac{B}{P_{15-49}^f} \times 1000$$

atau

$$GFR = \frac{B}{P_{15-44}^f} \times 1000$$

B : jumlah kelahiran

$P_{15-49}^f / P_{15-44}^f$: jumlah wanita usia 15-49
atau 15-44 pada
pertengahan tahun.

Interpretasi

GFR tahun 2004 sebesar 103, artinya terdapat 103 kelahiran hidup oleh wanita usia subur (15-49 tahun).

Sumber Data

Sensus Penduduk, SUPAS, Registrasi Vital, Susenas, SDKI.

Level Penyajian

Nasional, provinsi.

Publikasi

SDKI.

Penyedia Informasi

Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

Tidak membedakan risiko melahirkan dari berbagai kelompok usia, sehingga wanita usia 40 tahun dianggap mempunyai risiko melahirkan yang sama besarnya dengan wanita usia 25 tahun.

Angka Reproduksi Neto

Net Reproduction Rate (NRR)

Keterbatasan

-

Konsep dan Definisi

Jumlah kelahiran hidup dari bayi perempuan oleh kohor hipotesis dari 1000 wanita sebelum mengakhiri masa reproduksinya.

Manfaat

Menggambarkan kemampuan seorang penduduk untuk menggantikan dirinya.

Rumus

$$NRR = \sum_i ASFR_{fi} \times \frac{{}_nL_x}{l_0}$$

${}_nL_x$ dan l_0 diperoleh dari life table.

Interpretasi

NRR sebesar 1006,3 artinya terdapat seorang bayi perempuan yang dilahirkan oleh seorang wanita dari suatu kohor dan akan tetap hidup hingga masa reproduksinya.

Replacement Level terjadi jika $NRR=1$. Artinya setiap penduduk wanita akan digantikan oleh seorang anak wanita yang menggantikan posisi dirinya.

Sumber Data

Sensus Penduduk, SUPAS, Registrasi Vital, Susenas, SDKI.

Level Penyajian

Nasional, provinsi.

Publikasi

SDKI, Proyeksi Penduduk Indonesia.

Penyedia Informasi

Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Angka Reproduksi Kasar

Gross Reproduction Rate (GRR)

Konsep dan Definisi

Jumlah kelahiran hidup dari bayi perempuan oleh 1000 wanita selama masa reproduksinya.

Manfaat

Menggambarkan kemampuan seorang penduduk untuk menggantikan dirinya.

Rumus

$$GRR = \frac{100}{SR} \times TFR$$

atau

$$GRR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_{fi}$$

SR : *sex ratio*/ rasio jenis kelamin saat lahir;

$ASFR_{fi}$: banyaknya bayi wanita dari wanita kelompok umur ke-i.

Interpretasi

GRR tahun 2004 sebesar 1024,3 artinya terdapat seorang bayi perempuan yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya.

Sumber Data

Sensus Penduduk, SUPAS, Registrasi Vital, Susenas, SDKI.

Level Penyajian

Nasional, provinsi.

Publikasi

SDKI.

Penyedia Informasi

Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

Mengabaikan kemungkinan perempuan yang meninggal sebelum masa reproduksinya.

Rasio Anak-Ibu

Child-Woman Ratio (CWR)

Konsep dan Definisi

Rasio antara jumlah anak di bawah 5 tahun di suatu tempat pada suatu waktu dengan penduduk wanita usia 15-49 tahun.

Jumlah anak berusia 5 tahun kebawah mencerminkan kelahiran selama 5 tahun sebelum pencacahan.

Manfaat

Melihat tingkat fertilitas pada suatu wilayah kecil tertentu. CWR ini digunakan apabila tidak ada data kelahiran dan data registrasi.

Rumus

$$CWR = \frac{P_{0-4}}{P_{15-49}^f} \times 100$$

P_{0-4} : jumlah penduduk usia 0-4 tahun;

P_{15-49}^f : jumlah wanita usia 15-49 tahun.

Interpretasi

CWR tahun 2004 sebesar 33 artinya pada tahun 2004 terdapat 33 anak usia dibawah lima tahun pada setiap 100 wanita usia 15-49 tahun. CWR tinggi berarti di wilayah tersebut banyak terdapat balita, dengan kata lain kelahiran yang terjadi juga cukup tinggi.

Sumber Data

Sensus Penduduk, SUPAS, Registrasi Vital, Susenas.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, Kabupaten.

Publikasi

-

Penyedia Informasi

Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

Angka ini dipengaruhi oleh kekurangan pelaporan akan jumlah anak dan kesalahan pelaporan usia, tidak memperhitungkan distribusi umur penduduk wanita, dan dipengaruhi tingkat mortalitas sehingga CWR selalu lebih kecil dibanding tingkat fertilitas yang seharusnya.

Umur Kawin Pertama (UKP)

First Marriage Age

Konsep dan Definisi

Umur pertama menikah yang berarti juga saat dimulainya masa reproduksi pembuahan. Hubungan antara UKP dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan.

Manfaat

Sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

Rumus

Rata-rata UKP

$$= \frac{\sum_{i=1}^n U_i}{n}$$

Keterangan:

U_i : umur perkawinan pertama wanita ke-i.

n : jumlah wanita menurut perkawinan pertama.

Interpretasi

UKP sebesar 20 berarti rata-rata penduduk menikah saat berusia 20 tahun. UKP berhubungan terbalik dengan jumlah kelahiran, UKP yang semakin rendah mengindikasikan tingkat fertilitas yang tinggi.

Sumber Data

Susenas.

Level Penyajian

Nasional, provinsi.

Publikasi

Statistik Kesejahteraan Rakyat, Profil Kesehatan Ibu dan Anak, Indikator Kesejahteraan Anak.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik.

Keterbatasan

Terjadi masalah lupa kapan umur kawin pertama terutama mereka yang umurnya tua sehingga keakuratan UKP sering tidak baik.

Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi

Contraceptive Prevalence Ratio (CPR)

Konsep dan Definisi

Angka yang menunjukkan banyaknya PUS yang sedang memakai kontrasepsi pada saat pencacahan.

Manfaat

Untuk menetapkan kebijakan pengendalian kependudukan, penyediaan pelayanan KB seperti sterilisasi, pemasangan IUD, persiapan alat dan obat, serta pelayanan konseling untuk menampung kebutuhan dan menanggapi keluhan pemakaian kontrasepsi.

Rumus

$$CPR_k = \frac{a}{b} \times 100$$

CPR_k : persentase PUS yang sedang memakai suatu cara KB.

a : Σ PUS yang memakai suatu cara KB_k

b : Σ PUS

Interpretasi

CPR tahun 2004 sebesar 56,71%, artinya satu diantara dua pasangan usia subur tahun 2004 sedang memakai suatu cara KB. Perbedaan CPR di wilayah perkotaan dan perdesaan amat kecil, menunjukkan bahwa strategi pendekatan program KB di daerah perkotaan dan pedesaan hampir sama kuatnya.

Sumber Data

Sensus Penduduk, SDKI, statistik pelaporan khususnya dari BKKBN, Susenas.

Level penyajian

Nasional, provinsi.

Publikasi

Estimasi Parameter Demografi, SDKI.

Penyedia Informasi

Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

-

Persentase Pemakai Suatu Cara KB Menurut Alat/Cara KB

Contraceptive Mix

Konsepsi dan Definisi

Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang memakai suatu cara KB per 100 PUS.

Manfaat

Mengetahui cara KB mana yang paling disukai oleh PUS di daerah tertentu pada waktu tertentu dan sangat bermanfaat dalam penajaman sasaran kebijakan pengendalian kelahiran.

Rumus

$$\% \text{ PUS KB} = \frac{a}{b} \times 100$$

a : \sum PUS pemakai cara KB_k

b : \sum PUS pemakai KB

Interpretasi

Hasil SDKI 2002-2003 menunjukkan bahwa bahwa sebagian besar PUS memakai suntikan (46,1%) kemudian diikuti dengan pil (21,9%). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar PUS memakai alat/cara KB modern jangka pendek yang sangat tergantung pada ketersediaan dan juga pada kedisiplinan penggunaannya. Sangat disayangkan bahwa pemakai alat kontrasepsi pria (kondom dan sterilisasi pria) amat rendah. Hal ini menunjukkan masih adanya bias gender dalam hal pemakaian KB.

Sumber Data

Sensus Penduduk, statistik pelaporan khususnya dari BKKBN, SDKI, Susenas.

Level Penyajian

Nasional, provinsi.

Publikasi

Statistik Kesejahteraan Rakyat, SDKI.

Penyedia Informasi

Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Keterbatasan

Informasi tentang cara KB yang sedang atau pernah dipakai oleh PUS sering tidak sama jika ditanyakan kepada istri atau suami. Artinya, suami bisa tidak mengetahui apakah istrinya memakai alat/cara KB. Hal ini berpengaruh pada estimasi persentase PUS yang memakai suatu cara KB. Selain itu, hanya menggambarkan jumlah PUS yang memakai suatu cara KB, tanpa mengetahui lama pemakaiannya. Padahal, efektifitas pemakaian suatu cara KB sangat tergantung pada kontinuitas pemakaian.

Persentase Pernah Pakai KB

Ever User

Konsep dan Definisi

Banyaknya wanita usia 15-49 berstatus kawin (Pasangan Usia Subur - PUS) yang pernah memakai suatu cara KB dari seluruh PUS.

Manfaat

Mengetahui potensi pemakaian alat/cara KB tertentu di kalangan PUS. Jika diketahui alasan mengapa para wanita yang pernah pakai KB berhenti ber-KB maka pelaksana program akan dapat memperbaiki pelayanan atau mengarahkan program kepada hal-hal yang lebih tepat sasaran.

Rumus

$$EU_k = \frac{a}{b} \times 100$$

a : \sum PUS pernah pakai cara KB_k

b : \sum PUS

EU_k : persentase PUS yang pernah memakai suatu cara KB.

Interpretasi

EU_k sebesar 71,97%, artinya dari 100 wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin sebanyak hampir 72 wanita pernah memakai suatu cara KB.

Sumber Data

Statistik Pelaporan BKKBN, SDKI, Susenas.

Level Penyajian

Nasional, provinsi.

Publikasi

Statistik Kesejahteraan Rakyat, SDKI.

Penyedia Informasi

Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Keterbatasan

-

Mortalitas

Angka Kematian Anak (AKA)

Child Mortality Rate (CMR)

Konsep dan Definisi

Angka Kematian Anak adalah jumlah kematian anak berusia 1-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Jadi, Angka Kematian Anak tidak termasuk kematian bayi.

Manfaat

Angka Kematian Anak mencerminkan kondisi kesehatan lingkungan yang langsung mempengaruhi tingkat kesehatan anak. Dengan melihat Angka Kematian Anak yang tinggi, maka diindikasikan terjadi keadaan salah gizi atau gizi buruk, kebersihan diri dan kebersihan yang buruk, tingginya prevalensi penyakit menular pada anak, atau kecelakaan yang terjadi di dalam atau di sekitar rumah (Budi Utomo, 1985).

Interpretasi

Dari data Susenas 2004 diperoleh perkiraan Angka Kematian Anak 1-4 tahun sebesar 18 per 1000 anak berusia (1- 4) tahun dengan referensi waktu Mei 2002. Artinya pada pertengahan 2002 diantara 1000 anak yang berumur antara 1 sampai 4 tahun, 11 bulan 29 hari, 18 orang diantaranya tidak dapat mencapai usia tepat 5 tahun.

Metode Penghitungan

$$AKA = \frac{D_{12-59}}{JBT} \times 1000$$

D_{12-59} = Jumlah kematian penduduk usia 12-59 bulan/1-4 tahun

JLH = Jumlah Penduduk Balita pada pertengahan tahun

Sumber Data

Indikator Kesehatan Anak 2001, Publikasi Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia.

Level Penyajian

-

Publikasi

Indikator Kesehatan Anak 2001, Publikasi Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia.

Penyedia Informasi

Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

-

Angka Kematian Balita (AKBa)

Childhood Mortality Rate (ChMR)

Konsep dan definisi

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi)

Manfaat

Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka KEmatian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

Interpretasi

Misalkan perhitungan dari data Susenas 2004 mendapatkan perkiraan Angka Kematian Balita sebesar 74 per 1000 balita, dengan referensi waktu Mei 2002. Artinya, pada tahun 2002 setiap 1000 balita (umur 0 sampai 4 thn 11 bln 29 hari) pada tahun 2002, 74 anak diantaranya tidak akan berhasil mencapai umur tepat lima tahun.

Rumus

$$AKBa = \frac{D_{0-59}}{JBTT} \times 1000$$

D_{0-59} : Jumlah Kematian penduduk usia 0-59 bulan/0-4 tahun

$JBTT$: Jumlah Penduduk usia 0-59 bulan/0-4 tahun pada pertengahan tahun

Sumber Data

Sensus Penduduk, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, Kor Susenas dan Departemen Kesehatan.

Level Penyajian

-

Publikasi

Indikator Kesehatan Anak 2001, Publikasi Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia.

Penyedia Informasi

Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

-

Angka Kematian Bayi (AKB)

Infant Mortality Rate (IMR)

Konsep dan Definisi

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Manfaat

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Interpretasi

Dari Susenas 2004 hasil perhitungan AKB adalah adalah 52 per 1000 kelahiran dengan referensi waktu Mei tahun 2002. Artinya di Indonesia pada tahun 2002, diantara 1000 kelahiran hidup ada 52 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun.

Rumus

$$AKB = \frac{D_{0-<1thn}}{JLH} \times 1000$$

D_{0-1thn} : jumlah Kematian Penduduk Usia 0-1 Tahun

JLH : Jumlah Kelahiran Hidup

Sumber Data

Sensus Penduduk, Supas, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia.

Level Penyajian

-

Publikasi

Indikator Kesejahteraan Rakyat, Laporan Sosial Indonesia 2008, Indikator Kesehatan Anak 2001, Proyeksi Penduduk Indonesia, Publikasi Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia.

Penyedia Informasi

Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

-

Angka Kematian Ibu (AKI)

Maternal Mortality Rate (MMR)

Konsep dan Definisi

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Yang dimaksud dengan Kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll (Budi, Utomo. 1985).

Manfaat

Informasi mengenai tingginya MMR akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (*making pregnancy safer*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Interpretasi

Berdasarkan data SDKI 2002 - 2003, Angka Kematian Ibu atau Maternal Mortality Ratio (MMR) di Indonesia untuk periode tahun 1998-2002, adalah sebesar 307. Artinya terdapat 307 kematian ibu yang disebabkan karena kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan pada periode tersebut per 100.000 kelahiran hidup.

Rumus

$$AKI = \frac{D_{hamil}}{JLH} \times 100.000$$

D_{hamil} : Jumlah kematian ibu dalam tahap kehamilan atau kelahiran

JLH : Jumlah kelahiran hidup

Sumber Data

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia.

Level Penyajian

-

Publikasi

Laporan Sosial Indonesia 2'008, Publikasi Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, Profil Kesehatan Ibu dan Anak.

Penyedia Informasi

Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

AKI sulit dihitung, karena untuk menghitung AKI dibutuhkan sampel yang besar, mengingat kejadian kematian ibu adalah kasus yang jarang. Oleh karena itu, umumnya digunakan AKI yang telah tersedia untuk keperluan pengembangan perencanaan program.

Angka Kematian Kasar (AKK)

Crude Death Rate (CDR)

Konsep dan Definisi

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.

Manfaat

Angka ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai keadaan kesejahteraan penduduk pada suatu tahun yang bersangkutan. Apabila dikurangkan dari Angka Kelahiran Kasar akan menjadi dasar perhitungan pertumbuhan penduduk alamiah.

Rumus/Metode

Angka kematian kasar dapat dihitung menggunakan rumus:

$$AKK = \frac{D}{JPTT} \times 1000$$

D : Jumlah Kematian

JPTT : Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun

Interpretasi

Dari Susenas 2003 tercatat sebanyak 767.740 kematian, sedangkan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut diperkirakan sebesar 214.374.096 jiwa. Sehingga Angka Kelahiran Kasar yang terhitung adalah sebesar 3,58. Artinya, pada tahun 2003 terdapat 3 atau 4 kematian untuk tiap 1000 penduduk

Sumber Data

Sensus Penduduk, Supas

Publikasi

Laporan Sosial Indonesia 2008, Indikator Kesejahteraan Anak 2001, Publikasi Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia.

Penyedia Informasi

Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

Angka ini masih terlalu umum sebab belum memperhitungkan pengaruh usia penduduk. Penduduk tua dan balita biasanya mempunyai risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang masih muda, tetapi hal ini tidak tergambar dalam AKK.

Angka Kematian Menurut Usia (AKMU)

Age Spesific Death Rate (ASDR)

Konsep dan Definisi

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian pada kelompok usia tertentu (i) untuk setiap 1000 orang penduduk pada kelompok usia tertentu tersebut (i) yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu.

Manfaat

Angka Kematian Menurut Usia dapat dimanfaatkan untuk mengetahui dan menggambarkan derajat kesehatan masyarakat dengan melihat kematian tertinggi pada golongan umur, untuk membandingkan taraf kesehatan masyarakat di berbagai wilayah dan merupakan komponen untuk menghitung angka harapan hidup.

Interpretasi

AKMU kelompok usia 45-49 sebesar 70,24 artinya terdapat 70 kematian yang terjadi pada 1000 orang usia 45-49 tahun.

Metode Penghitungan

$$AKMU_i = \frac{D_i}{JPTT_i} \times 1000$$

D_i : Jumlah Kematian Penduduk Kelompok Usia i

$JPTT_i$: Jumlah Penduduk Kelompok Usia i pada Pertengahan Tahun

Sumber Data

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia.

Publikasi

Publikasi Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia.

Penyedia Informasi

Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

Sistem registrasi penduduk Indonesia yang belum berjalan dengan baik membuat angka kematian menurut usia sulit untuk didapatkan. Selain itu, jika menggunakan data SDKI maka data kelompok umur yang tersedia hanya antara 15-49 tahun, terkait cakupan responden yang digunakan dalam survei tersebut.

Angka Kematian Neo-natal

Neo-natal Death Rate

Konsep dan Definisi

Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup) setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Manfaat

Oleh karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka angka ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan Ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Interpretasi

Dari Susenas 2004 hasil perhitungan AKB adalah adalah 52 per 1000 kelahiran dengan referensi waktu Mei tahun 2002. Artinya di Indonesia pada tahun 2002, diantara 1000 kelahiran hidup ada 52 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun.

Rumus

$$AKNeo = \frac{D_{0-1bln}}{JLH} \times 1000$$

D_{0-1bln} : Jumlah Kematian Penduduk Usia 0-1 bulan

JLH : Jumlah Kelahiran Hidup

Sumber Data

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia.

Publikasi

Laporan Sosial Indonesia 2008, Publikasi Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia.

Penyedia Informasi

Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

Sistem registrasi penduduk Indonesia yang belum berjalan dengan baik membuat angka kematian menurut usia sulit untuk didapatkan. Selain itu, jika menggunakan data SDKI maka data kelompok umur yang tersedia hanya antara 15-49 tahun, terkait cakupan responden yang digunakan dalam survei tersebut.

Angka Kematian Post Neo-natal

Post Neo-natal Death Rate

Konsep dan Definisi

Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Manfaat

Angka Kematian Post-NeoNatal bersama Angka Kematian Anak serta Kematian Balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun.

Interpretasi

Misalkan dari Susenas 2004 hasil perhitungan AKB adalah adalah 52 per 1000 kelahiran dengan referensi waktu Mei tahun 2002. Artinya di Indonesia pada tahun 2002, diantara 1000 kelahiran hidup ada 52 bayi yang meninggal setelah usia 1 bulan hingga sebelum usia tepat 1 tahun.

Rumus

$$AKP_{Neo} = \frac{D_{1bln-1thn}}{JLH} \times 1000$$

$D_{1bln-1thn}$: Jumlah Kematian Penduduk
Usia 1 bulan-1 tahun

JLH : Jumlah Kelahiran Hidup

Sumber Data

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia.

Publikasi

Laporan Sosial Indonesia 2008, Publikasi Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia.

Penyedia Informasi

Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

Hampir sama dengan Angka Kematian Neonatal, kurang baiknya pencatatan dalam registrasi penduduk membuat penyusunan angka ini menjadi kurang akurat. Selain itu, kerap terjadi masalah lupa kapan waktu atau pembulatan waktu meninggal seorang anak oleh orangtuanya, terutama bagi orangtua yang berpendidikan rendah di perdesaan.

Angka Harapan Hidup

Life Expectancy Rate

Konsep dan definisi

Angka Harapan Hidup (e_0) pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Manfaat

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Metode Penghitungan

Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian.

Interpretasi

Angka Harapan Hidup yang terhitung untuk Indonesia dari Sensus Penduduk Tahun 1971 adalah 47,7 tahun. Artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1971 (periode 1967-1969) akan dapat hidup sampai 47 atau 48 tahun.

Tetapi bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1980 mempunyai usia harapan hidup lebih panjang yakni 52,2 tahun, meningkat lagi menjadi 59,8 tahun untuk bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1990, dan bagi bayi yang dilahirkan tahun 2000 usia harapan hidupnya mencapai 65,5 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan bangsa Indonesia selama tiga puluh tahun terakhir dari tahun 1970-an sampai tahun 2000.

Sumber Data

Sensus Penduduk, Registrasi Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS).

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Publikasi

Indikator Kesehatan Ibu dan Anak 2001, Proyeksi Penduduk Indonesia, Estimasi Fertilitas, Mortalitas, dan Migrasi, Publikasi Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia. Indikator Kesejahteraan Rakyat, Statistik Indonesia.

Penyedia Informasi

- Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

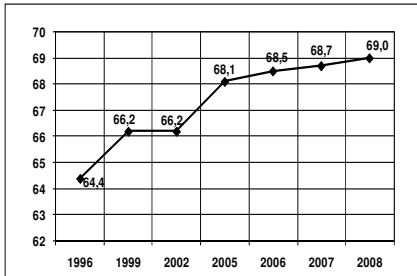
Keterbatasan

Karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka angka kematian menurut umur sulit didapatkan, sehingga untuk menghitung Angka Harapan Hidup tidak dapat dihitung secara langsung melalui Tabel

Kematian. Oleh sebab itu, digunakan cara tidak langsung dengan program *Mortpak Lite*.

Implementasi

Perkembangan Angka Harapan Hidup, 1996-2008



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008

Pada gambar diatas terlihat, selama periode 1996-2008 perkembangan AHH menunjukkan peningkatan. Pada tahun 1999, AHH penduduk Indonesia telah mencapai 66,2 tahun. AHH ini masih lebih baik dibandingkan dengan AHH Laos PDR, Cambodia dan Myanmar. Namun, dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Filipina dan Thailand, AHH Indonesia masih tertinggal (ASEAN, 2005). Perkembangan selanjutnya, selama tahun 1999-2002 AHH tidak menunjukkan peningkatan, yaitu tetap sebesar 66,2 tahun. Setelah berjalan tiga tahun kemudian, yaitu dari tahun 2002-2005 AHH meningkat sebesar 1,9 poin sehingga menjadi 68,1. Kemudian pada tahun 2005-2008 AHH mulai menunjukkan perkembangan meningkat dari 68,1 menjadi 69,0 pada tahun 2008. Capaian angka harapan hidup Indonesia masih belum menggembirakan, walaupun terjadi

peningkatan angka harapan hidup sebesar 0,30 tahun selama tahun 2007-2008. Namun yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah peningkatan tersebut mampu mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat yang baik. Untuk itu perlu upaya peningkatan kesehatan yang lebih komprehensif agar perbaikan derajat kesehatan yang direfleksikan melalui penurunan angka kematian bayi. Tingkat kesehatan bayi juga dipengaruhi secara nyata oleh kondisi kesehatan ibu serta lingkungannya. Tidak sedikit anak yang terpaksa terlahir dengan berat badan lahir rendah karena dilahirkan oleh ibu yang menderita kekurangan gizi.

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Morbiditas

Angka Kesakitan/ Morbiditas/Presentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan

Konsep dan definisi

Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari.

Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Manfaat

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu

Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Interpretasi

Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti

semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.

Metode Penghitungan

$$AM = \frac{JPKK}{JP} \times 100$$

AM : Angka Morbiditas

JPKK : Jumlah penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya

JP : Jumlah Penduduk

Sumber Data

SUSENAS.

Level Penyebaran

Nasional, provinsi, dan kabupaten.

Publikasi

Statistik Kesejahteraan Rakyat, Statistik Indonesia.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Keterbatasan

-

Implementasi

Berdasarkan hasil Susenas 2009, banyaknya penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan yang lalu sebesar 33,68 persen, dengan persentase yang relatif sama antara daerah perkotaan dan perdesaan masing-masing 33,07 persen dan 34,25 persen. Tiga jenis keluhan yang paling banyak dialami penduduk adalah batuk (49,56 persen), pilek (47,86 persen), dan panas (38,65 persen), sedangkan keluhan lainnya (selain ketujuh keluhan yang ada dalam kategori) sebesar 31,67 persen.

Rata-Rata Lama Sakit

Konsep dan definisi

Menunjukkan rata-rata banyaknya hari sakit pada penduduk yang mengalami gangguan/keluhan kesehatan.

Rata-rata lama sakit dimaksud selama 1 bulan terakhir (maksimal per inidividu 30 hari).

Manfaat

Indikator ini dapat menggambarkan tingkat intensitas penyakit yang diderita oleh penduduk, menggambarkan besarnya kerugian materiil yang dialami penduduk karena penyakit yang diderita, serta untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum dan menunjukkan seberapa serius keluhan yang diderita

Interpretasi

Semakin besar nilai indikator ini/semakin lama rata-rata lama hari sakit, makin buruk tingkat kesehatan daerah tersebut dan semakin besar pula kerugian materiil yang dialami oleh penduduk.

Metode Penghitungan

$$RRLS = \frac{TRLS}{JPKK}$$

RRLS : Rata-rata lama sakit

TRLS : Jumlah total rata-rata lama sakit per individu

JPKK : Jumlah penduduk mengalami keluhan kesehatan dan aktivitasnya terganggu

Sumber Data

SUSENAS.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten.

Publikasi

Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.

Keterbatasan

-

Implementasi

Pada tahun 2006 jumlah hari lamanya sakit penduduk Kabupaten Puncak Jaya, Papua adalah sebanyak 100.505 hari, dan jumlah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan tahun 2006 adalah 23.873 jiwa,

Dengan demikian rata-rata lama sakit penduduk yang sakit sebesar 4,21hari. Hal ini menunjukkan penduduk tersebut mengalami kerugian materiil(ekonomi) rata-rata selama 4 hari.

Tingkat Prevalensi

Prevalence Rate

Konsep dan Definisi

Dalam epidemiologi, prevalensi penyakit dalam populasi statistik didefinisikan sebagai banyaknya jumlah kasus penyakit yang terjadi dalam suatu populasi dalam kurun waktu tertentu, atau jumlah total kasus dalam populasi, dibagi dengan jumlah individu dalam populasi. Atau prevalensi dapat dikatakan sebagai gambaran tentang frekuensi penderita lama dan baru yang ditemukan pada suatu jangka waktu tertentu di sekelompok masyarakat tertentu. Pada perhitungan angka prevalensi digunakan jumlah seluruh penduduk tanpa memperhitungkan orang/penduduk yang kebal atau penduduk dengan resiko (*Population at Risk*).

Manfaat

Angka prevalensi dapat digunakan untuk memperkirakan seberapa sering suatu kondisi yang berada dalam suatu populasi terjadi selama periode waktu tertentu. Ini membantu dokter atau ahli kesehatan lain memahami kemungkinan diagnosis tertentu dan secara rutin digunakan oleh ahli epidemiologi, penyedia layanan kesehatan, instansi pemerintah dan asuransi.

Rumus

Misalkan kita mendefinisikan sebagai jumlah individu dalam suatu populasi tertentu yang terjangkit suatu penyakit pada waktu tertentu, dan sebagai jumlah individu dalam populasi yang sama yang berisiko terkena penyakit ini pada waktu tertentu, tidak termasuk

mereka yang sudah terjangkit penyakit. Maka, kita dapat menuliskan rumus prevalensi, sebagai berikut:

$$\text{Prevalensi} = \frac{\alpha}{\alpha + b}$$

Interpretasi

Angka prevalensi berhubungan erat dengan tingkat kesehatan masyarakat. Semakin tinggi tingkat prevalensi di suatu populasi menunjukkan bahwa semakin tinggi pula jumlah penyakit yang menjangkiti penduduk di populasi tersebut dalam kurun waktu tertentu.

Sumber Data

-

Publikasi

-

Penyedia Informasi

Kementerian Kesehatan RI.

Keterbatasan

Sering terjadi kesalahan pengklasifikasian seorang individu masuk ke dalam kategori orang yang terjangkit suatu penyakit atau orang yang berisiko terkena penyakit. Hal ini dikarenakan dalam penghitungan prevalensi, penduduk yang tidak mungkin terkena penyakit juga di masukkan dalam perhitungan.

Insidensi

Incident

Konsep dan Definisi

Jumlah kasus baru penyakit tertentu yang dilaporkan pada periode waktu tertentu, tempat tertentu dibagi dengan jumlah penduduk dimana penyakit tersebut berjangkit.

Manfaat

Digunakan untuk melihat efektivitas program pencegahan, misal: imun BCG, kasus TB untuk melihat adanya *outbreak*.

Rumus

$$\text{Insidensi} = \frac{\text{Event}}{\text{Population at risk}}$$

Interpretasi

Semakin besar persentase insidens mengindikasikan semakin banyaknya orang yang terkena kejadian. Misal: demam berdarah di Jakarta memiliki angka insidensi sebesar 15%, yang artinya 15% penduduk yang berisiko di Jakarta terkena penyakit demam berdarah. Biasanya dinyatakan dalam jumlah kasus per 1000 atau per 100.000 penduduk per tahun.

Sumber Data

-

Publikasi

-

Penyedia Informasi

Dinas Kesehatan, Bid. Binkesnas.

Keterbatasan

Registrasi harus baik. Karena data tidak mencakup penduduk yang tidak terdaftar di RS atau puskesmas.

Angka Fatalitas Kasus

Case Fatality Rate (CFR)

Konsep dan Definisi

Jumlah kematian akibat penyakit tertentu dibandingkan dengan jumlah kasus penyakit.

Manfaat

Untuk menentukan seberapa baik program pengobatan yang dilakukan dan untuk melihat keganasan suatu penyakit.

Rumus

$$CFR = \frac{\sum D}{\sum C} \times k$$

Dimana:

CFR : *Case Fatality Rate*

D : Kematian karena penyakit tertentu.

C : Seluruh kasus penyakit tertentu.

k : Konstanta

Interpretasi

Semakin rendah angka CFR maka penatalaksanaan Kasus (suatu rangkaian kegiatan mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis, hingga pengobatan) penyakit tertentu semakin baik dan semakin lemahnya penyebab penyakit tersebut.

Sumber Data

-

Publikasi

-

Penyedia Informasi

Dinas Kesehatan, Bid. Binkesnas.

Keterbatasan

Registrasi harus baik. Karena data tidak mencakup penduduk yang tidak terdaftar di RS atau puskesmas.

Angka Daya Tular

Secondary Attack Rate (SAR)

Konsep dan Definisi

Jumlah penderita baru yang terjadi dalam keluarga atau institusi dalam periode masa inkubasi tertentu setelah terjadi kontak dengan kasus primer, dihubungkan dengan total keseluruhan kontak; denominatornya/penyebutnya bisa terbatas hanya kepada kontak yang rentan saja jika hal ini diketahui dengan jelas.

Manfaat

Untuk mengukur derajat penularan penyakit pada *susceptible person* yang terekspose dari kasus primer dan untuk mengukur kecepatan tingkat infeksi pada tempat tertutup misal ruangan kelas sekolah.

Rumus

$$SAR = \frac{\sum A}{\sum B}$$

Dimana:

SAR adalah Secondary Attack Rate

A : Kasus tambahan pada orang yang terpapar kasus primer selama periode masa inkubasi.

B : orang yang kontak dengan kasus primer selama masa inkubasi.

Interpretasi

Bila angka SAR sebesar 15% Artinya, jika satu orang yang sedang tertular bersama 100 orang dalam satu ruangan, akan ada 15 orang terserang.

Sumber Data

-

Publikasi

-

Penyedia Informasi

Dinas Kesehatan, Bid. Binkesnas.

Keterbatasan

Registrasi harus baik. Karena data tidak mencakup penduduk yang tidak terdaftar di RS atau puskesmas.

Tingkat Serangan

Attack Rate (AR)

Konsep dan Definisi

Yaitu jumlah penderita baru suatu penyakit yang ditemukan pada suatu saat dibandingkan dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit tersebut pada saat yang sama.

Manfaat

Memperkirakan derajat serangan atau penularan suatu penyakit.

Interpretasi

Makin tinggi nilai AR, maka makin tinggi pula kemampuan penularan penyakit tersebut.

Rumus

$$AR = \frac{a}{b} \times K$$

Dimana:

a : jumlah penderita baru dalam suatu saat

b : jumlah penduduk yang beresiko pada saat yang sama

K : Konstanta (1000)

Sumber Data

-

Publikasi

-

Penyedia Informasi

Dinas Kesehatan, Bid. Binkesnas.

Keterbatasan

Sulit memperoleh data penderita yang baru terkena penyakit tertentu pada suatu saat.

<http://www.bps.go.id>

Kependudukan

Kepadatan Penduduk

Population Density

Konsep dan Definisi

Kepadatan penduduk dibagi menjadi 3 jenis:

- Kepadatan Penduduk Kasar (*Crude Population Density*), yaitu menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah.
- Kepadatan Fisiologis (*Physiological Density*), yang menyatakan banyaknya penduduk untuk setiap kilometer persegi wilayah lahan yang ditanami (*cultivable land*).
- Kepadatan Agraris (*Agriculture Density*), menunjukkan banyaknya penduduk petani untuk setiap kilometer persegi wilayah *cultivable land*. Ukuran ini menggambarkan intensitas pertanian dari petani terhadap lahan yang mencerminkan efisiensi teknologi pertanian dan intensitas tenaga kerja pertanian.

Kepadatan penduduk kasar merupakan ukuran persebaran penduduk yang umum digunakan, karena selain data dan cara penghitungannya sederhana, ukuran ini sudah distandarisasi dengan luas wilayah.

Manfaat

- Untuk mengetahui konsentrasi penduduk di suatu wilayah.
- Digunakan sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk (program transmigrasi).

Rumus

$$KP = \frac{P}{A}$$

KP : Kepadatan penduduk

P : Jumlah penduduk

A : Luas wilayah (km²)

Interpretasi

Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk tiap 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin padat penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Misalnya kepadatan penduduk Indonesia tahun 2009 sebesar 124 artinya bahwa secara rata-rata tiap 1 kilometer persegi wilayah di Indonesia didiami oleh 124 penduduk.

Sumber Data

Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), dan Pendataan Potensi Desa/Kelurahan.

Level Penayajan

Nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Publikasi

Statistik Indonesia dan Daerah Dalam Angka.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Direktorat Ketahanan Sosial.

Keterbatasan

Dalam menginterpretasikan angka kepadatan penduduk harus sedikit berhati-hati karena angka ini merupakan rata-rata banyaknya penduduk per satuan luas di suatu wilayah. Angka

kepadatan penduduk untuk daerah yang penduduknya menggerombol di suatu tempat kurang dapat merepresentasikan kepadatan penduduk secara keseluruhan di wilayah tersebut. Contoh: kepadatan penduduk Indonesia tahun 2009 sebesar 124 jiwa/km², hal tersebut tidak dapat dikatakan bahwa seluruh wilayah di Indonesia mempunyai kepadatan penduduk 124 jiwa/km² karena pada kenyataannya persebaran penduduk Indonesia tidak merata yakni berpusat di pulau Jawa.

Catatan

Periode penyajian data kepadatan penduduk yaitu tahunan.

Implementasi

Bappenas: Penduduk Jakarta Terpadat di Dunia

JAKARTA - Kepadatan penduduk Jakarta merupakan yang terpadat di dunia di mana tercatat mencapai 12.992 jiwa per kilometer persegi. Namun, perkembangan penduduk Jakarta, justru disumbangkan tingginya migrasi dari luar wilayah DKI Jakarta. Hal ini diungkapkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, di Kantor.

Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Jumat (23/7/2010). Walaupun demikian, dalam periode 2006-2007 terjadi penurunan penduduk di wilayah Jakarta, yaitu di Jakarta Timur sebesar 1,83 persen, Jakarta Barat sebesar 0,56 persen, Jakarta Pusat sebesar 2,43 persen, dan Jakarta Utara sebesar 2,21 persen.

Penurunan jumlah penduduk di wilayah Jakarta ini sebaliknya diikuti dengan bertambahnya penduduk di wilayah

Bodetabek yaitu sebesar 4,3 persen di Bogor; 4,6 persen di Bekasi, 4,2 persen di Depok, dan 5,4 persen di Tangerang."Data tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk yang bertempat tinggal di wilayah pinggiran Jakarta walaupun tetap bekerja dan memiliki kegiatan di Jakarta," ujarnya. Dia pun menyarankan, salah satu cara untuk mengurangi kepadatan adalah dengan mengintegrasikan sarana transportasi dengan wilayah-wilayah sekitar Jakarta. "Integrasi itu yang kita harapkan antara Jakarta dengan daerah sekitarnya, Jabodetabek," tandasnya.(ade).

Sumber:

<http://economy.okezone.com/read/2010/07/23/20/355839/bappenas-penduduk-jakarta-terpadat-di-dunia>

Diakses tanggal: 10 Desember 2010

Laju Pertumbuhan Penduduk

Growth Rate of Population

Konsep dan Definisi

Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.

Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik.

Manfaat

Untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu.

Rumus

$$r = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{1/t} - 1$$

(metode geometri)

r : Laju pertumbuhan penduduk

P_t : Jumlah penduduk tahun t

P_0 : Jumlah penduduk tahun awal

t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)

Interpretasi

- $LPP > 0$ berarti terjadi penambahan penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- $LPP = 0$ berarti tidak terjadi perubahan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- $P_{t,0} < 100$ berarti terjadi pengurangan jumlah penduduk pada tahun t dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sumber Data

Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Level Penyajian

Nasional, provinsi, Kabupaten/Kota

Publikasi

Statistik Indonesia, Daerah Dalam Angka

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Keterbatasan

Penghitungan laju pertumbuhan penduduk dengan metode geometrik menggunakan asumsi bahwa jumlah penduduk akan bertambah secara geometrik menggunakan dasar penghitungan bunga majemuk.

Implementasi

Kepala BKKBN Optimistis Laju Pertumbuhan Penduduk Turun 1,1%

JAKARTA (Suara Karya) Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarif optimistis, laju pertumbuhan penduduk Indonesia akan menurun dari 1,3 persen per tahun saat ini menjadi 1,1 persen pada 2010.

Pencapaian target penurunan pertumbuhan menjadi 1,1 persen itu dapat terpenuhi. Ini didasarkan pada kesadaran masyarakat mengikuti program KB yang tampak terus meningkat atau mencapai 61 persen dari pasangan usia subur (PUS). Juga adanya

kesadaran masyarakat yang tinggi untuk membentuk keluarga kecil dengan dua anak lebih baik.

"Selain itu, dukungan para tokoh masyarakat dan agama serta dukungan dari kelembagaan pemerintah, khususnya hampir seluruh pemerintah kabupaten/kota, telah menjadikan urusan KB dan pemberdayaan perempuan sejajar dengan urusan sektor lainnya," kata Sugiri, menjawab pertanyaan wartawan usai membuka rapat koordinasi nasional (rakornas) Kemitraan Program Kependudukan dan KB dengan LSM (Ikatan Bidan Indonesia, Muslimat NU, dan Aisyiah), di Jakarta, Jumat lalu.

Dicontohkannya, laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 1970 mencapai 2,7 persen per tahun. Namun, berkat program KB, ramalan para pakar bahwa penduduk Indonesia pada tahun 2000 akan menjadi 280 juta jiwa tidak benar. Sebab, ternyata jumlahnya hanya sekitar 200 juta jiwa, atau selama 30 tahun Indonesia mampu menekan jumlah penduduk sekitar 80 juta jiwa.

Penekanan tambahan penduduk 80 juta jiwa itu menggambarkan bahwa program KB mampu mengurangi beban biaya negara dari sektor pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Melalui revitalisasi program KB bahwa kesertaan program KB pada pasangan usia subur (PUS) yang pada 2009 sebanyak 61,4 persen akan meningkat minimal satu persen per tahun, sehingga angka kesuburan perempuan

(total fertility rate-TFR) dari 2,6 anak saat ini juga dapat diturunkan menjadi 2,0.

"Jika kesertaan KB naik satu persen per tahun dari 61 persen pada 2008, maka jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 akan menjadi 237 juta jiwa. Jika kesertaan KB statis, maka jumlah penduduk 255 juta jiwa. Dan jika kesertaan KB menurun, jumlah penduduk menjadi 264 juta jiwa pada 2015," katanya.

Sugiri juga mengemukakan, perkembangan kependudukan yang tidak terarah dapat menjadi batu sandungan bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. "Dalam konteks ini, peran dan kontribusi LSM sangat sentral dalam menopang pembangunan pada masa yang akan datang," katanya.

Tentang dimasukkannya program kependudukan dalam organisasi BKKBN, seperti diamanatkan UU No 52 Tahun 2009, menurut Sugiri, karena masalah kependudukan adalah masalah negara yang tidak dapat berdiri sendiri (SlnxgDi BS/Budi Sino)

Sumber:

<http://bataviase.co.id/node/96137>

Diakses tanggal 10 Desember 2010

Rasio Jenis Kelamin

Sex Ratio (SR)

Konsep dan Definisi

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita.

Manfaat

Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan pertimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, karena adat dan kebiasaan jaman dulu yang lebih mengutamakan pendidikan laki-laki dibanding perempuan, maka pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Rumus

$$SR = \frac{P_L}{P_w} \times 100$$

SR : Rasio jenis kelamin

P_L : Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki.

P_w : Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan.

Interpretasi

- SR > 100 berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.
- SR = 100 berarti jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan.
- SR < 100 berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Sumber Data

Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Publikasi

Statistik Indonesia, Daerah Dalam Angka

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Keterbatasan

Berdasarkan rumus di atas, penghitungan RJK dilakukan secara total tanpa membedakan kelompok umur tertentu.

Implementasi

PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN

Jumlah penduduk di Kabupaten Kupang pada tahun 2008 sebanyak 383.896 jiwa, dengan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 65 jiwa/km². Persebaran penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Kupang timur (10,59%) dan paling sedikit di Kecamatan Amfoang Barat Daya (1,06%). Jumlah penduduk

laki-laki (193.180 jiwa) lebih banyak dari penduduk perempuan

(190.716 jiwa). Rasio jenis kelamin sudah diatas 100. Ini berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin 101 pada tahun 2008 berarti perbandingan antara penduduk perempuan dan laki-laki adalah 100 berbanding 101.

Laju pertumbuhan penduduk suatu wilayah pada hakekatnya disebabkan oleh tiga faktor yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi). Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kupang dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 2,47 persen. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kupang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian, namun saat ini faktor perpindahan penduduk juga mempunyai pengaruh yang cukup besar.

Sumber:

<http://ntt.bps.go.id/kab-kupang/pdf/datastrategis.pdf>

Diakses tanggal 10 desember 2010

Distribusi Penduduk Menurut Wilayah

Distribution of Population by Area

Konsep dan Definisi

Ukuran persebaran penduduk yang paling sederhana adalah distribusi persentase penduduk. Ukuran ini diperlukan karena terkadang sulit untuk membandingkan distribusi penduduk menurut wilayah jika yang digunakan adalah jumlah absolut penduduk.

Manfaat

Untuk mengetahui persebaran penduduk tiap wilayah.

Rumus

$$\% \text{ penduduk} = \frac{P_i}{P} \times 100$$

P_i : Jumlah penduduk wilayah i

P : Total penduduk

Interpretasi

Misal, distribusi persentase penduduk DKI Jakarta tahun 2009 sebesar 3,99 %. Artinya 3,99% penduduk Indonesia berada di provinsi DKI Jakarta atau total penduduk DKI Jakarta berjumlah 3,99 % dari total penduduk Indonesia.

Sumber Data

Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Level Penyajian

-

Publikasi

Statistik Indonesia dan Daerah Dalam Angka.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

Ukuran distribusi penduduk menurut wilayah ini masih sangat kasar karena hanya melihat persentase penduduk menurut wilayahnya.

<http://www.bps.go.id>

Migrasi

Angka Migrasi Masuk

In Migration of Numbers (Mi)

Konsep dan Definisi

Angka yang menunjukkan banyaknya migrasi masuk selama 1 tahun untuk setiap 1000 orang penduduk yang terjadi pada suatu daerah.

Manfaat

Angka migrasi ini bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu daerah merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya. Dapat juga ditentukan apakah suatu daerah merupakan wilayah yang tidak disenangi untuk dijadikan tempat tinggal. Dengan kata lain daerah ini memiliki daya dorong bagi penduduknya untuk pergi meninggalkan daerah tersebut.

Rumus

$$M_i = \frac{In Mig}{P} k$$

dimana :

M_i : Angka Migrasi Masuk

In Mig : Jumlah penduduk yang masuk ke suatu daerah selama satu periode pengamatan

P : Jumlah penduduk pada pertengahan periode yang sama

k : Konstanta, biasanya 1000

Interpretasi

Semakin tinggi angka migrasi masuk, maka daerah tersebut semakin mempunyai daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya.

Sumber Data

Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Level Penyajian

Nasional, provinsi, kabupaten

Publikasi

Statistik Indonesia, Estimasi Parameter Fertilitas Mortalitas dan Migrasi.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

Minimnya data migrasi, dimana data migrasi dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

Implementasi

Dalam beberapa tahun belakangan ini, sekitar 20,000 tenaga kerja asing setiap tahunnya memperoleh izin kerja di Indonesia, pada prinsipnya, izin kerja dikeluarkan bagi warga asing yang memiliki keahlian atau kemampuan yang tidak mudah diperoleh di pasar tenaga kerja di Indonesia. Namun Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI memperkirakan sekitar 50,000 warga asing menyalahgunakan visa kunjungan atau visa sementara mereka untuk mencari pekerjaan. Di tahun 2003, 25 persen izin kerja yang diterbitkan bagi warga asing adalah untuk manager dan 72 persen untuk para profesional. Sebagai perbandingan, Thailand menerbitkan 102,446 izin kerja bagi pekerja terampil dan profesional selama tahun 2004.

Angka Migrasi Keluar

Out Migration of Numbers (Mo)

Konsep dan Definisi

Angka yang menunjukkan banyaknya migrasi keluar selama 1 tahun untuk setiap 1000 orang penduduk yang terjadi pada suatu daerah.

Manfaat

Angka migrasi ini bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu daerah merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya. Dapat juga ditentukan apakah suatu daerah merupakan wilayah yang tidak disenangi untuk dijadikan tempat tinggal. Dengan kata lain daerah ini memiliki daya dorong bagi penduduknya untuk pergi meninggalkan daerah tersebut.

Rumus

$$M_o = \frac{OutMig}{p} k$$

M_o : Angka Migrasi Keluar

$OutMig$: Jumlah penduduk yang masuk ke suatu daerah selama satu periode pengamatan

p : Jumlah penduduk pada pertengahan periode yang sama

k : Konstanta, biasanya 1000

Interpretasi

Semakin tinggi angka migrasi keluar, maka daerah tersebut daya tariknya akan semakin kecil bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya.

Sumber Data

Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus.

Level Penyajian

-

Publikasi

Statistik Indonesia, Estimasi Parameter Fertilitas Mortalitas dan Migrasi.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Keterbatasan

Tidak dapat menyajikan data tahunan.

Implementasi

provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki perkembangan pesat di kawasan Timur Indonesia. Dengan perkembangan pembangunan ekonomi yang pesat tersebut, maka provinsi ini memiliki daya tarik bagi penduduk sekitarnya sebagai tempat memperbaiki taraf hidup. Namun demikian, meski dengan kecenderungan yang makin menurun, provinsi Sulawesi Selatan masih tetap dikenal sebagai salah satu provinsi yang memiliki angka migrasi keluar cukup besar. Data SUPAS 1995 memperlihatkan bahwa sejumlah 149.148 orang pergi meninggalkan Sulawesi Selatan selama kurun waktu 5 tahun (1990- 1995). Sementara itu jumlah migran masuk ke Sulawesi Selatan 137.341 orang. Hal ini berarti bahwa migrasi veto Sulawesi Selatan menunjukkan angka yang negatif. Arah tujuan migrasi keluar dan Sulawesi Selatan terutama menuju ke provinsi-provinsi lain yang relative masih

berdekatan dengan Sulawesi Selatan, seperti Maluku dan provinsi-provinsi lain yang terletak di Pulau Sulawesi. Tujuan utama lain dari arah keluarnya migrasi penduduk Sulawesi Selatan adalah provinsi- provinsi di Jawa, terutama DI Yogyakarta dan DKI Jakarta. Tujuan dan penelitian ini adalah mempelajari pola tujuan migrasi keluar dari Sulawesi Selatan, selain itu penelitian ini juga bertujuan mempelajari faktor- faktor yang mempengaruhi kecenderungan arah migrasi keluar dari Sulawesi Selatan. Data yang digunakan adalah data hasil SUPAS 1995.

<http://www.bps.go.id>

Migrasi Neto

Nett Migration (Mn)

Konsep dan Definisi

Merupakan selisih antara peristiwa migrasi masuk dengan migrasi keluar.

Manfaat

Migrasi neto ini bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu kabupaten/kota merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya. Dapat juga ditentukan apakah suatu kabupaten/kota merupakan wilayah yang tidak disenangi untuk dijadikan tempat tinggal. Dengan kata lain kabupaten/kota ini memiliki daya dorong bagi penduduknya untuk pergi meninggalkan daerah tersebut.

Rumus

$$M_n = In Mig - Out Mig$$

Dimana:

M_n : Angka Migrasi Neto

$In Mig$: Jumlah penduduk yang masuk ke suatu daerah selama satu periode pengamatan

$Out Mig$: Jumlah penduduk yang keluar dari suatu daerah selama periode yang sama

Interpretasi

Angka migrasi neto yang positif artinya, jumlah penduduk yang masuk lebih banyak daripada jumlah penduduk yang keluar. Sedangkan kabupaten/kota yang kurang disenangi oleh penduduknya akibat kelangkaan sumberdaya misalnya, biasanya memiliki angka migrasi neto

yang negatif, yang berarti jumlah penduduk yang keluar lebih banyak daripada jumlah migran yang masuk.

Sumber Data

Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Publikasi

Statistik Indonesia, Profil Migrant Hasil Supas, Profil Komuter Hasil Supas, Analisis Mobilitas Tenaga Kerja Hasil Sakernas.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

Minimnya data migrasi, dimana data migrasi dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

Implementasi

Besarnya migrasi masuk dan keluar dari suatu provinsi dapat menggambarkan keadaan mobilitas penduduk di suatu daerah. provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah migrasi keluar terbesar dibandingkan dengan provinsi lainnya. Berdasarkan Hasil SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) tahun 1995, jumlah migran keluar seumur hidup dari Jawa Tengah mencapai 5.014.822 jiwa, sedangkan pada hasil Sensus Penduduk tahun 2000 terlihat adanya kenaikan jumlah migran keluar yang mencapai 5.354.459 jiwa dan meningkat kembali tahun 2005 menjadi 5.538.952 jiwa. Hal

ini sangat berbeda dengan Jawa Barat dan DKI Jakarta yang memiliki jumlah migrasi masuk terbesar di Indonesia. Jawa Barat dan DKI Jakarta menjadi daerah tujuan para migran karena merupakan daerah pusat bisnis dan industri yang dikenal dengan kawasan Jabodetabek sehingga berpeluang besar dalam menyerap tenaga kerja.

<http://www.bps.go.id>

Migrasi Seumur Hidup

A Lifetime Migrant (Msh)

Konsep dan Definisi

Seseorang dikatakan migran semasa hidup jika provinsi atau kabupaten/kodya tempat ia dilahirkan berbeda dengan provinsi atau kabupaten/kodya tempat tinggalnya sekarang (pada saat pencacahan)

Manfaat

Angka migrasi ini bermanfaat untuk mengetahui banyaknya penduduk yang tempat lahirnya berbeda dengan tempat tinggalnya sekarang

Rumus

$$M_{sh} = \frac{P_d}{P} 1000$$

M_{sh} : Migrasi semasa hidup di suatu provinsi

P_d : Jumlah penduduk yang provinsi tempat lahirnya berbeda dengan provinsi tempat tinggalnya sekarang

P : Jumlah penduduk pertengahan tahun di suatu provinsi tujuan

Interpretasi

Semakin tinggi angka migrasi semasa hidup, maka jumlah penduduk yang tempat tinggalnya sekarang berbeda dengan tempat lahirnya semakin banyak.

Sumber Data

Sensus Penduduk, dan Survei Penduduk Antar Sensus.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, kabupaten

Publikasi

Statistik Indonesia

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

Minimnya data migrasi, dimana data migrasi dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

Migrasi Risen

Recent Migration (RMR)

Konsep dan Definisi

Seseorang dikatakan sebagai migran risen, yaitu apabila provinsi tempat tinggal lima tahun yang lalu berbeda dengan provinsi tempat tinggal sekarang (pada saat pencacahan).

Manfaat

Angka migrasi ini bermanfaat untuk mengetahui banyaknya penduduk yang tempat tinggal lima tahun yang lalu berbeda dengan tempat tinggalnya sekarang.

Rumus

$$RMR = \frac{P_{d5}}{P} 1000$$

RMR : Recent Migration Rate (Migrasi risen)

P_{d5} : Banyaknya penduduk yang provinsi tempat tinggalnya 5 tahun yang lalu berbeda dengan provinsi tempat tinggalnya sekarang

P : Jumlah penduduk pertengahan tahun di suatu provinsi tujuan

Interpretasi

Semakin tinggi angka migrasi risen, maka jumlah penduduk yang tempat tinggalnya sekarang berbeda dengan tempat tinggalnya lima tahun yang lalu semakin banyak.

Sumber Data

Sensus Penduduk, dan Survei Penduduk Antar Sensus.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Publikasi

Statistik Indonesia.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

Responden tidak dapat mengetahui atau mengingat nama kabupaten/kota tempat dia dilahirkan, terutama bagi responden yang sudah berumur tua dan kurang berpendidikan.

Migrasi Total

Total Migration (AMT)

Konsep dan Definisi

Seseorang dikatakan sebagai migran total (MT) apabila provinsi tempat tinggal sebelumnya berbeda dengan provinsi tempat tinggal sekarang.

Manfaat

Angka migrasi ini bermanfaat untuk mengetahui banyaknya penduduk yang tempat tinggal sebelumnya berbeda dengan tempat tinggalnya sekarang

Rumus

$$AMT = \frac{MT}{P} 1000$$

MT : Jumlah penduduk yang provinsi tempat tinggalnya sekarang berbeda dengan provinsi tempat tinggal sebelumnya

P : Jumlah penduduk pertengahan tahun

Interpretasi

Semakin tinggi angka migrasi total, maka jumlah penduduk yang tempat tinggalnya sekarang berbeda dengan tempat tinggal sebelumnya semakin banyak.

Sumber Data

Sensus Penduduk dan Survei Penduduk Antar Sensus.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Publikasi

Statistik Indonesia.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

Minimnya data migrasi, dimana data migrasi dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

Kemiskinan dan Ketimpangan

Garis Kemiskinan (GK)

Poverty Line

Konsep dan Definisi

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini tidak hanya digunakan oleh BPS tetapi juga oleh negara-negara lain seperti Armenia, Senegal, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Sierra Leone, dan Gambia. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM), di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM.

Manfaat

Untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan, seperti jumlah dan persentase penduduk miskin (*headcount index* – P_0), indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* – P_1), dan indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index* – P_2).

Rumus

$$GK = GKM + GKNM$$

GK : Garis Kemiskinan

GKM : Garis Kemiskinan Makanan

GKNM : Garis Kemiskinan Nonmakanan

GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Sementara GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di pedesaan.

Interpretasi

Garis Kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai **penduduk miskin**.

Sumber Data

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor serta Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD).

Level Penyajian

Nasional dan provinsi yang dibedakan menurut wilayah perkotaan dan pedesaan.

Publikasi

Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan, Data dan Informasi Kemiskinan, Statistik Indonesia, Laporan Data Bulanan Sosial Ekonomi, Data Strategis BPS, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia.

Penyedia Informasi

- Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik
- Direktorat Ketahanan Sosial.

Keterbatasan

Tidak memperhitungkan konsumsi penduduk menurut jenis kelamin dan menurut umur.

Implementasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Garis kemiskinan naik sebesar 5,72 persen selama Maret 2009 hingga Maret 2010. Ambang batas kemiskinan yang semula berada di angka Rp 200.262 per kapita per bulan naik ke angka Rp 211.726 per kapita per bulan. Sumbangan terbesar datang dari beras, biaya perumahan dan rokok kretek.

Dalam keterangan pers di kantornya, Kamis (1/7/2010), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengatakan ketiganya merupakan kebutuhan yang tampaknya terus diupayakan oleh masyarakat miskin untuk dipenuhi. "Ini dilematis ya, penerimaan negara juga dari cukai dan

lapangan kerja industri rokok tapi buat orang miskin, ini rugi," ungkapnya.

Data BPS menunjukkan rokok kretek masuk dalam kategori komoditi makanan yang memberi sumbangan besar pada garis kemiskinan sebagai ambang batas menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Kontribusinya mencapai 7,93 persen di perkotaan dan 5,9 persen di pedesaan. Kontribusi beras di tempat pertama sebesar 25,2 persen. Artinya, orang miskin akan lebih mengutamakan makan daripada hal lainnya.

Sementara itu, kontribusi komoditi bukan makanan juga tak kalah besarnya. Biaya perumahan memberikan kontribusi terbesar untuk garis kemiskinan, yaitu 8,43 persen di perkotaan dan 6,11 persen di pedesaan. Besaran kontribusinya diikuti oleh biaya listrik sebesar 3,3 persen di perkotaan dan 1,87 di pedesaan.

Sumber:

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/07/01/16102515/Rokok.Kretek>.

Dongkrak.Garis.Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin

Headcount Index (HCI) – P₀

Konsep dan Definisi

Headcount Index (HCI – P₀) yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan. *Headcount Index* secara sederhana mengukur proporsi penduduk yang dikategorikan miskin.

BPS melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pertama kali pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Kemudian mulai tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun¹. Sejak Desember 1998, penghitungan penduduk miskin telah menggunakan standar baru yang lebih dinamis. Perbedaan standar baru ini dengan standar sebelumnya (tahun 1996) adalah pada perluasan cakupan komoditi

yang diperhitungkan dalam kebutuhan dasar.

Manfaat

Untuk mengetahui persentase penduduk yang dikategorikan miskin.

Rumus

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$$

P₀ : *Headcount Index* atau persentase penduduk miskin

z : Garis Kemiskinan

y_i : Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di

bawah garis kemiskinan (i = 1, 2,...,q), y_i < z

q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n : Jumlah penduduk

Interpretasi

Angka yang ditunjukkan oleh HCI-P₀ menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

Sumber Data

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten yang dibedakan menurut wilayah perkotaan dan perdesaan.

Publikasi

Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan, Data dan Informasi

¹Perlu diperhatikan bahwa Bank Dunia juga mengeluarkan angka kemiskinan (berdasarkan *PurchasingPowerParity*) tetapi dengan konsep yang berbeda dengan BPS sehingga hasilnya berbeda dan tidak dapat diperbandingkan.

Kemiskinan, Statistik Indonesia, Laporan Data Bulanan Sosial Ekonomi, Data Strategis BPS, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia.

Penyedia Informasi

- Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik.
- Direktorat Ketahanan Sosial.

Keterbatasan

Tidak dapat memperhitungkan intensitas kemiskinan, tidak mengindikasikan untuk kedalam kemiskinan penduduk miskin tersebut atau seberapa parah tingkat kemiskinan yang terjadi. Selain itu persentase penduduk miskin tidak berubah jika penduduk di bawah garis kemiskinan menjadi lebih miskin.

Implementasi

TANJUNGPINANG, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik provinsi Kepulauan Riau menyatakan, jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut meningkat 1.460 orang selama satu tahun terakhir.

Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Kepri Erisman, Kamis (1/7/2010) mengatakan, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Kepulauan Riau pada bulan Maret 2010 sebanyak 129.670 orang (8,05 persen), mengalami kenaikan dibanding Maret 2009 yang hanya mencapai 128.210 orang (8,27 persen).

"Selama periode Maret 2009 - Maret 2010, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 3.050 orang, sementara di daerah perkotaan bertambah 4.500 orang," katanya di Tanjungpinang, ibu kota Kepri.

Erisman mengatakan, jumlah dan persentase penduduk miskin di provinsi Kepulauan Riau pada periode Maret 2009-Maret 2010 meningkat sebesar 361 orang, yaitu dari 148.003 orang pada tahun 2005 menjadi 148.364 orang pada tahun 2007.

Persentase penduduk miskin menurun dari 10,97 persen menjadi 10,30 persen pada periode yang sama. Jumlah penduduk miskin daerah pedesaan menurun 6.382 orang dari 77.913 orang pada tahun 2005 menjadi 71.531 pada tahun 2007.

Namun terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin daerah perkotaan sebesar 6.743 orang yaitu dari 70.090 orang pada tahun 2005 menjadi 76.833 orang pada tahun 2007.

Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin selama Juli 2005-Maret 2007 terjadi karena harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut naik tinggi, yang digambarkan oleh inflasi umum sebesar 17,38 persen.

"Hal itu menyebabkan penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada di sekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin," ujarnya.

Dia mengemukakan, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan.

Selama Juli 2005-Maret 2007 garis kemiskinan naik sebesar 8,22 persen

yaitu dari Rp 215.803 per kapita per bulan pada 2005 menjadi Rp 233.532 per kapita per bulan pada 2007.

Untuk daerah perkotaan, garis kemiskinan naik sebesar 20,49 persen yaitu dari Rp 231.346 per kapita per bulan pada 2005 menjadi Rp 278.742 per kapita per bulan pada 2007.

Untuk daerah pedesaan, garis kemiskinan naik sebesar 36,77 persen yaitu dari Rp 156.453 per kapita per bulan pada 2005 menjadi Rp 213.985 per kapita per bulan pada 2007.

Dia mengemukakan, permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Sumber:

[http://regional.kompas.com/read/2010/07/01/17101747/BPS.Jumlah.Penduduk.](http://regional.kompas.com/read/2010/07/01/17101747/BPS.Jumlah.Penduduk.Miskin.Meningkat)

Miskin.Meningkat

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Poverty Gap Index – P₁

Konsep dan Definisi

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index – P₁*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Manfaat

Nilai agregat dari *poverty gap index* menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program.

Rumus

$$P_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]$$

- P_1 : *Poverty Gap Index* atau Indeks Kedalaman Kemiskinan
- z : Garis Kemiskinan
- y_i : Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, \dots, q$), $y_i < z$
- q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- n : Jumlah penduduk

Interpretasi

Penurunan nilai indeks Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Sumber Data

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten yang dibedakan menurut wilayah perkotaan dan perdesaan.

Publikasi

Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan, Data dan Informasi Kemiskinan, Statistik Indonesia, Laporan Data Bulanan Sosial Ekonomi, Data Strategis BPS, dan Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia.

Penyedia Informasi

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Direktorat Ketahanan Sosial.

Keterbatasan

Tidak dapat memberikan gambaran yang meyakinkan mengenai perbedaan dalam keparahan kemiskinan di antara penduduk miskin.

Implementasi

Jumlah penduduk miskin di bawah Garis Kemiskinan di Sumatera Utara (Sumut) Maret 2010 sebesar 1.490.900 orang (11,31 persen).

Demikian Kepala BPS Sumut Drs. Alimuddin Sidabalok kepada wartawan dalam jumpapers di kantornya, Kamis (1/7).

Dikatakannya, bila dibandingkan dengan penduduk miskin Maret 2009 berjumlah 1.499.700 orang (11,51 persen), berarti jumlah penduduk miskin di provinsi Sumut berkurang sebanyak 8.800 orang atau persentasenya berkurang sebesar 0,20 poin.

Sedangkan selama periode Maret 2009–Maret 2010, penduduk miskin di daerah perdesaan berkurang 9.800 orang (0,27 persen), sementara di daerah perkotaan bertambah sekitar 1.000 orang namun persentasenya berkurang sebesar 0,11 poin.

Lebih lanjut diutarakannya, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berbeda.

Pada Maret 2010, penduduk miskin berada di daerah perdesaan sebesar 11,29 persen dan di daerah perkotaan sebesar 11,34 persen.

Sementara itu, Sidabalok menyampaikan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Sumut tahun 2010 meningkat dibanding tahun 2009 dari 0,50 menjadi 0,57.

Demikian pula Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) angkanya mengalami peningkatan dari 1,92 tahun 2009 menjadi 2,04 pada tahun 2010.

"Ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan dan tingkat ketimpangannya juga semakin besar," jelasnya.

Susenas

Adapun Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2010 menunjukkan jumlah penduduk miskin di provinsi Sumut sebanyak 1.490.900 orang atau sebesar 11,31 persen terhadap jumlah penduduk seluruhnya.

Kondisi ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2009 yang jumlah penduduk miskinnya sebanyak 1.499.700.

Dengan demikian, terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 8.800 orang atau persentasenya berkurang sebesar 0,20 poin.

Menurutnya, penurunan jumlah penduduk miskin di Sumut mengindikasikan dampak dari program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah cukup berperan dalam menurunkan penduduk miskin di daerah ini.

Jumlah penduduk miskin Sumatera Utara yang berada di daerah perdesaan pada Maret 2010 sebanyak 801.900 orang dan di daerah perkotaan sebanyak 689.000 orang.

Jika dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di masing-masing daerah, maka persentase penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 11,29 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 11,34 persen.

Dalam kesempatan itu juga dipaparkannya, besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi garis kemiskinan, karena penduduk miskin memiliki rata-rata pengeluaran

per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin.

Dimensi lain yang perlu diperhatikan, tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Dikatakannya, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan yang menyangkut kemiskinan juga sekaligus mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Nilai indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan indeks keparahan kemiskinan (P_2) di daerah perkotaan pada Maret 2010 lebih rendah dibandingkan daerah perdesaan.

Pada bulan Maret 2010, nilai indeks kedalaman kemiskinan (P_1) untuk perkotaan sebesar 2,01 dan di daerah perdesaan mencapai 2,07. Adapun nilai indeks keparahan kemiskinan (P_2) untuk perkotaan sebesar 0,54 dan di daerah perdesaan mencapai 0,59.

Sumber:

http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=13025&Itemid=851

Indeks Keparahan Kemiskinan

Poverty Severity Index – P₂

Konsep dan Definisi

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index – P₂*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Manfaat

Ukuran ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Rumus

$$P_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^2$$

- P_2 : Poverty Severity Index atau Indeks Keparahan Kemiskinan
 z : Garis Kemiskinan
 y_i : Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, \dots, q$), $y_i < z$
 q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
 n : Jumlah penduduk

Interpretasi

Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Sumber Data

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten yang dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan

Publikasi

Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan, Data dan Informasi Kemiskinan, Statistik Indonesia, Laporan Data Bulanan Sosial Ekonomi, Data Strategis BPS, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia.

Penyedia Informasi

- Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik
- Direktorat Ketahanan Sosial.

Keterbatasan

Sulit diinterpretasikan secara tersendiri dan tidak memiliki suatu makna jika disajikan secara tersendiri, sehingga sangat informatif apabila disandingkan dengan *headcount index* dan *poverty gap index*.

Implementasi

Lihat implementasi Indeks Kedalaman Kemiskinan.

Indeks Kemiskinan Manusia (IKM)

The Human Poverty Index (HPI)

Konsep dan Definisi

IKM adalah indeks komposit yang mengukur derivasi (keterbelakangan manusia) dalam tiga dimensi : lamanya hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. IKM ini mengartikan tingkatan status kemiskinan manusia di suatu wilayah

Manfaat

Untuk mempermudah perbandingan antar wilayah maupun Negara. Untuk melihat kecenderungan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Tingkatan status kemiskinan tersebut bisa menjadi alat ukur yang berfungsi sebagai patokan dasar perencanaan jika dibandingkan antar waktu untuk memberikan gambaran kemajuan setelah suatu periode atau perbandingan antar wilayah untuk memberikan gambaran tentang tingkat kemajuan suatu wilayah relatif terhadap wilayah lain.

Metode Penghitungan

Indeks ini disusun dari tiga indikator: penduduk yang diperkirakan tidak berumur panjang, ketertinggalan dalam pendidikan dan akses terhadap pelayanan dasar. Indikator pertama dihitung dengan peluang suatu populasi untuk tidak bertahan hidup sampai umur 40 tahunan (P_1), indikator kedua diukur dengan angka buta huruf umur dewasa (15 tahun keatas) (P_2), keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar (P_3). Keterbatasan terhadap layanan kesehatan terbagi menjadi 3 variabel yaitu

presentase penduduk tanpa akses terhadap air bersih (P_{31}), presentase penduduk yang tidak memiliki akses ke sarana kesehatan (P_{32}), presentase anak balita dengan status gizi kurang (P_{33}).

$$IKM = \left[\frac{1}{3} (P_1^3 + P_2^3 + P_3^3) \right]^{1/3}$$

Dimana:

$$P3 = 1/3 (P_{31} + P_{32} + P_{33})$$

Interpretasi

Nilai IKM berkisar antara 0-100. Semakin tinggi nilai IKM menunjukkan tingkat/derajat kemiskinan penduduk disuatu wilayah semakin tinggi. Klasifikasi yang dikeluarkan oleh UNDP sendiri membagi tingkat-tingkat kemiskinan suatu daerah ke dalam 4 klasifikasi derajat kemiskinan. Empat klasifikasi tersebut yaitu : klasifikasi rendah dengan nilai IKM kurang dari 10, klasifikasi menengah rendah dengan nilai IKM 10 – 25, klasifikasi menengah tinggi dengan nilai IKM 25 – 40, dan klasifikasi tinggi dengan nilai IKM lebih dari 40.

Sumber Data

Susenas Kor dan Modul Konsumsi, Sensus Penduduk, SUPAS.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten.

Publikasi

Laporan Pembangunan Manusia, Laporan Akhir Indikator Kesejahteraan Rakyat.

Keterbatasan

IKM bukanlah indeks yang berdasarkan "hitung kepala". Jadi angka IKM 22,7% tidaklah berarti bahwa 22,7% dari

penduduk hidup dalam kemiskinan manusia.

Implementasi

Nilai IKM untuk propinsi Jawa Barat meningkat dari 26,3 pada tahun 1995 menjadi 26,9 pada tahun 1998. Selain peningkatan tersebut, yang lebih menyedihkan tingkat kemiskinan di Jawa Barat ternyata lebih tinggi dari tingkat

kemiskinan nasional yang mempunyai nilai IKM 25,2. Dengan nilai IKM seperti itu, berdasarkan klasifikasi yang diberikan oleh UNDP, derajat kemiskinan penduduk Jawa Barat berada pada klasifikasi menengah tinggi. Hal tersebut menunjukan bahwa tingkat kemiskinan penduduk Jawa Barat relatif masih tinggi dan tentunya diperlukan kerja keras untuk mengentaskannya.

<http://www.bps.go.id>

Ketimpangan Pendapatan (Ukuran Bank Dunia)

Konsep dan Definisi

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi.

Manfaat

Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan.

Rumus

Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

Interpretasi

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi;
- jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah;

- jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Sumber Data

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Level Penyajian

-

Publikasi

Statistik Indonesia, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan.

Penyedia Informasi

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik.

Keterbatasan

-

Implementasi

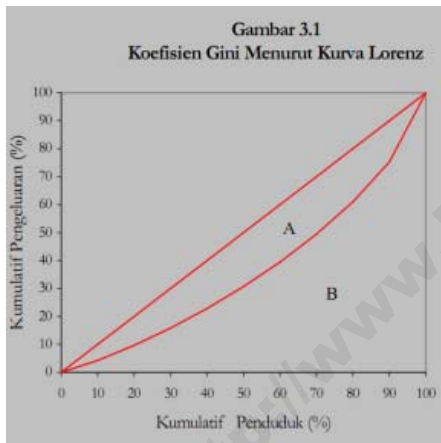
Contoh ada pada salah satu publikasi BPS.

Koefisien Gini

Gini Ratio

Konsep dan Definisi

Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.



Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A=0$ koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika $B=0$ koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna.

Manfaat

Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Rumus

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f p_i \times (F c_i + F c_{i-1})$$

GR : Koefisien Gini

$f p_i$: frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

$F c_i$: frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

$F c_{i-1}$: frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

Interpretasi

Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Sumber Data

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Level Penyajian

Nasional dan provinsi.

Publikasi

Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan; Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia; Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Distribusi Pendapatan.

Penyedia Informasi

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik.

Keterbatasan

Pengukuran dengan menggunakan Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan karena penurunan

ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan.

Implementasi

JAKARTA (Bisnis.com): Pemerataan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah ke depan menyusul ketimpangan pendapatan masyarakat yang masih cukup besar sampai saat ini.

Ahmad Erani Yustika, Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef), menuturkan salah satu penyebab utama timpangnya pendapatan masyarakat selama ini adalah karena kesenjangan yang cukup besar antara sektor usaha *tradable* dan *nontradable*.

Padaahal, sebuah pembangunan bisa dikatakan berhasil bila pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan bisa dikurangi.

"Untuk itu, pemerintah ke depan harus memprioritaskan sektor pertanian dan industri sebagai lokomotif pembangunan, sehingga memiliki dampak yang besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Strategi inilah yang harus dikawal," jelasnya kepada Bisnis.com tadi malam.

Data Gini Rasio Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat pada tahun lalu sebesar 0,36 yang memperhitungkan data pengeluaran individu per kapita per bulan yang di kota (0,36) dan di desa (0,29).

Kendati lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 0,37, tetapi Rasio Gini 2009 tidak cukup baik jika dibandingkan 2005 yang hanya 0,34.

"Jika data [Rasio Gini BPS] itu memang riil tentu harus disyukuri karena berarti kualitas pembangunan menjadi lebih bagus," ujar Erani.

Wynandin Imawan, Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS, menjelaskan jika diukur dari tingkat pendapatan masyarakat, tingkat rasio gini sebesar 0,36 menggambarkan betapa ketimpangan ekonomi masih terjadi pada 2009.

Kendati lebih rendah dibandingkan rasio gini 2008 yang sebesar 0,37, tetapi secara umum terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.

"Tentu ada ketimpangan, tetapi karena survei ini dilakukan pada Maret 2009 yang kebetulan berdekatan dengan pemilihan umum, maka ada efeknya terhadap konsumsi masyarakat karena banyaknya pengeluaran," jelas dia kepada Bisnis.com siang ini.

Menurut Wynandin, Rasio Gini merupakan satu ukuran ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh yang didasarkan pada kurva Lorenz, yakni kurva dua dimensi antara distribusi penduduk dan distribusi pengeluaran per kapita.

Semakin rasionya mendekati angka 1, maka tingkat ketimpangan ekonomi kian tinggi dan merata, dan sebaliknya.

Pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 menyatakan selama periode

2005-2009, angkatan kerja bertambah 1,99 juta per tahun, sementara kesempatan kerja yang tercipta sebesar 2,73 juta per tahun.

Dengan demikian, jumlah pengangguran dapat diturunkan, dari 10,25 juta pada Agustus 2004 menjadi 8,96 juta pada Agustus 2009, dan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 9,86% menjadi 7,87%.

Berangkat dari keberhasilan tersebut, pemerintah akan terus menekan tingkat pengangguran menjadi 7,6% pada 2010 dan menjadi sekitar 5%-6% pada 2014.

Sementara itu, jumlah orang miskin juga diklaim turun, dari 35,1 juta pada Maret 2005 menjadi 32,53 juta pada Maret 2009 dan tingkat kemiskinan turun dari 15,97% menjadi 14,15%.

Pada 2010, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan secara absolut menjadi 12-13,5% dan menjadi 8-10% pada 2014 seiring dengan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. (wiw)

Sumber:

<http://web.bisnis.com/keuangan/1id163087.html>

<http://www.bps.go.id>

Ketenagakerjaan

<http://www.kemnaker.go.id>

Angkatan Kerja

Labor Force

Konsep dan Definisi

Penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Manfaat

Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

Rumus

Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yg bekerja + Jumlah Penduduk umur 15 tahun keatas yang pengangguran.

Interpretasi

Semakin tinggi jumlah angkatan kerja berarti semakin banyak jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

Sumber Data

Sakernas, Susenas, Supas, dan Sensus Penduduk.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten.

Publikasi

Inkesra, Statistik Indonesia, dan Keadaan Angkatan Kerja Indonesia.

Penyedia Informasi

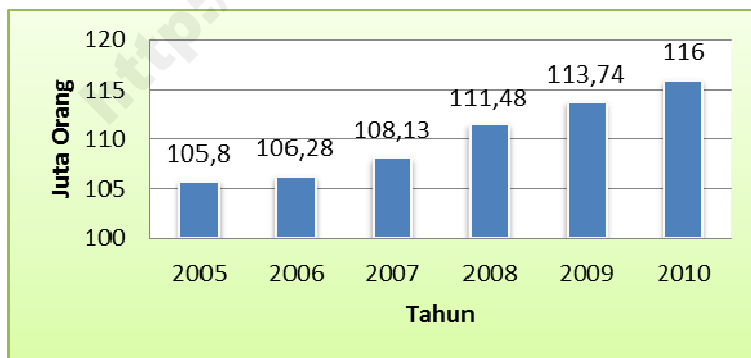
Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

Tidak bisa mencakup pekerja anak, karena batasannya penduduk usia bekerja adalah 15 tahun ke atas.

Implementasi

Jumlah Angkatan Kerja di Indonesia Bulan Februari Tahun 2005-2010 (Juta Orang)



Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan manusia. Melalui

pembangunan ekonomi akan dapat ditingkatkan produktivitas dan pendapatan penduduk dengan terciptanya kesempatan kerja.

Dari sisi ketenagakerjaan, dinamika pertumbuhan ekonomi akan disertai pula oleh transformasi struktur ketenagakerjaan baik dari sisi lapangan pekerjaan, status maupun jenis pekerjaan. Transformasi struktur ketenagakerjaan juga dipengaruhi oleh kondisi persediaan tenaga kerja (sisi *supply*) yang berasal dari output sektor pendidikan yang masuk ke dalam pasar kerja.

Selama periode 2005 sampai 2010 jumlah penduduk angkatan kerja bergerak dari 105,8 juta jiwa menjadi 116 juta jiwa pada Februari 2010 atau rata-rata bertambah 2,04 juta jiwa pertahun.

Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2010 bertambah 2,17 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2009 sebesar 113,83 juta orang atau bertambah 2,26 juta orang dibanding Februari 2009 sebesar 113,74 juta orang. Kenaikan jumlah angkatan kerja tertinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu naik sebesar 3,35 juta jiwa dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada tahun 2007.

Sumber: Indikator Ekonomi

Setengah Penganggur

Underemployment

Konsep dan Definisi

Mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).

Manfaat

Proporsi jumlah penduduk setengah pengangguran bermanfaat untuk dijadikan acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja.

Rumus

Indikator ini dapat dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dan sedang bekerja tetapi dengan jam kerja di bawah normal (kurang dari 35 jam per minggu) dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja.

Tingkat setengah pengangguran:

$$\frac{A}{AK} \times 100$$

A : Jumlah pekerja yang bekerja kurang dari jam kerja normal

AK : Jumlah angkatan kerja

Interpretasi

Semakin tinggi tingkat setengah pengangguran maka semakin rendah tingkat utilisasi pekerja dan produktivitasnya. Akibatnya, pendapatan mereka pun rendah dan tidak ada jaminan sosial atas mereka. Hal ini sering terjadi di sektor informal yang rentan terhadap kelangsungan pekerja, pendapatan dan tidak tersedianya jaminan sosial. Sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan untuk meningkatkan kemampuan bekerja

mereka seperti penambahan balai latihan kerja.

Sumber Data

Sakernas, Susenas, dan Sensus Penduduk.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten.

Publikasi

Inkesra, Statistik Indonesia, dan Keadaan Angkatan Kerja Indonesia.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

-

Implementasi

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran terbuka di Indonesia selama Februari 2009 turun menjadi 8,14%. Meski demikian, angka setengah pengangguran selama pada bulan yang sama naik jadi 31,36%. Angka pengangguran terbuka di Indonesia selama Februari 2009 tercatat turun menjadi 8,14% dibandingkan pada Agustus 2008, angka pengangguran terbuka mencapai 8,39% dan pada Februari 2008 sebesar 8,46%, kata Kepala BPS Rusman Heriawan di Jakarta, Jumat (15/5). Menurut nya, jumlah pengangur pada Februari 2009 mengalami penurunan sekitar 130 ribu orang jika dibandingkan Agustus 2008, dan mengalami penurunan 170 ribu orang jika dibanding keadaan Februari 2008. Meski demikian, angka setengah pengangguran pada Februari 2009 meningkat menjadi 31,36 juta bila

dibandingkan dengan angka 31,09 juta di Agustus 2008 dan 30,64 juta pada Februari tahun yang sama.

Komposisi setengah pengangguran yang terpaksa pada Februari 2009 adalah 15 juta, naik dibandingkan Agustus 2008 yang mencapai 14,92 juta. Secara *year on year* (y-o-y) naik dibandingkan Februari 2008 14,60 juta. Sementara untuk setengah pengangguran sukarela pada Februari mencapai 16,36 juta. Jumlah tersebut naik dibandingkan Agustus 2008 16,17 juta dan juga naik dibandingkan Februari 2008 yang berada di level 16,5 juta, tuturnya.

Sumber:

<http://www.lintasberita.com/go/595081>

Diakses Tanggal 18 November 2010

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Labor Force Participation Rate

Konsep dan Definisi

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Manfaat

Untuk melihat penduduk yang potensial untuk dapat memproduksi barang dan jasa.

Rumus

$$TPAK = \frac{AK}{P_{15+}} \times 100$$

AK : Jumlah angkatan kerja (bekerja dan menganggur)

P₁₅₊ : Jumlah penduduk usia 15+

Interpretasi

Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu. Dari data SP 2000 terlihat bahwa penduduk yang berusia 15-19 tahun memiliki TPAK yang terendah sedangkan mereka yang berusia 45-49 tahun memiliki TPAK yang tertinggi.

Sumber Data

Sakernas.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten.

Publikasi

Indikator Kesejahteraan Rakyat, Statistik Indonesia, Keadaan Angkatan Kerja Indonesia.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

-

Implementasi

Jakarta, 17/7/2007 (Kominfo – Newsroom) – Dalam satu tahun terakhir memang terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang bekerja dan menurunnya angka pengangguran, namun tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) posisi Februari 2007 mencapai 66,60 persen berada sedikit di bawah TPAK Februari 2006 sebesar 66,74 persen.

Pelaksana Humas Badan Pusat Statistik (BPS) Mimin Karmiati S.Si, MS di Jakarta, Selasa, menjelaskan menurunnya TPAK tersebut terjadi karena peningkatan jumlah tenaga kerja dan penurunan pengangguran secara signifikan hanya terjadi pada kaum perempuan.

“Sehingga walaupun TPAK Februari 2007 sedikit dibawah TPAK Februari 2006, namun dalam periode yang sama terjadi peningkatan TPAK perempuan”, kata Mimin.

TPAK menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah.

TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja.

Sumber:

<http://www.depkominfo.go.id/berita/berita-utama-berita/partisipasi-angkatan-kerja-mencapai-6660-persen/>

Diakses tanggal :18 November 2010.

<http://www.bps.go.id>

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Unemployment Rate

Konsep dan Definisi

Persentase penduduk: yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada.

Manfaat

Untuk melihat keterjangkauan pekerjaan (kesempatan kerja).

Rumus

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$$

Interpretasi

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Sangatlah tepat jika pemerintah seringkali menjadikan indikator ini sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Sumber Data

Sakernas, Susenas, dan Sensus Penduduk.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten.

Publikasi

Inkesra, MDG, Statistik Indonesia, Keadaan Angkatan Kerja Indonesia.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

-

Implementasi

Di tengah krisis keuangan global, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi Jawa Timur menunjukkan angka yang terus menurun. Pada tahun 2008, TPT menunjukkan penurunan yang signifikan menjadi 6,42 persen dari sebelumnya sebesar 8,19 persen pada tahun 2007 lalu.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo memaparkan dari tahun 2003, TPT di provinsi Jawa Timur menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2003, angka TPT mencapai 6,43 persen, tahun 2004 mencapai 8,68 persen, tahun 2005 mencapai 7,69 persen, tahun 2006 mencapai 8,51 persen.

"Data tersebut menjelaskan bahwa perkembangan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan angka yang terus menurun dari tahun ke tahun," kata Soekarwo, di sela Sidang Tahunan Asian Development Bank (ADB) ke-42, di The Westine, Nusa Dua, Bali, Senin (4/5).

Menurut Soekarwo, angka TPT yang menunjukkan penurunan tersebut dipicu oleh banyaknya kebijakan pemerintah yang berorientasi mendorong sektor riil dan kemudahan berusaha. "Kami

melakukan banyak kebijakan untuk mengantisipasi krisis global," tuturnya.

Selain itu, ia melanjutkan angka kemiskinan juga menunjukkan penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2008 mencapai 17,07 persen atau turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 19,80 persen.

Sumber:

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/05/04/22565049/tingkat.pengangguran.terbuka.di.jawa.timur.turun>

Diakses tanggal 18 November 2010.

Tingkat Kesempatan Kerja

Konsep dan Definisi

Peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja.

Manfaat

Menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja.

Rumus

$$\text{TKK} = \frac{\text{Jumlah penduduk bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$$

Interpretasi

Peluang seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja untuk bisa terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja. Semakin besar angka TKK, semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah.

Sumber Data

Sakernas, Susenas, dan Sensus Penduduk.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten.

Publikasi

Indikator Kesejahteraan Rakyat, MDG, Statistik Indonesia, Keadaan Angkatan Kerja Indonesia.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Keterbatasan

-

Rasio Ketergantungan

Dependency Ratio

Konsep dan Definisi

Rasio Ketergantungan *nma*(*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Manfaat

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rumus

$$RK = \frac{P_{(0-14)} + P_{(65+)}}{P_{(15-64)}} \times 100$$

RK : Rasio ketergantungan

$P_{(0-14)}$: Jumlah Penduduk Usia Muda (0-14 tahun)

$P_{(65+)}$: Jumlah Penduduk Usia Tua (65 tahun keatas)

$P_{(15-64)}$: Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)

Interpretasi

Misalnya rasio ketergantungan adalah sebesar 54,7 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 55 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Sumber Data

Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Level Penyajian

Nasional dan provinsi.

Publikasi

Statistik Indonesia, Daerah Dalam Angka.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan .

Implementasi

-

Rata-Rata Upah Harian Buruh Bangunan

Konsep dan Definisi

Rata-rata upah yang dibayarkan perusahaan kepada pekerja harian lepas (seluruh pekerja yang terlibat langsung dengan proyek, dengan status sebagai pekerja tidak tetap yang dibayar sesuai dengan banyaknya hari bekerja dengan sistem upah harian) yang bekerja pada proyek konstruksi.

Manfaat

Untuk mengetahui tingkat upah harian buruh bangunan di tiap provinsi.

Rumus

$$RUHBB = \frac{x_1}{x_2}$$

RUHBB : Rata-rata upah harian buruh bangunan.

x_1 : Jumlah upah yang dibayarkan kepada pekerja lapangan harian lepas menurut provinsi.

x_2 : Jumlah orang-hari pekerja lapangan harian lepas menurut provinsi.

Interpretasi

Misal: rata-rata upah harian buruh bangunan pada maret 2010 adalah Rp 56.864.

Maksudnya: Setiap buruh bangunandi Indonesia secara rata-rata mendapatkan upah sebesar Rp 56.864 per hari.

Sumber Data

Survei tahunan perusahaan konstruksi.

Level Penyajian

Provinsi.

Publikasi

Statistik konstruksi.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Industri.

Keterbatasan

Data di tiap perusahaan (responden) sulit diperoleh.

Implementasi

JAKARTA - Upah nominal harian buruh tani Nasional pada Februari 2010 naik sebesar 0,56 persen dibanding upah Januari 2010, yaitu dari Rp37.426 menjadi Rp37.637 per hari. Secara riil mengalami penurunan sebesar 0,33 persen.

Hal tersebut diungkapkan Kepala badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan, saat ditemui wartawan dalam konferensi pres, di Gedung BPS, Jakarta, Kamis (1/4/2010). Upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Maret 2010 naik 0,24 persen dibanding upah Februari 2010, yaitu dari Rp56.864 menjadi Rp56.998 per hari. Secara riil naik sebesar 0,38 persen.

Upah nominal bulanan buruh industri pada triwulan III 2009 naik sebesar 3,33 persen dibanding upah triwulan II 2009 yaitu dari Rp1.119.196 menjadi Rp1.156.492, secara riil naik 1,41 persen. Dibanding upah triwulan III 2008 (year on year), upah nominal naik 5,32 persen. Sebelumnya, BPS mencatatkan upah buruh tani Indonesia secara riil pada Januari 2010 turun 0,78 persen menjadi Rp29.997 per hari dari sebelumnya Rp30.233 pada Desember 2009. Hal tersebut berkaitan dengan nilai tukar

petani nasional yang disurvei BPS turun 0,01 persen dibanding bulan sebelumnya.

Meskipun mengalami penurunan secara nominal, rata-rata upah harian buruh nasional Januari 2010 naik 0,32 persen dibanding Desember 2009 yang hanya Rp37.305 per hari. Perubahan riil yang dimaksud adalah menggambarkan perubahan daya beli dari pendapatan yang diterima oleh buruh, baik itu buruh tani, buruh informasl, perkotaan, atau buruh industri. Mereka yang masuk disurvei adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Selain petani, nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Februari 2010 naik 0,52 persen dibanding upah Januari 2010 yaitu dari Rp56.570 menjadi Rp56.864.

Rata-Rata Upah Harian Buruh Tani

Konsep dan Definisi

Rata-rata upah yang dibayarkan kepada orang yang bekerja di sektor pertanian yaitu yang bekerja pada orang lain/perusahaan yang jenis pekerjaannya masih erat dengan kegiatan pertanian atas dasar balas jasa dengan mendapatkan upah/gaji dalam bentuk uang/barang yang diterima secara harian.

Manfaat

Untuk mengetahui tingkat upah harian buruh tani per provinsi.

Rumus

$$RUHBT = \frac{x_1}{x_2}$$

RUHBT : Rata-rata upah harian buruh tani

x_1 : Total upah yang dibayarkan kepada buruh tani harian di suatu wilayah

x_2 : Jumlah orang-hariburuh tani hariandi suatu wiayah

Interpretasi

Misalkan rata-rata upah harian buruh tani di provinsi Jawa Tengah pada Maret 2010 adalah Rp 50.554.

Maksudnya adalah bahwa setiap buruh tanidi provinsi Jawa Tengah secara rata-rata mendapatkan upah sebesar Rp 50.554. per hari.

Sumber Data

Untuk mengetahui informasi RUHBT untuk semua sektor didapat dari Sensus Pertanian 2003, Sedangkan informasi *up-date*RUHBT padi didapat dari Survei

Struktur Ongkos Usaha Tani Tanaman Padi 2008, *up-date* RUHBT Jagung didapat dari Survei Struktur Ongkos Usaha Tani Tanaman Jagung 2009, dan *up-date* RUHBT Kedelai didapat dari Survei Struktur Ongkos Usaha Tani Tanaman Kedelai 2010.

Level Penyajian
Provinsi.

Publikasi

Untuk mendapatkan informasi RUHBT untuk semua sektor menggunakan publikasi Sensus Pertanian 2003 Struktur Ongkos Usaha Pertanian, sedangkan untuk mendapatkan informasi *up-date* RUHBT khusus untuk komoditi Padi menggunakan publikasi Struktur Ongkos Usaha Tani Tanaman Padi 2008, untuk mengetahui *up-date* RUHBT komoditi Jagung menggunakan publikasi Struktur Ongkos Usaha Tani Tanaman Jagung 2009 dan untuk mengetahui *up-date* RUHBT komoditi Kedelai menggunakan publikasi Struktur Ongkos Usaha Tani Tanaman Kedelai 2010.

Penyedia Informasi

Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Keterbatasan

Penyajian indikator hanya sampai pada level provinsi.

Informasi *up-date* RUHBT komoditi padi hanya mencakup 15 sampel provinsi, *up-date* RUHBT komoditi jagung hanya menggunakan 15 sampel provinsi, dan *up-date* RUHBT komoditi kedelai hanya menggunakan 9 sampel provinsi.

Implementasi

JAKARTA - Upah nominal harian buruh tani Nasional pada Februari 2010 naik sebesar 0,56 persen dibanding upah Januari 2010, yaitu dari Rp37.426 menjadi Rp37.637 per hari. Secara riil mengalami penurunan sebesar 0,33 persen.

Hal tersebut diungkapkan Kepala badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan, saat ditemui wartawan dalam konferensi pers, di Gedung BPS, Jakarta, Kamis (1/4/2010). Upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Maret 2010 naik 0,24 persen dibanding upah Februari 2010, yaitu dari Rp56.864 menjadi Rp56.998 per hari. Secara riil naik sebesar 0,38 persen.

Upah nominal bulanan buruh industri pada triwulan III 2009 naik sebesar 3,33 persen dibanding upah triwulan II 2009 yaitu dari Rp1.119.196 menjadi Rp1.156.492, secara riil naik 1,41 persen. Dibanding upah triwulan III 2008 (year on year), upah nominal naik 5,32 persen. Sebelumnya, BPS mencatatkan upah buruh tani Indonesia secara riil pada Januari 2010 turun 0,78 persen menjadi Rp29.997 per hari dari sebelumnya Rp30.233 pada Desember 2009. Hal tersebut berkaitan dengan nilai tukar petani nasional yang disurvei BPS turun 0,01 persen dibanding bulan sebelumnya.

Meskipun mengalami penurunan secara nominal, rata-rata upah harian buruh nasional Januari 2010 naik 0,32 persen dibanding Desember 2009 yang hanya Rp37.305 per hari. Perubahan riil yang dimaksud adalah menggambarkan perubahan daya beli dari pendapatan

yang diterima oleh buruh, baik itu buruh tani, buruh informal, perkotaan, atau buruh industri. Mereka yang masuk disurvei adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Selain petani, nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Februari 2010 naik 0,52 persen dibanding upah Januari 2010 yaitu dari Rp56.570 menjadi Rp 56.864.

Sumber:

<http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2010/04/01/320/318412/upah-petani-ri-cuma-dibayar-rp37-637-hari>

Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Human Development Index (HDI)

Konsep dan Definisi

Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choice of people*). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standard hidup layak.

Manfaat

Untuk mengklasifikasikan apakah sebuah Negara adalah Negara maju, Negara berkembang, atau Negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Rumus

$$\text{indeks}X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\min)})}{(X_{(i-\max)} - X_{(i-\min)})}$$

Dimana :

$X_{(i,j)}$: Komponen IPM ke-i dari daerah j.

$X_{(i-\min)}$: Nilai minimum komponen IPM ke-i.

$X_{(i-\max)}$: Nilai maksimum dari komponen IPM ke-i.

Komponen IPM	Maks.	Min.	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
AHH	85	25	UNDP
AMH	100	0	UNDP
MYS	15	0	
Daya beli	732,720	360,000	

$$IPM_j = \frac{1}{3} \sum_j \text{indeks } X_{(i,j)}$$

Dimana:

$\text{indeks}X_{(i,j)}$: indeks komponen ke- i untuk wilayah ke - j.

Untuk indikator pendidikan (AMH dan MYS) keduanya digabung setelah diberi bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga.

Interpretasi

Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu Negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Sumber Data

Susenas Kor, Susenas Mudul Konsumsi, SUPAS, Proyeksi Penduduk, Indeks Harga Konsumen.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten.

Publikasi

Indeks Pembangunan Manusia, Statistik Indonesia.

Penyedia Informasi

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik.

Catatan

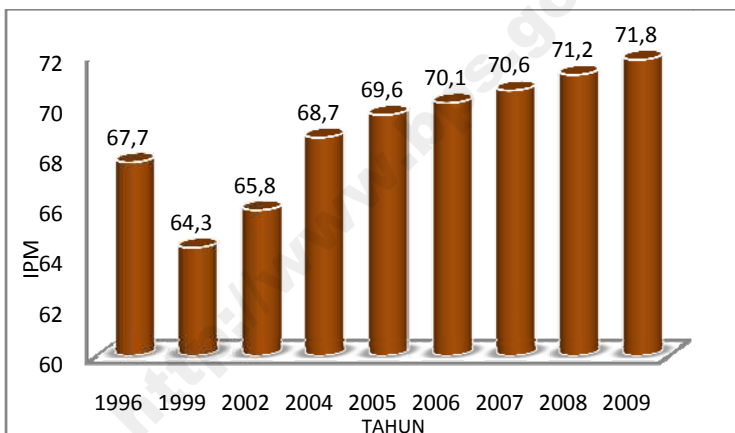
Indikator ini tersusun atas:

Keterbatasan

- Variabel atau indikator yang digunakan terlalu sedikit.
- Kualitas data komponen penyusun IPM untuk level kabupaten masih rendah.
- Perkembangan kemajuan indikator sosial cenderung lambat.

Implementasi

Gambar Perkembangan IPM, Tahun 1996-2009



Sumber: Diolah khusus dari tabel lampiran

Perkembangan IPM Indonesia berdasarkan penghitungan BPS dapat dilihat dalam Gambar 3.1. Secara umum pembangunan manusia di Indonesia selama periode 1996-2009 mengalami peningkatan. Hal ini berhubungan langsung dengan perbaikan beberapa indikator sosial. Misalnya, angka melek huruf dewasa terus meningkat seiring dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah. Indikator lain juga mencatat

kemajuan. Angka kematian bayi terus menurun dan persentase balita kurang gizi juga terus berkurang. Perbaikan IPM juga sepatutnya diikuti oleh menurunnya jumlah penduduk miskin.

Pada tahun 1999 capaian IPM Indonesia mengalami penurunan yang cukup tajam bila dibandingkan dengan tahun 1996, yaitu turun 3,4 poin menjadi 64,3. Capaian IPM ini kembali naik pada tahun

2002 menjadi 65,8, akan tetapi kenaikan tersebut masih belum mampu melampaui IPM Indonesia tahun 1996. Semenjak tahun 2004-2009, angka IPM terus mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2004 yang telah mampu mengembalikan keadaan pada posisi tahun 1996 bahkan melampauinya, yaitu

sebesar 68,7. Sejak tahun 2004 hingga tahun 2009 capaian IPM terus meningkat setiap tahunnya, hingga mencapai 71,76 pada tahun 2009.

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

<http://www.bps.go.id>

Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan (Daya Beli)

Purchasing Power Parity (PPP)

Konsep dan Definisi

Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.

Manfaat

Menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi.

Rumus

Penghitungan indikator konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan dilakukan melalui tahapan pekerjaan sebagai berikut:

1. Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita dari Susenas Modul (=A).
2. Mendeflasikan nilai A dengan IHK ibukota provinsi yang sesuai (=B).
3. Menghitung daya beli per unit (=PPP/unit). Metode penghitungan sama seperti metode yang digunakan *International Comparison Project* (ICP) dalam menstandarkan nilai PDB suatu negara.

Data dasar yang digunakan adalah data harga dan kuantum dari suatu basket komoditi yang terdiri dari nilai 27 komoditi yang diperoleh dari Susenas Modul, yaitu:

- Beras lokal
- Tepung terigu
- Ketela pohon
- Ikan tongkol/tuna/cakalang

- Ikan teri
- Daging sapi
- Daging ayam kampung
- Telur ayam
- Susu kental manis
- Bayam
- Kacang panjang
- Kacang tanah
- Tempe
- Jeruk
- Pepaya
- Kelapa
- Gula pasir
- Kopi bubuk
- Garam
- Merica/lada
- Mie instant
- Rokok kretek/filter
- Listrik
- Air minum
- Bensin
- Minyak tanah
- Sewa rumah

4. Membagi nilai B dengan PPP/unit (=C).
5. Menyesuaikan nilai C dengan formula Atkinson sebagai upaya untuk memperkirakan nilai *marginal utility* dari C.
6. Penghitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus:

$$PPP/unit = \frac{\sum_j E_{(i,j)}}{\sum_j p_{(9,j)} \cdot q_{(i,j)}}$$

Dimana:

$E(i,j)$: pengeluaran untuk komoditi j di provinsi ke- i .

$P(9,j)$: harga komoditi j di DKI Jakarta

$q(i,j)$: jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di provinsi ke- i .

- Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil:

$$C(I) = C_{(i)} \text{ jika } C_{(i)} < Z$$

$$C(I) = Z + 2(C_{(i)} - Z)^{\frac{1}{2}} \text{ jika}$$

$$Z < C_{(i)} < 2Z$$

$$C(I) = Z + 2(Z)^{\frac{1}{2}} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{\frac{1}{3}} \text{ jika}$$

$$2Z < C_{(i)} < 3Z$$

Dimana:

$C_{(i)}$: *Purchasing Power Parity* (PPP) dari nilai riil pengeluaran per kapita.

Z : Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp. 549.500,- perkapita per tahun atau Rp. 1.500,- perkapita per hari.

Interpretasi

Kemampuan daya beli antar daerah berbeda-beda dengan rentang tertinggi 732.720 dan yang terendah 360.000. Semakin rendahnya nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang berate semakin rendah kemampuan masyarakat untuk membeli suatu barang atau jasa.

Sumber Data

Susenas.

Level Penyajian

Nasional

Publikasi

IPM.

Penyedia Informasi

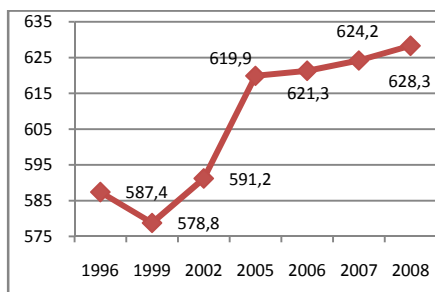
Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Keterbatasan

Idealnya untuk mengukur daya beli, pendekatan yang terbaik adalah dengan mengukur tingkat pendapatan (income) dengan disposable income. Namun, permasalahannya sulit sekali untuk mengukur pendapatan seseorang karena setiap orang tidak hanya mendapatkan pendapatan dari gaji pokok mereka tetapi mereka juga kerap mendapat tambahan-tambahan dari sumber-sumber penghasilan yang lain. Nilai pengeluaran perkapita tidak dapat digunakan untuk keterbandingan antar wilayah mana yang daya belinya lebih baik. Selain itu 27 komoditi yang digunakan untuk mengukur daya beli tidak mencerminkan kondisi spesifik lokal dimana komoditas tiap daerah mungkin berbeda.

Implementasi

Perkembangan Daya Beli Masyarakat, Tahun 1999-2008



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008

Kemampuan daya beli masyarakat sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 3.7 terlihat terus meningkat kecuali pada tahun 1999. Peningkatan daya beli masyarakat terlihat sejak tahun 2002 hingga tahun 2008 meski jika dilihat dari kenaikan nominalnya tidak terlalu besar. Penurunan daya beli masyarakat yang terjadi pada periode 1996-1999 erat kaitannya dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang memburuk sebagai dampak dari krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997. Selanjutnya, setelah tahun 1999 daya beli masyarakat kembali terlihat mulai membaik dan pada tahun 2002 daya beli masyarakat sudah lebih tinggi dari pada tahun 1996 atau sebelum terjadinya krisis. Pada periode 2002-2005, daya beli masyarakat mengalami kenaikan yang cukup pesat, yaiturata-rata mencapai 9,57 ribu per tahun. Namun pada periode-periode berikutnya, peningkatan daya beli masyarakat tampak berjalan melambat, yaitu dari 619,9 ribu pada tahun 2005 menjadi 621,3 ribu pada tahun 2006. Kemudian pada tahun 2007 naik menjadi 624,4 ribu

dan pada tahun 2008 kembali naik menjadi 628,3 ribu.

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008, Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

The Gender-related Development Index (GDI)

Konsep dan Definisi

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Manfaat

IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Rumus

Untuk menghitung IPG, dihitung dahulu pencapaian yang disetarakan dengan tingkat pencapaian yang merata (X) dengan formula:

$$X_{ede} = (P_f X_f^{(1-\epsilon)} + P_m X_m^{(1-\epsilon)})^{1/(1-\epsilon)}$$

Dimana:

X_f : pencapaian perempuan

X_m : pencapaian laki-laki

P_f : proporsi populasi perempuan

P_m : proporsi populasi laki-laki

ϵ : parameter penolakan ketimpangan (:2)

Perhitungan komponen distribusi pendapatan dilakukan sebagai berikut:

1. Menghitung rasio upah perempuan terhadap upah laki-laki di sector non-pertanian (W_f)
2. Menghitung rata-rata upah dengan formula (W)

$$W = (Aec_f \times W_f) + (Acc_m \times 1)$$

Dimana:

Aec_f : proporsi perempuan dalam angkatan kerja (yang aktif secara ekonomi)

Acc_m : proporsi laki-laki dalam angkatan kerja (yang aktif secara ekonomi)

W_f : rasio upah perempuan di sector pertanian

3. Menghitung rasio antara upah untuk masing-masing kelompok gender dengan upah rata-rata (=R)

$$R_f = \frac{W_f}{W} R_m = \frac{1}{W}$$

4. Menghitung upah yang disumbangkan oleh masing-masing kelompok gender [=IncC] dengan formula:

$$IncC_{(f/m)} = Aec_{(f/m)} \times R_{(f/m)}$$

5. Menghitung proporsi pendapatan yang disumbangkan oleh masing-masing kelompok gender [%IncC] dengan formula:

$$\%IncC_{(f/m)} = IncC_{(f/m)} / P_{(f/m)}$$

6. Menghitung X_{ede} dari [%IncC] [=X_{ede}(inc)]
7. Menghitung indeks distribusi pendapatan [=I_{Inc-dis}]

$$I_{inc-dis} = [(X_{ede(inc)} \times PPP) - PPP_{min}] [PPP_{max} - PPP_{min}]$$

8. Penghitungan IPG dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Indeks dari masing-masing komponen IPG dihitung dengan formula diatas dengan nilai batas minimum seperti pada tabel di bawah:

Tabel nilai maksimum dan minimum indikator komponen IPG

	Maksimum		Minimum	
	L	P	L	P
Angka harapan hidup	82,5	87,5	22,5	27,5
Angka melek huruf	100	100	0	0
Rata-rata lama sekolah	15	15	0	0
Komposisi per kapita	732,720		300,000 (1996)	
			360,000 (1999,2000)	

L = Laki-laki P = Perempuan

- b. Menghitung X_{ede} dari tiap indeks

- c. Menghitung IPG dengan formula

$$IPG = 1/3 [(X_{ede(1)} + X_{ede(2)} + I_{inc-dis})]$$

Dimana:

$X_{ede(1)}$: X_{ede} untuk harapan hidup

$X_{ede(2)}$: X_{ede} untuk harapan pendidikan.

$I_{inc-dis}$: Indeks distribusi pendapatan.

Interpretasi

Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

Sumber Data

Susenas, Sakernas, Supas, dan Sensus Penduduk.

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten.

Publikasi

Ekonomi dari Demokrasi.

Penyedia Informasi

Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik (hingga tahun 2002).

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (mulai tahun 2003).

Keterbatasan

-

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Konsep dan Definisi

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi.

Manfaat

Untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci pada partisipasi ekonomi dan politik, serta pengambilan keputusan.

Rumus

$$IDJ = \frac{1}{3} [I_{par} + I_{DM} + I_{Inc-dis}]$$

I_{par} : Indeks keterwakilan departemen.

I_{DM} : Indeks pengambilan keputusan.

$I_{Inc-dis}$: Indeks distribusi pendapatan.

Interpretasi

Nilainya berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IDJ semakin tinggi maka perempuan semakin mengambil peran aktif yang penting dalam kehidupan ekonomi dan politik atau makin sempurna pemberdayaannya.

Sumber Data

SUSENAS dan DPRD (untuk data keterwakilan di parlemen).

Level Penyajian

Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Publikasi

Ekonomi dari Demokrasi (Membiayai Pembangunan Manusia Indonesia).

Penyedia Informasi

- Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik (hingga tahun 2002).
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (mulai tahun 2003).

Keterbatasan

-

Catatan

Dalam penghitungan IDJ terlebih dahulu dihitung EDEP (*Equally Distributed Equivalent Percentage*) yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan presentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata. Selanjutnya indeks dari masing-masing komponen adalah nilai EDEP-nya dibagi 50. 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDJ. Indikator ini terdiri dari 3 indeks, yaitu:

1. Indeks Keterwakilan Parlemen

$$EDEP_{(par)} =$$

$$[P_f K_f^{(1-\epsilon)} + P_m K_m^{(1-\epsilon)}]^{(1-\epsilon)}$$

$$I_{par} = \frac{EDEP_{(par)}}{50}$$

Dimana:

ϵ : parameter untuk memperhitungkan tingkat penolakan terhadap ketimpangan.

2. Indeks Pengambilan Keputusan

$$EDEP_{(DM)} =$$

$$[P_f M_f^{(1-\epsilon)} + P_m M_m^{(1-\epsilon)}]^{(1-\epsilon)}$$

$$I_{par} = \frac{EDEP_{(DM)}}{50}$$

3. Indeks Distribusi Pendapatan

Menghitung rasio upah perempuan terhadap upah laki-laki di sector non-pertanian (W_f)

Menghitung rata-rata upah dengan formula (W)

$$W = (Aec_f \times W_f) + (Acc_m \times 1)$$

Dimana:

Aec_f : proporsi perempuan dalam angkatan kerja (yang aktif secara ekonomi)

Acc_m : proporsi laki-laki dalam angkatan kerja (yang aktif secara ekonomi)

W_f : rasio upah perempuan di sector pertanian

Menghitung rasio antara upah untuk masing-masing kelompok gender dengan upah rata-rata ($=R$)

$$R_f = \frac{W_f}{W} R_m = \frac{1}{W}$$

Menghitung upah yang disumbangkan oleh masing-masing kelompok gender [$=IncC$] dengan formula:

$$IncC_{(f/m)} = Aec_{(f/m)} \times R_{(f/m)}$$

Menghitung proporsi pendapatan yang disumbangkan oleh masing-masing kelompok gender [% $IncC$] dengan formula:

$$\%IncC_{(f/m)} = IncC_{(f/m)} / P_{(f/m)}$$

Menghitung X_{ede} dari % $IncC$ [$=X_{ede}(inc)$]

$$X_{ede}(inc) =$$

$$[P_f \%incC_f^{(1-\epsilon)} + P_m \%incC_m]^{(1-\epsilon)}$$

$$I_{inc-dis} =$$

$$[(X_{ede}(inc) \times PPP) - PPP_{min}] [PPP_{max} - PPP_{min}]$$

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2004). *Pedoman Pencacahan Statistik Harga Konsumen*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2008). *Indeks Harga Konsumen di 66 Kota di Indonesia (2007=100)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2008). *Indikator Perekonomian*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2009). *Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2009). Indeks Unit Value Ekspor/Export Unit Value Indexes Januari 2007-Juni 2008. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2009). Indeks Unit Value Impor/Import Unit Value Indexes Januari 2007-Juni 2009. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2009). Perkembangan Indeks Produksi Industri Besar dan Sedang 2006-2009. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2010). Dipetik November 19, 2010, dari Situs Badan Pusat Statistik: http://www.bps.go.id/aboutus.php?id_subyek=03&tabel=1&fl=2
- Badan Pusat Statistik. (2010). Dipetik November 19, 2010, dari Situs Badan Pusat Statistik: www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistik. (2010). Dipetik Desember 14, 2010, dari Situs Badan Pusat Statistik: http://www.bps.go.id/aboutus.php?id_subyek=03&tabel=1&fl=2
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Data Strategis BPS*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Indikator Ekonomi April 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Modul 5 Migrasi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Modul 8 Ketenagakerjaan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Situs Badan Pusat Statistik*. Dipetik Desember 19, 2010, dari http://www.bps.go.id/aboutus.php?id_subyek=03&tabel=1&fl=2
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Situs Badan Pusat Statistik*. Dipetik Desember 19, 2010, dari http://www.bps.go.id/aboutus.php?id_subyek=11&tabel=1&fl=2
- Chotib, D. B. (2010, Desember 13). Migrasi.
- Departemen Komunikasi dan Informasi. (2010). Dipetik November 18, 2010, dari Situs Departemen Komunikasi dan Informasi: <http://www.depkominfo.go.id/berita/berita-utama-berita/partisipasi-angkatan-kerja-mencapai-6660-persen/>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djastuti, J. (1996). Laporan Penelitian Mobilitas Penduduk di Pulau Jawa (Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kompas. (2010). Dipetik November 2010, 18, dari Kompas Online: <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/05/04/22565049/tingkat.pengangguran.terbuka.di.jawa.timur.turun>
- Lintas Berita. (2010). Dipetik November 2010, 18, dari Situs Lintas Berita: <http://www.lintasberita.com/go/595081>
- Mahardika, I. G. (2009). Mengurangi Dampak Pandemi Flu Burung.
- Menteri Kesehatan. (2009). *Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

- Pemda. (2010). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2010. Kuningan: Pemda.
- Puncheon, D. (2005). The Good Indicators Guide: Understanding How to Use and Choose Indicators. APHO.
- Siregar, F. (2004). Epidemiologi dan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue di Indonesia. Universitas Sumatera Utara.
- Suradi. (2007). Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial: Kajian tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, XII(3), 1-13.
- Wikipedia. (2010). *PDB*. Dipetik November 19, 2010, dari Wikipedia: <http://id.wikipedia.org/wiki/PDB>
- Wikipedia. (2010). *Prevalance*. Dipetik Desember 13, 2010, dari Wikipedia: <http://en.wikipedia.org/wiki/Prevalence>

Tim Penyusun Ensiklopedia Indikator

Pengarah & Penanggung Jawab:

Dr. Suhariyanto

Editor:

Dr. Ali Said, Windhiarso Ponco Adi P.

Kontributor

Pejabat struktural, fungsional, dan staf di lingkungan Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik

Tim Penulis:

Alumni AIS/STIS Angkatan 48/13 yang terdiri dari 17 orang, yaitu:

1. Muhammad Rio Bastian (Koordinator)
2. Adi Nugroho
3. Ratih Sari Dewi
4. Financy Ramadhani
5. Agus Setiyono
6. Aldizah Dajustia Hutami
7. Dian Primasari
8. Khumairotus Sa'adah Juriana
9. Dhiar Niken Larasati
10. Fandi Kusuma
11. Trivanie Erlim Putri
12. Anna Rahmayanti Bahsuan
13. Reni Amelia
14. Ibrahim Anas Duwila
15. Nur Hidayati
16. Ni Nyoman Ratna P.
17. Dina Fatmawati

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

☎ (021) 3841195, 3842508, 3810291-4. Fax. 3857046

Home page: <http://www.bps.go.id>

✉ bpsHQ@bps.go.id